



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA KOTA
BANJARMASIN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN LANJUTAN DENGAN AGENDA
PEMBUKTIAN (PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU AHLI
SECARA DARING (ONLINE)) SERTA PENYERAHAN ALAT-
ALAT BUKTI TAMBAHAN DI PERSIDANGAN
(III)**

JAKARTA

SENIN, 1 MARET 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Banjarmasin 2020

PEMOHON

1. Ananda
2. Mushaffa Zakir

TERMOHON

KPU Kota Banjarmasin

ACARA

Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli secara daring (online)) serta Penyerahan Alat-Alat Bukti Tambahan di Persidangan (III)

**Senin, 1 Maret 2021, Pukul 13.33 – 19.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ananda
2. Mushaffa Zakir

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sulaiman Sembiring
2. Aura Akhman
3. Dede Maulana
4. Muhammad Ilham Fiqri
5. Heryanto
6. Bambang Widjojanto

C. Ahli dari Pemohon:

Bambang Eka Cahya Widodo

D. Saksi dari Pemohon:

1. Gusti Juli
2. Nor Ronasari
3. David Santosa

E. Termohon:

1. Rahmiyati Wahdah
2. Mulyadi Rahman
3. Heriwijaya

F. Kuasa Hukum Termohon:

1. Syahrani
2. Budi Setiawan

G. Ahli dari Termohon:

Bayu Dwi Anggona

H. Saksi dari Termohon:

1. M. Syafrudin Akbar
2. Riyan Mangara Simanjuntak

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Mohamad Kurniawan Putra
2. M. Imam Satria Jati
3. Rizaldi Nazaruddin
4. Fazrul Rahman
5. Herman Felani
6. Donny

J. Saksi dari Pihak Terkait:

1. Jasman
2. Mokhammad Noor Fanany

K. Ahli dari Pihak Terkait:

Maruarar Siahaan

L. KPU Provinsi Kalimantan Selatan:

Nurjajin

M. Bawaslu:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Muhammad Yasar | (Bawaslu Kota Banjarmasin) |
| 2. Munawar Halil | (Bawaslu Kota Banjarmasin) |
| 3. Rahmandiansyah | (Bawaslu Kota Banjarmasin) |
| 4. Subaharni | (Bawaslu Kota Banjarmasin) |
| 5. Mastawan | (Bawaslu Kota Banjarmasin) |
| 6. Dewi Retno Petalolo | (Bawaslu Republik Indonesia) |
| 7. Nur Kholis Majid | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan) |
| 8. H. Rani | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Salam Sejahtera untuk kita semua, semua Pihak yang hadir secara langsung maupun daring. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan pemberi keterangan Bawaslu. Hari ini kita sidang untuk Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, Kota Banjarmasin.

Sidang Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Banjarmasin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita lanjut, perlu kami permaklumkan bahwa selama kita di ruangan ini dalam keadaan bicara atau diam untuk tetap menggunakan masker secara benar. Kemudian, kalau Para Pihak masih ada bukti tambahan bisa diserahkan pada awal persidangan agar kami bisa meverifikasi untuk selanjutnya bisa kita sahkan pada akhir persidangan nantinya.

Kita mulai untuk memberikan kesempatan dulu Para Pihak memperkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini. Silakan, Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Pada hari ini kami yang hadir baik luring maupun online adalah sebagai berikut. Yang luring dan ada di Banjarmasin, Pak Ketua, Prinsipal Ibu Ananda dan Mushaffa Zakir. Dan Beliau didampingi oleh Sulaiman Sembiring, Aura Akhman, Dede Maulana dan Ilham Fiqri. Sementara yang hadir di luring yaitu, kolega saya Heryanto dan saya sendiri Bambang Widjojanto. Terima kasih, Pak Ketua.

3. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Pak. Selanjutnya Pihak Termohon!

4. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Terima kasih, Pak. Assalamualaikum wr. wb. hari ini yang hadir di persidangan, saya Syahrani selaku Kuasa Hukum, kemudian didampingi juga oleh Heriwijaya, anggota Komisi KPU Kota Banjarmasin. Kemudian secara luring ada Nurjajin ... yang daring ada Nurjajin dari KPU provinsi,

Pak. Kemudian, Rahmiyati Wahdah, KPU Kota Banjarmasin, Mulyadi Rahman, Kasubag Hukum KPU Kota Banjarmasin dan Budi Setiawan selaku Kuasa Hukum. Demikian.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Pihak Terkait!

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Mohamad Kurniawan Putra yang hadir pada sidang secara luring di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan rekan saya yang hadir secara daring ada Muhamad Imam Satria Jati, ada Rizaldi Nazaruddin, ada Pak Fazlur Rahman, ada Herman Felani, dan Donny. Makasih.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Untuk pemberi keterangan Bawaslu?

8. BAWASLU: MASTAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan nama saya Mastawan, Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin. Ikut mendampingi saya hari ini, Yang Mulia, Bapak Nur Kholis Majid, Anggota Bawaslu dari Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun yang hadir lewat daring, yang pertama adalah Ibu Dewi Retno Petalolo, Anggota Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian, Bapak H. Rani, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Terus Bapak Muhammad Yasar, Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin. Bapak Munawar Halil, Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin. Pak Rahmandiansyah, Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin dan Bapak Subaharni, Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Kita mulai dari Pemohon dulu, Saksi Pemohon ada 3, ya. Bisa ditampilkan Saksi Pemohon! Gusti Juli, mana Gusti Juli?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Izin, Majelis.

11. KETUA: ASWANTO

Apa itu?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Izin dari Pihak Terkait. Sebelum perkara ini ... sebelum agenda pembuktian ini dilanjutkan, kami mohon penetapan terkait dengan permohonan yang dibacakan pada saat sidang yang pertama, pada saat sidang tanggal 26 itu, itu adalah bukan permohonan yang terdaftar di BLPK[Sic!] jadi mohon ditentukan (...)

13. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah ... sudah klir pada waktu sidang pertama, Pak. Yang dibacakan itu adalah sidang permohonan awal, tetapi hal-hal yang ... apa namanya ... ada kaitannya dengan permohonan awal yang tercantum di permohonan perbaikan itu juga dianggap dibacakan itu. Jadi yang diregistrasi awal, Pak. Sudah klir pada waktu sidang pendahuluan.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ya Majelis. Terima kasih.

15. KETUA: ASWANTO

Baik. Jadi, tidak perlu ada penetapan. Kemudian Nor Ronasari. Mana Nor Ronasari? Angkat tangan, Bu, yang Nor Ronasari.

16. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Baik. David. David Santoso ... Santosa. Mana, David?

18. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Baik. Ibu Gusti Juli Islam, ya? Bisa didengar, Ibu?

20. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Bapak, Pak, Bapak.

21. KETUA: ASWANTO

Ibu, Ibu Gusti ... eh, Bapak ini Gusti, ya? Pak Gusti Juli, mana? Baik (...)

22. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Saya, Pak, saya, Yang Mulia (...)

23. KETUA: ASWANTO

Gusti Jul, Gusti Juli, ya, Islam, ya? (...)

24. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Saya, Pak (...)

25. KETUA: ASWANTO

Baik. Nor Norasari, Islam?

26. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, Ya. Saya Islam.

27. KETUA: ASWANTO

Jangan, jangan hanya ngangguk, Bu, nanti tidak kelihatan kalau cuma ngangguk, harus ada suaranya. Kemudian, Pak David Santosa, Kristen, ya?

28. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya, ya.

29. KETUA: ASWANTO

Baik. Dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu pengambilan sumpah Bapak Gusti Juli dan Nor Norasari.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Saudara Gusti Juli dan Nor Ronasari kenapa, ya, menggema suaranya? Mana apa itu rohaniwannya. Udah betul itu duduk di situ saja Pak, Bu. Sudah betul duduk situ. Duduk eh kok duduk, maaf. Berdiri, berdiri, berdua berdiri, maaf. He eh berdiri, terus rohaniwannya Alqurannya diangkat, Pak. Alqurannya diangkat, oke. Ibu, bisa agak ke tengah sedikit? Ibu agak ke tengah sedikit. Bapaknya naik ke tengah lagi biar rohaniwannya bisa agak maju juga. Ayo, Pak, oke. Tirukan, ya, saya bantu lafalnya, ya.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

31. SELURUH SAKSI DARI PEMOHON:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, duduk. Duduk. Oke.

33. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Dan untuk Pak David Santosa, Yang Mulia Bapak Daniel untuk memandu.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Pak David, ya. Kristen atau Katolik, Pak David?

35. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Kristen, Pak. Kristen, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Ya kalau Kristen 2 jari sudah benar. Ikuti lafal saya, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

37. SAKSI DARI PEMOHON:

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, silakan duduk.

39. KETUA: ASWANTO

Selanjutnya, kita sumpah saja dulu Ahli, Ahli untuk Pemohon. Pak Bambang Eka Cahya. Bapak Bambang Eka Cahya Widodo sudah siap Pak? Belum, belum muncul Ahlinya. Pak Bambang, Bapak Bambang Eka Cahya Widodo, kita ambil sumpah dulu, Pak. Dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo (...)

40. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH

Ya, siap.

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Mundur sedikit mungkin, Pak Bambang, mundur sedikit, Pak Bambang sama dengan rohaniwannya. Mundur sedikit, Pak, mundur. Bisa mundur sedikit, Pak Bambang? Pak Bambang bisa mundur sedikit? Kayaknya belum bisa di (...)

42. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH

Ya, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mundur sedikit, Bapak, mundur sedikit supaya rohaniwannya kelihatan di kamera.

44. KETUA: ASWANTO

Bapak, mundur sedikit, Pak Bambang, mundur. Agak ke belakang, Pak, biar kelihatan semua.

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atau geser sedikit, Bapak. Pak Bambang geser sedikit ke kiri, ya. Ke kiri ya, ke kiri atau ke kanan. Ke kiri Pak, Pak Bambang. Pak Bambang? Kayaknya enggak ada komunikasi ini. Coba dites dulu, Pak Bambang? Ya, itu mati itu, IT-nya.

46. KETUA: ASWANTO

(Suara tidak terdengar jelas) kalau begitu. Baik. Saksinya dulu. Pertama ... ini saksi sesuai urutan, ya? Baik. Pertama, Bapak Gusti Juli. Mana Bapak Gusti Juli?

47. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Yang Mulia.

48. KETUA: ASWANTO

Pak Gusti Juli tinggal di mana, Pak Gusti?

49. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Tinggal di wilayah Banjarmasin Utara, Pak.

50. KETUA: ASWANTO

Waktu pilkada di Kota Banjarmasin, Bapak, sebagai apa?

51. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Saya sebagai koordinator Banjarmasin Baiman 2, Paslon Nomor Urut 02, Pak Ibnu Sina-Arifin Noor, wilayah Banjarmasin Utara, Pak.

52. KETUA: ASWANTO

Baik. Di catatan yang kami terima, Bapak menerangkan 2 hal. Pertama, soal politik uang yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 02. Betul, ya?

53. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Yang Mulia.

54. KETUA: ASWANTO

Bisa Bapak ceritakan?

55. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Yang Mulia.

56. KETUA: ASWANTO

Secara singkat saja, ya. Silakan, Pak.

57. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Bisa, Yang Mulia.

58. KETUA: ASWANTO

Silakan, Bapak, ceritakan.

59. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Bisa, Pak. Saya mohon izin sedikit, mohon izin menjelaskan apa yang saya alami secara nyata, Pak. Pertama, saya adalah pemilik handphone yang dijadikan sebagai alat bukti (sinyal terputus).

60. KETUA: ASWANTO

Suara Bapak tidak kedengaran, Pak.

61. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Dalam Grup Banjarmasin Baiman 2, grup kedua adalah grup koordinator Baiman 2, grup ketiga adalah Korlap Baiman 2.

Saya akan menjelaskan, saya tergabung di grup Banjarmasin Baiman 2, grup (sinyal terputus).

62. KETUA: ASWANTO

Suara Bapak tidak kedengaran, Pak. Tolong teknisi di sana, mungkin ada gangguan, Pak. Kami tidak mendengar suara dari Bapak.

Pak Gusti, Pak Gusti Juli, kami tidak bisa mendengar suara Bapak. Apa Bapak bisa mendengar suara dari ruang sidang sini? Putus ini. Putus, ya.

Pak Bambang, Pak Bambang sudah siap, Pak Bambang? Pak Bambang Eka Cahya? Pak Bambang, bisa dimonitoring, Pak Bambang? Putus juga?

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Izin, Majelis. Izin, Majelis. Rekan saya ada menunggu di luar, mau masuk ke ini sebagai pengganti rekan saya yang tadi enggak bisa masuk. Tadi kan ada rekan saya yang reaktif, ya.

64. KETUA: ASWANTO

Ini yang surat kuasa tambahan, ya?

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Bukan. Yang kuasa tambahan hadir secara daring, tapi yang ini, Majelis, kan ada tadi yang kuasa tambahan tadi sakit enggak bisa masuk, jadi ada rekan pengganti saya yang akan mendampingi saya di sini.

66. KETUA: ASWANTO

Positif, ya? Reaktif?

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Reaktif tadi. Ya.

68. KETUA: ASWANTO

Oke. Yang menunggu di luar (suara tidak terdengar jelas).

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Kuasa Hukum Pihak Terkait juga, salah satu Kuasa Hukum Pihak Terkait.

70. KETUA: ASWANTO

Dia bertanda tangan juga?

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Bertanda tangan, bertanda tangan.

72. KETUA: ASWANTO

Keterangan Pihak Terkait juga ditandatangani?

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Bertanda tangan. Boleh, ya?

74. KETUA: ASWANTO

Silakan dipanggil. Halo?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Halo, Pak Ketua.

76. KETUA: ASWANTO

Pak Gusti Juli sudah bisa mendengar kami?

77. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Siap, Yang Mulia, bisa.

78. KETUA: ASWANTO

Baik. Dilanjutkan tadi soal politik uang yang dilakukan ... yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02. Silakan, Pak. Putus lagi (...)

79. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

(Audio tidak terdengar dengan jelas) dibentuk oleh Paslon 02 (audio tidak terdengar dengan jelas).

80. KETUA: ASWANTO

Kami tidak bisa mendengar, tidak bisa menangkap apa yang Bapak (...)

81. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

(Audio tidak terdengar dengan jelas). Halo, Pak?

82. KETUA: ASWANTO

Kami tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang Bapak sampaikan. Ada teknisnya di situ mungkin ada gangguan?

83. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Mohon izin, Yang Mulia.

84. KETUA: ASWANTO

Pak Bambang bisa mendengar kami, Pak Bambang?

85. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Mohon izin, Yang Mulia.

86. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan, Pak. Apa yang ... ini suara Bapak terputus-putus, gitu. Silakan, Pak Gusti. Pak Bambang Eka (...)

87. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Saya lanjut, Yang Mulia. Dari (audio tidak terdengar dengan jelas) Banjarmasin mengkoordinator seluruh kecamatan yang ada di Banjarmasin.

88. KETUA: ASWANTO

Ya, terus.

89. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Dari ... disuruhnya mengumpulkan ke TPS sebanyak mungkin dan (audio tidak terdengar dengan jelas), Pak. Dimana setiap warga

mendapat Rp100.000,00 apabila memilih Pak Ibnu Sina-Arifin dan memenangkannya, Pak, dan untuk upah seorang koordinator Banjarmasin (audio tidak terdengar dengan jelas) di seluruh kecamatan yang ada di Banjarmasin, Pak. (Audio tidak terdengar dengan jelas) itu diupah Rp10.000,00, Pak, dan setiap warga yang mengumpulkan KTP itu mendapatkan kartu Baiman 2. Di dalam Baiman 2 tersebut adalah selama 5 tahun bahwa kartu tersebut bisa dapat bantuan sosial, bantuan kesehatan, bantuan pernikahan, pendidikan, dan segala macam, Pak, yang katanya itu melebihi dari BPJS, Pak.

90. KETUA: ASWANTO

Baik.

91. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Di dalam grup tersebut, Pak. Ya, Yang Mulia.

92. KETUA: ASWANTO

Dari mana Bapak tahu itu? Sebentar, Bapak dengar dulu. Dari mana Bapak tahu informasi itu?

93. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Informasi tersebut, saya dulu tim dari Pak Ibnu Sina, Pak. Bahwa saya memiliki kartu tersebut, Pak.

94. KETUA: ASWANTO

Bapak memiliki kartu itu juga?

95. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Dan bukti chat-chat di grup dan ... saya memiliki kartunya, Pak.

96. KETUA: ASWANTO

Bapak memiliki. Apa Bapak sudah pernah menerima (...)

97. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, saya menerima, Pak, kartunya, Pak.

98. KETUA: ASWANTO

Bapak sudah pernah menerima uang?

99. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Saya mohon izin (audio tidak terdengar dengan jelas) waktu itu saya mengadakan ... mengumpulkan warga di wilayah Sungai Gampa Banjarmasin Utara, Pak. Tiga warga, Pak, dimana di sana atas arahan Pak Ibnu Sina yang dimana itu yang datang adalah seorang ASN. Saya jelaskan sedikit, Pak. Dalam Grup Banjarmasin (audio tidak terdengar dengan jelas) itu banyak sekali yang (audio tidak terdengar dengan jelas), ada Paslon 02, Pak Ibnu Sina – Arifin, ada ASN, Pak Ahmad Baihaki, ada Ibu Masriah selaku (audio tidak terdengar dengan jelas) Ibnu Sina itu (audio tidak terdengar dengan jelas) ada panwas (audio tidak terdengar dengan jelas) di Kota Banjarmasin, ada koordinator (audio tidak terdengar dengan jelas) yang ada di Kecamatan Banjarmasin (audio tidak terdengar dengan jelas), ada KPPS, Pak, banyak lagi, Pak. Yang saya kenal dari panwas (...)

100. KETUA: ASWANTO

Baik. Pemohon ada di P berapa itu keterangannya?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ada bukti HP, Pak, yang kami serahkan di P-60. Ya, ini adalah punya Gusti sebagai Saksi.

102. KETUA: ASWANTO

Baik, tadi dia sudah sampaikan. HP yang dijadikan bukti itu adalah punyanya dia, gitu.

103. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya dan seluruh chating-nya kami jadi bukti juga, Pak, sudah ditranskrip.

104. KETUA: ASWANTO

Baik. Pak Gusti? Soal money politics, Bapak sudah jelaskan tadi walaupun kami agak apa (...)

105. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Yang Mulia.

106. KETUA: ASWANTO

Sekarang yang kedua, Bapak mau menjelaskan mengenai keterlibatan ASN?

107. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Keterlibatan ASN, Pak.

108. KETUA: ASWANTO

Ya, bagaimana ceritanya itu?

109. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Saya mau ditampilkan kartu ini tersebut, Pak.

110. KETUA: ASWANTO

Itu Bapak terima dari mana?

111. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ini adalah kartu (audio tidak terdengar dengan jelas), Pak.

112. KETUA: ASWANTO

Ya karena (...)

113. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Kartu tersebut saya terima dari penggerak (audio tidak terdengar dengan jelas) selaku Pemenangan Paslon 02, Pak yaitu seorang ASN itu (audio tidak terdengar dengan jelas) Pak Ahmad Bayhaki, selaku Ketua Yayasan Amanah by Ibnu Sina selaku Paslon 02 adalah Pak Ibnu Sina selaku Pembina Yayasan Amanah Baiman 2, Pak. (audio tidak terdengar jelas), Pak.

114. KETUA: ASWANTO

Ya, kami agak susah menangkap apa yang Saudara sampaikan, terputus-putus, Pak.

115. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Money politics, Pak, yang di wilayah Sungai Gampa. Itu terkumpul ada 83 ... saya ulangi, Pak, di wilayah Sungai Gampa itu, Pak, ada 83 warga yang terkumpul buat diarahkan memenangkan Pak Ibnu Sina-Arifin, yang di mana yang hadir di dalam pengarahan tersebut adalah seorang ASN, selaku penggerak Tim Paslon 02, yaitu Pak Ahmad Bayhaki dan Ibu Masriyah selaku istri dari Pak Ahmad Bayhaki, di dalam pertemuan tersebut, Pak.

116. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar.

117. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Warga dikumpulkan (...)

118. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Pak.

119. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

120. KETUA: ASWANTO

Pak Ahmad itu kerja di mana Pak? Itu kerja di mana Pak Ahmad itu?

121. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Kepala sekolah, Pak.

122. KETUA: ASWANTO

Ya? Halo?

123. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Beliau adalah kepala sekolah, Pak.

124. KETUA: ASWANTO

Kepala sekolah di mana?

125. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Halo, Pak. Kurang tahu, Pak, pokoknya SMP (...)

126. KETUA: ASWANTO

Dari mana? Dari mana Bapak tahu kalau yang bersangkutan adalah ASN? Bapak dengar, Pak?

127. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Halo, Pak. Saya dari ... keponakan dari (audio tidak terdengar jelas) beliau bercerita sama saya bahwa waktu itu Pak, waktu kegiatan kumpul warga di wilayah Sungai Gamba, Pak, ada 83 warga yang dikumpulkan, Pak, yang hadir itu, ya (...)

128. KETUA: ASWANTO

Baik, kita ... kita sudah tangkap tadi itu, ada 83 yang dikumpul, gitu dan yang memberikan pengarahan adalah ASN?

129. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

130. KETUA: ASWANTO

Dari mana Bapak tahu yang memberi penerangannya itu, memberi ... apa namanya ... mengarahkan itu adalah ASN?

131. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Pertama, Pak. Awalnya saya adalah Tim dari Pak Ibnu Sina-Arifin Paslon 02 untuk memenangkannya, Pak.

132. KETUA: ASWANTO

Baik.

133. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

134. KETUA: ASWANTO

Sudah kalau itu sudah tahu kita, kan tadinya Saudara di Tim Pemenangan 02, Tim Baiman itu?

135. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

136. KETUA: ASWANTO

Lalu Saudara keluar?

137. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

138. KETUA: ASWANTO

Kemudian bergabung ke Pemohon? Betul, ya?

139. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

140. KETUA: ASWANTO

Baik.

141. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Betul, Pak.

142. KETUA: ASWANTO

Ya, masih ada yang Saudara mau sampaikan?

143. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Masih banyak, Pak, yang saya mau sampaikan. Pertama, selain grup Banjarmasin Baiman 2, ada grup Korlap Baiman 2. Dimana grup Korlap Baiman 2 tersebut, saya diundang mendadak pada tanggal 4 Desember, kurang lebih pada pukul 09.00 WITA, Pak. Bahwa grup tersebut mengadakan pertemuan di Cafe One Resto Banjarmasin, Pak. Di seberang Rumah Sakit Sultan Suriansyah, di mana di situ ada Pak Ahmad Bayhakim, ada Ibu Masriyah, ada seluruh Koordinator Banjarmasin Baiman 2, semuanya, Pak ada.

144. KETUA: ASWANTO

Baik, apa yang (...)

145. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ada panwas yang saya kenal ... ya, Pak.

146. KETUA: ASWANTO

Apa yang dibicarakan di acara itu?

147. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Yang dibicarakan, Pak, pertama, Mohon izin, Pak. Ini lebih lancang saya bicara sama Bapak. Di pembicaraan tersebut bahwa Pak Ahmad Bayhaki dan Ibu Masriyah menyatakan kepada warga bahwa uang sejumlah Rp4 miliar yang dibagi untuk warga maupun koordinator Banjarmasin Baiman 2 seluruhnya, yang ada di Banjarmasin, siap dibagi, Pak. Yang sekitaran tanggal 5, 6, 7, atau H-2 setelah pemilu, Pak.

148. KETUA: ASWANTO

Baik. Bapak pernah (...)

149. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Sebelum atau H plus, Pak.

150. KETUA: ASWANTO

Bapak pernah melihat uang itu? Bapak pernah melihat uang yang Rp4 miliar itu?

151. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Apa, Pak?

152. KETUA: ASWANTO

Pernah melihat uang itu?

153. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Dari ... saya dari cap ... ya, ya, Pak.

154. KETUA: ASWANTO

Pak Gusti pernah lihat uang yang katanya mau dibagikan itu?

155. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Dari cap saya dengan Pak Ahmad Bayhaki selaku penggerak Baiman 2, Pak, beliau berkata sama saya bahwa uang Rp4 miliar buat warga maupun koordinator itu ada, Pak, Rp4 miliar. Bahwa uang itu di dalam cek giro. Beliau berkata sama saya, Pak bahwa uang itu bisa kita bagikan setelah pelantikan maupun sebelum pelantikan, Pak. Bahwa uang itu kita jaga-jaga supaya (...)

156. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah cukup, Pak (...)

157. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Tidak menunda kemenangan, Pak.

158. KETUA: ASWANTO

Baik, pertanyaan saya, Bapak pernah enggak melihat cek giro itu?

159. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Beliau bercerita sama saya, Pak, saya enggak pernah melihat, Pak. Pokoknya (...)

160. KETUA: ASWANTO

Bapak ... Bapak tidak pernah melihat.

161. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Beliau cerita sama saya, Pak.

162. KETUA: ASWANTO

Bapak tidak pernah melihat cek giro-nya? Cuma mendengar cerita saja bahwa ada uang Rp4 miliar yang akan dibagi? Ya, Pak, ya?

163. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Mau menceritakan. Ya, Pak. Mohon izin, Yang Mulia?

164. KETUA: ASWANTO

Apa lagi yang Saudara mau ceritakan?

165. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ad ... ada lagi, Pak. Dari wilayah Mantuil RT 11 bernama Pak Amran selaku koordinator Banjarmasin (ucapan tidak terdengar jelas) wilayah Mantuil. Beliau adalah sama ... beliau adalah tim pemenangan Pak Ibnu Sina mengumpulkan KTP dan mengadakan kegiatan-kegiatan melakukan pemenangan buat 02.

166. KETUA: ASWANTO

Baik.

167. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Di mana beliau be (...)

168. KETUA: ASWANTO

Ini yang diterangkan ada enggak di secara tertulisnya? Kalau di poin yang kami ... yang kami terima itu singkat saja. Yang dijelaskan tadi ada tidak di (...)

169. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Pak Ketua?

170. KETUA: ASWANTO

Ya.

171. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Untuk me-backup pernyataan itu kami Saksi-saksi yang lain yang tidak bisa dihadirkan (...)

172. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Tidak mau, Pak (...)

173. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Di depan Akta Notaris membuat itu sehingga kemudian nanti ada ... Pak Ketua bisa lihat.

174. KETUA: ASWANTO

Baik, baik.

175. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Selain yang tadi di chatting ... di hampir seluruh chatting yang ada di HP itu.

176. KETUA: ASWANTO

Baik. Ini karena ... terus terang, sama-sama kita mendengar dari sana dan putus-putus gitu susah kita ... apa namanya ... menangkap secara utuh apa yang disampaikan. Nanti ... Pak Gusti, cukup, ya?

177. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Satu lagi, Pak?

178. KETUA: ASWANTO

Apa lagi?

179. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Mohon maaf, Pak. Saya diundang oleh Pak Ahmad bad ... Ahmad Bayhaki mendatangi di Depot Seroya, Pak dekat pemkot Kota Banjarmasin, Pak.

180. KETUA: ASWANTO

Ya, apa yang Saudara lakukan?

181. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Di mana sa ... di mana saya bertemu dengan 5 orang tim pemenangan Paslon 02, Pak.

182. KETUA: ASWANTO

Ya.

183. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Di mana say ... di mana saya ... di mana warga saya diancam, Pak, apabila menagih uang kepada saya, maka warga saya akan ditangkap polisi, Pak.

184. KETUA: ASWANTO

Baik. Jadi, ada (...)

185. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Itu buktinya ada rekamannya, Pak saya, Pak.

186. KETUA: ASWANTO

Ada buktinya itu?

187. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ada buktinya di HP saya, Pak.

188. KETUA: ASWANTO

Bukti pengancaman ada di HP?

189. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ada, Pak ... ada, Pak.

190. KETUA: ASWANTO

Siapa yang mengancam?

191. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Oleh Pak Masan, Pak.

192. KETUA: ASWANTO

Siapa yang (...)

193. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Bapak Masan, Pak. Beliau mengaku sebagai ketua satgas, Pak.

194. KETUA: ASWANTO

Baik. Siapa namanya ketua satgas? Ntar, Pak (...)

195. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Masan, Pak Masan.

196. KETUA: ASWANTO

Baik.

197. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Beliau tinggal di Kelayan, Pak Kelayan B.

198. KETUA: ASWANTO

Baik. Saudara diancam oleh ketua satgas, ya?

199. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

200. KETUA: ASWANTO

Untuk pemenangan ... tim pemenangan 02.

201. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

202. KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup, ya? Sekarang Ibu ... Ibu Nor Ronasari.

203. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, Yang Mulia.

204. KETUA: ASWANTO

Ini Ibu mau menjelaskan mengenai kejadian di sejumlah TPS. TPS mana saja, Ibu?

205. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

TPS daerahnya itu adalah Kecamatan Banjarmasin Barat ta ... Kelurahan Belitung Selatan, itu ada 8 TPS yang saya temui ... yang saya temukan pengaduan masyarakat, Pak.

206. KETUA: ASWANTO

Ibu memberi suara di TPS berapa, Ibu?

207. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Saya memberikan suara di TPS 012 Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan itu tepatnya di Kelayan A, Pak.

208. KETUA: ASWANTO

Baik. Nah, di TPS yang akan Ibu jelaskan itu terjadi apa saja, Ibu?

209. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Pada saat ... itu adalah garis besar pertama yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia. Pertama, itu pengalaman pribadi saya di mana pada saat tanggal 9 Desember 2020 itu, saya bersama keluarga besar

saya secara beriringan ke TPS. Setelah sampai di TPS, saya, kedua orang tua saya, dan juga nenek kakek saya mengantre, tetapi giliran ... setelah giliran kakek dan nenek saya maju, beliau menyamperi meja panitia, beliau menunjukkan kartu undangan pemilih. Tetapi, sesampainya di meja, mereka lantas langsung keluar, Yang Mulia.

Saya yang melihat langsung kejadian tersebut bertanya "Kenapa kakek dan nenek saya tidak bisa memilih, padahal mereka berdua mempunyai kartu undangan untuk memilih pada hari itu?" lantas petugas KPPS-nya mengatakan dengan tegas bahwa nama mereka berdua telah digunakan oleh orang lain.

210. KETUA: ASWANTO

Baik. Ibu lihat daftar hadir orang-orang yang datang di TPS itu? Apa bet (...)

211. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Saya melihat, Yang Mulia.

212. KETUA: ASWANTO

Apa betul ada nama keluarga Ibu yang 2 orang itu di daftar hadir?

213. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Betul, ada, Yang Mulia.

214. KETUA: ASWANTO

Ada namanya?

215. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ada.

216. KETUA: ASWANTO

Ibu tidak tanya siapa yang menggunakan hak suaranya?

217. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Saya tidak bertanya, Yang Mulia. Mereka hanya menjelaskan bahwa nama kedua nenek dan kakek saya atas nama Mulia dan atas nama Bapak Setiani telah digunakan oleh orang lain.

218. KETUA: ASWANTO

Saya tanya Ibu karena petugas menyampaikan sudah digunakan oleh orang lain, Ibu pada waktu memilih itu, kan Ibu tanda tangan juga daftar hadir tidak?

219. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Tidak, Yang Mulia.

220. KETUA: ASWANTO

Tidak tanda tangan daftar hadir?

221. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Tidak.

222. KETUA: ASWANTO

Ada enggak daftar hadir disiapkan di TPS?

223. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Tidak ada, Yang Mulia. Mereka hanya menggunakan DPT untuk pertanda itu daftar hadir ... sebagai daftar hadir.

224. KETUA: ASWANTO

Ya. di DPT itu nama nenek dan kakek Ibu itu ada?

225. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ada, Yang Mulia.

226. KETUA: ASWANTO

Sudah dicontreng atau diapakan, sehingga petugas mengatakan sudah digunakan?

227. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ditandai titik, Yang Mulia, sebagai bahwa orang tersebut telah berhadir.

228. KETUA: ASWANTO

Ditandai bahwa setelah hadir dan telah menggunakan hak pilih?

229. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, Yang Mulia.

230. KETUA: ASWANTO

Baik. Apa lagi yang Ibu mau jelaskan?

231. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ini menurut pengalaman pribadi saya, saya telah sudah juga sampaikan tadi bahwa saya pada saat saya memilih juga tidak diminta untuk mengeluarkan kartu KTP terus juga tidak diminta juga untuk tanda tangan, sesampainya saya di bilik, bilik suara tersebut tidak ada akses privasinya, Yang Mulia. Di mana petugas KPPS tepat berada berdiri di belakang saya yang di mana seharusnya mereka berdiri di depan saya sedang mereka berdiri di belakang saya.

232. KETUA: ASWANTO

Baik, jelas ... jelas. Sudah ... sudah kalau itu sudah, kita sudah tangkap. Ibu tidak bebas menggunakan hak pilih karena diintip sama petugas?

233. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, Yang Mulia.

234. KETUA: ASWANTO

Apa lagi?

235. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Yang garis besar kedua, Yang Mulia. Saya sebagai tim teknis pengaduan dan mengklarifikasi dari Paslon 04, saya menerima banyak sekali pengaduan dari masyarakat (...)

236. KETUA: ASWANTO

Ndak itu, yang ... yang saya tanya yang Ibu saksikan sendiri, yang informasi itu nanti. Yang Ibu alami sendiri, yang Ibu lihat sendiri kalau yang informasi itu nanti. Yang Ibu anu ... apa ... alami sendiri dulu. Apa lagi yang Ibu alami di TPS?

237. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

DPTb, Yang Mulia.

238. KETUA: ASWANTO

Apa itu DPTb?

239. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Daftar pemilih tambahan yang tidak memenuhi syarat, Yang Mulia.

240. KETUA: ASWANTO

Apa syaratnya DPTb itu Ibu?

241. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Seharusnya mereka menunjukkan kartu KTP atau A-5, Yang Mulia.

242. KETUA: ASWANTO

A-5.

243. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Daftar pemilih ... pemilih pindahan, tapi mereka tidak menunjukkan tersebut.

244. KETUA: ASWANTO

Baik, ini di tempat Ibu memilih ada berapa DPTnya dan berapa DPTb? Tahu tidak?

245. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Saya kurang tahu, Yang Mulia.

246. KETUA: ASWANTO

Lho bagaimana caranya Ibu tahu kalau ada DPTb yang tidak berhak? Dari mana Ibu mendapat informasi bahwa ada yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pemilih tambahan tapi kemudian diberi kesempatan untuk memilih?

247. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Saya bertemu langsung, Yang Mulia dengan orang bersangkutan. Mereka baru pindahan tapi mereka bisa memilih padahal mereka enggak punya A-5 tersebut, Yang Mulia.

248. KETUA: ASWANTO

Baik, Ibu melihat daftarnya orang yang memilih sebagai DPTb?

249. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Tidak, Yang Mulia.

250. KETUA: ASWANTO

Tidak tahu. Jadi di TPS Ibu, Ibu tidak tahu berapa jumlah pemilih DPTb. Hanya ketemu orang yang menurut Ibu (...)

251. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, Yang Mulia (...)

252. KETUA: ASWANTO

Mestinya tidak bisa menjadi pemilih DPTb karena tidak ada Form C-5 nya?

253. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, Yang ... A-5, Yang Mulia.

254. KETUA: ASWANTO

A-5, ya sori ... A-5?

255. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, Yang Mulia.

256. KETUA: ASWANTO

Apa lagi yang Ibu mau sampaikan? Jangan yang menurut-menurut, yang Ibu saksikan sendiri apa?

257. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Cukup, Yang Mulia.

258. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya. Baik nanti Para Pihak juga bisa mengajukan pertanyaan. Kemudian Pak David. Pak David?

259. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya, Yang Mulia. Ya?

260. KETUA: ASWANTO

Di catatan kami, Pak David ini akan menyampaikan sejumlah pelanggaran pada waktu pemilihan serta money politics. Silakan Pak apa yang mau disampaikan!

261. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya, yang ... yang pertama, Yang Mulia saya, menyampaikan pengalaman di mana saya juga terlibat di dalamnya, yaitu bahwa pada saat rapat Pleno rekapitulasi KPU pada tanggal 15 Desember di Hotel Rapan Inn[sic!], Yang Mulia. Di rapat Pleno tersebut karena sebelumnya kami mendapatkan 2 bukti daftar hadir pemilih yang tidak sesuai dengan C-1 suaranya. Jadi daftar pemilihnya lebih sedikit dibandingkan dengan suara yang dicoblos. Nah, pada (...)

262. KETUA: ASWANTO

Baik, sebentar, Pak. Pada waktu rekapitulasi Bapak hadir tidak ditempat rekapitulasi?

263. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya hadir, Yang Mulia.

264. KETUA: ASWANTO

Bapak sebagai Saksi mandat?

265. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya, saya sebagai Saksi mandat. Pada awalnya saya sebagai saksi mandat.

266. KETUA: ASWANTO

Sebentar KPU, ini saksi mandat atau ndak?

267. TERMOHON: HERIWIJAYA

Izin, Yang Mulia (...)

268. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya pada awalnya adalah saksi mandat, namun ditengah perjalanan saya diganti, Pak Yang Mulia.

269. KETUA: ASWANTO

Bentar, sebentar, Pak (...)

270. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tapi saya sempat hadir di situ sampai dengan selesainya sidang pukul 22.00 WITA lebih.

271. KETUA: ASWANTO

Sebentar ... sebentar, Pak. Ini saksi mandat atau ndak?

272. TERMOHON: HERIWIJAYA

Izin, Yang Mulia.

273. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

274. TERMOHON: HERIWIJAYA

Di list daftar hadir itu tidak ada namanya David Santosa.

275. KETUA: ASWANTO

Bapak hadir pada waktu rekapitulasi?

276. TERMOHON: HERIWIJAYA

Ya, hadir.

277. KETUA: ASWANTO

Bapak melihat Bapak David?

278. TERMOHON: HERIWIJAYA

Ada melihat, memang ada tetapi dia bukan untuk saksi yang mandat itu.

279. KETUA: ASWANTO

Dia masuk di ruangan di tempat rekapitulasi itu?

280. TERMOHON: HERIWIJAYA

Ada masuk sebentar, setelah itu keluar.

281. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Pak David?

282. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya, Yang Mulia?

283. KETUA: ASWANTO

Apa lagi yang Bapak jelaskan?

284. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya ... Yang Mulia, mohon maaf, Yang Mulia.

285. KETUA: ASWANTO

Silakan!

286. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya hadir, saya menandatangani daftar hadir, saya duduk di situ beserta dengan saksi mandat yang atas nama Sarkawi, kemudian juga ada saksi atas nama Muhajir di situ. Kemudian ada juga utusan dari Partai PKS yang saya tidak ... saya lupa namanya, tapi saya duduk semeja di situ dan kemudian karena melihat kondisi akhirnya saya mundur tetapi saya duduk di samping pintu bersama dengan beberapa wartawan yang meliput pada hari itu, Yang Mulia.

287. KETUA: ASWANTO

Baik, apa yang Bapak saksikan? (...)

288. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Jadi saya (...)

289. KETUA: ASWANTO

Sebentar, apa yang Bapak saksikan pada waktu rekapitulasi itu?

290. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Siap, Yang Mulia. Yang saya saksikan pada saat itu adalah Saksi dari Paslon 04 memberikan protes karena saya ... saksi dan saya mendapatkan 2 bukti yaitu daftar hadir pemilih yang jumlah pemilihnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah suara yang ada di C-1 (...)

291. KETUA: ASWANTO

Di ... dari TPS mana itu Pak? (...)

292. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Nah pada saat diprotes (...)

293. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Pak. TPS mana itu Pak?

294. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

TPS 12 Teluk Tiram.

295. KETUA: ASWANTO

Pelan-pelan Pak. Sebentar Pak.

296. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Dan juga TPS 20 Sungai Jingah.

297. KETUA: ASWANTO

Pelan-pelan Pak, TPS mana saja Pak?

298. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

TPS 12 Teluk, Teluk Tiram.

299. KETUA: ASWANTO

Oke.

300. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Dengan daftar hadir 186. Surat suara yang digunakan 237 yang bercoblos (...)

301. KETUA: ASWANTO

Baik.

302. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Kemudian TPS 22 Sungai Jingah, daftar hadir pemilih=165. Surat suara yang digunakan 250. Ada selisih suara 95 untuk TPS 22, dan 51 untuk TPS 12 Teluk Tiram. Nah pada saat kami memprotes di sana, kami ... kami menginginkan supaya diadakan penelitian ulang atau pembukaan mencocokkan kembali.

303. KETUA: ASWANTO

Baik.

304. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tetapi kami di ... ditolak oleh Pihak KPU dan Bawaslu yang pada saat itu ada.

305. KETUA: ASWANTO

Baik.

306. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Nah perdebat ... maaf, Yang Mulia. Ada informasi yang penting, Yang Mulia, yang ingin saya sampaikan (...)

307. KETUA: ASWANTO

Apa itu?

308. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Nah karena ... ya karena terjadi perdebatan, akhirnya pleno di-break untuk salat maghrib dan istirahat. Pada saat sesi pertama itu sudah dicocokkan perkecamatan, baik itu gubernur maupun wali kota suara-suaranya per kecamatan. Nah pada saat setelah break masuk ternyata karena ada perdebatan dari Saksi 04 dengan Pihak KPU dan Bawaslu dimana Saksi 04 meminta untuk dibuka, Bawaslu tidak menghendaki atau KPU tidak menghendaki akhirnya setelah break itu lah atas inisiatif dari Pihak KPU Kecamatan Banjarmasin Tengah dan satu lagi kecamatan yang mana saya lupa, tapi itu ada di surat keberatan yang dilampirkan di ... di bukti Mahkamah, Yang Mulia (...)

309. KETUA: ASWANTO

Apa yang (...)

310. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Kecamatan Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah memberikan catatan suara, jumlah suara, tetapi berbeda dengan yang di sesi pertama. Sehingga di situ akhirnya timbul perdebatan lagi karena saksi kami mendebat kalau antara sesi pertama dan sesi dua dalam satu

waktu hanya jeda 1 jam suaranya berbeda, bagaimana pertanggungjawabannya? Sedangkan kami tadi sudah menyatakan ingin ingin meminta supaya dicocokkan. Surat suara yang ka ... daftar hadir pemilih yang kami bawa ini dengan perbedaan suara, tetapi tidak dikehendaki atau tidak diizinkan (...)

311. KETUA: ASWANTO

Baik, baik Pak. Sudah ditanggap. Sudah ditanggap, Pak. Nah Bapak tahu berapa (...)

312. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

313. KETUA: ASWANTO

Jumlah suara di kecamatan itu sebelum break? Berapa jumlah suara sebelum istirahat?

314. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Waduh saya enggak mencatat, Yang Mulia.

315. KETUA: ASWANTO

Enggak tahu. Bagaimana caranya (...)

316. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

317. KETUA: ASWANTO

Bapak mengetahui bahwa ada perbedaan suara?

318. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya ada di situ Yang Mulia (...)

319. KETUA: ASWANTO

Ya.

320. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya duduk persis di samping mejanya Banjarmasin, kecamatan tengah Banjarmasin (...)

321. KETUA: ASWANTO

Baik.

322. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Yang ada di samping pintu. Dan yang satu lagi ada di sebelah kanan saya, saya duduk di bawah karena di tengah-tengahnya itu ada pintu masuk (...)

323. KETUA: ASWANTO

Baik, baik. Baik. Perubahannya itu terjadi pada semua Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang bertambah atau berkurang?

324. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Waktu itu total suaranya, Yang Mulia.

325. KETUA: ASWANTO

Berapa total suaranya?

326. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Wah.

327. KETUA: ASWANTO

Tadi katanya lupa.

328. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya enggak mencatat (...)

329. KETUA: ASWANTO

Baik.

330. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya enggak mencatat, saya lupa, Yang Mulia. Saya hanya memperhatikan (...)

331. KETUA: ASWANTO

Baik, baik Pak. Sebentar, sebentar Pak.

332. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Dan pada saat itu juga saya memberikan ... memberikan sebuah WA kepada saksi, saksi kami dari (...)

333. KETUA: ASWANTO

Baik-baik. Bentar, Pak. Bapak dengan saya dulu, Pak (...)

334. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Perbedaan ini lurus (...)

335. KETUA: ASWANTO

Bapak dengar saya dulu.

336. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

337. KETUA: ASWANTO

Yang Bapak ketahui perubahan perolehan suara itu bertambah atau berkurang? Kalau tidak tahu jumlahnya tidak apa-apa. Tapi bertambah atau berkurang?

338. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Bertambah, Yang Mulia.

339. KETUA: ASWANTO

Bertambah. Untuk siapa (...)

340. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Bertambah.

341. KETUA: ASWANTO

Dan Calon berapa bertambah?

342. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Itu total di kecamatannya, Yang Mulia.

343. KETUA: ASWANTO

Ya kan total kecamatan itu sudah ada, misalnya Pasangan Calon 01, 02, 03 yang bertambah itu pasangan calon nomor berapa, Bapak?

344. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Itu dari keempat-empatnya itu ada perbedaan semua, sehingga pada saat itulah terjadi keributan di situ ... bukan keributan, dalam arti ribut itu enggak, cuma akhirnya saksi kami terus protes karena ini saja hanya 1 jam sudah berbeda. Kemudian bagaimana dengan yang kami sampaikan tadi. Itu, Yang Mulia.

345. KETUA: ASWANTO

Baik, baik. Kita tangkap bahwa ada perbedaan sebelum sesi istirahat dan sesudah masuk lagi.

346. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

347. KETUA: ASWANTO

Cuma Bapak tidak tahu berapa penambahan atau pengurangan?

348. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tidak tahu, Yang Mulia. Tapi itu ada di berita (...)

349. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Bapak jawab saja (...)

350. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Di bukti yang disertakan, Yang Mulia.

351. KETUA: ASWANTO

Bapak jawab yang saya tanya saja, Pak.

352. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

353. KETUA: ASWANTO

Bapak tidak tahu pasangan nomor berapa yang bertambah?

354. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tidak tahu.

355. KETUA: ASWANTO

Tidak tahu. Bapak tidak tahu juga ada pasangan yang berkurang?
Tidak tahu juga?

356. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tidak tahu, Yang Mulia.

357. KETUA: ASWANTO

Baik.

358. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tidak tahu, tidak tahu.

359. KETUA: ASWANTO

Apa lagi yang Bapak mau sampaikan?

360. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Nah. Karena setelah itu ... setelah itu akhirnya diputuskan oleh saksi 04 tidak menandatangani Berita Acara. Nah, setelah dari situ, Yang

Mulia, kami terus berikutnya mengumpulkan daftar hadir pemilih, daftar hadir pemilih di tiap-tiap TPS dan kami dapatkan 140 daftar hadir pemilih yang suara ... di antara 140 itu 127-nya daftar hadir pemilih dengan C-1 berbeda, Yang Mulia.

361. KETUA: ASWANTO

Baik.

362. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Jadi daftar hadir pemilihnya berbeda (...)

363. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Mohon izin, Yang Mulia. Sudah kami masukkan dalam P-16 dan P-16.1 terkait perbedaan antara daftar hadir pemilih dengan C-1.

364. KETUA: ASWANTO

Baik. P-61?

365. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

16.1 dan P-16.

366. KETUA: ASWANTO

Baik. P-16 dan 16.1?

367. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Ya.

368. KETUA: ASWANTO

Baik. Apa lagi yang Bapak mau jelaskan?

369. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Dan di dalam daftar hadir pemilih yang kami periksa itu, Yang Mulia, itu (...)

370. KETUA: ASWANTO

Kalau daftar hadir, Pak. Kalau daftar hadir sudah kita tangkap, bahkan saya sudah konfirmasi ke kuasa hukum di bukti berapa itu. Yang lain lagi kalau masih ada.

371. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Yang lain lagi, saya boleh menyampaikan soal dalam ... karena perjalanan selama saya ada di sini, Yang Mulia, kan saya mengikuti perjalanan pilkada ini dalam gugatan ini, akhirnya kami mendapatkan bukti dari handphone dari Gusti Juli itu, Yang Mulia.

372. KETUA: ASWANTO

Sudah tadi.

373. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Dalam handphone itu (...)

374. KETUA: ASWANTO

Kalau handphone itu sudah. Sudah, Pak. Kalau handphone sudah tadi, yang punya itu Pak Gusti Juli sudah. Nggak perlu dijelaskan lagi itu. Tadi Pak Gusti Juli sudah menyampaikan bahkan dia pemilik handphone.

375. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

376. KETUA: ASWANTO

Cukup?

377. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ada lagi, Yang Mulia.

378. KETUA: ASWANTO

Apa lagi?

379. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ada lagi, Yang Mulia.

380. KETUA: ASWANTO

Apa lagi?

381. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ada satu koordinator juga yang seperti Gusti Juli bernama Dai Robby dan beliau ada di bawah Lurah Kuin Cerucuk. Dai Robby ini (...)

382. KETUA: ASWANTO

Itu koordinator (...)

383. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Dalam pengumpulan KTP dan dia mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 dari Lurah Kuin Cerucuk.

384. KETUA: ASWANTO

Baik.

385. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Itu bukti video rekaman (...)

386. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar, saya sudah tangkap yang Bapak maksud. Saya ingin tahu, koordinator untuk pasangan nomor berapa itu, Bapak?

387. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Paslon Nomor Urut 02.

388. KETUA: ASWANTO

Paslon 02 (...)

389. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Di bawah Lurah Kuin Cerucuk.

390. KETUA: ASWANTO

Baik. Sama dengan statusnya Gusti Juli?

391. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya, betul. Tetapi tidak masuk di dalam SK pemenangan yang dilaporkan ke KPU, Yang Mulia.

392. KETUA: ASWANTO

Baik. Pemohon, ada buktinya itu?

393. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Ada, Yang Mulia.

394. KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup, Pak, ya?

395. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Masih ada lagi, Yang Mulia. boleh saya tambah?

396. KETUA: ASWANTO

Apa lagi?

397. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Nah, pada tanggal 15 Juli, Yang Mulia, itu Ibnu Sina dalam hal ini adalah Paslon Nomor Urut 02, pada saat 15 Juli itu melakukan perpanjangan dari ketua RT yang harusnya habis pada bulan Oktober, tetapi oleh yang bersangkutan diperpanjang hingga Maret 2021. Nah, pada tanggal 17 September, 6 hari sebelum penetapan paslon yang di mana masuk dalam kategori 6 bulan itu, Yang Mulia, pada tanggal 17 September Paslon mengumpulkan satgas kebersihan dan RT. Di situ Paslon 02, yaitu Ibnu Sina ada videonya, Yang Mulia dan sudah kami lampirkan, di situ berjanji akan menaikkan honor dari satgas kebersihan

dan ketua RT, dimana ketua RT di Banjarmasin itu tercatat sebesar ... sebanyak 1.800 RT, Yang Mulia.

398. KETUA: ASWANTO

Baik. Apakah ... sebentar, Pak. Apakah semua RT itu diperpanjang?

399. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tidak semua RT diperpanjang, tetapi surat edaran itu menyatakan bahwa RT diperpanjang hingga bulan Maret 2021 dan surat edaran itu juga dilampirkan di bukti, Yang Mulia.

400. KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup, cukup, Pak. Sudah ditangkap. Cukup, Pak, ya?

401. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ada lagi, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

402. KETUA: ASWANTO

Apa lagi?

403. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Kemarin ... kemarin, Yang Mulia, saya didatangi satgas kebersihan, ada tiga orang satgas kebersihan yang menyampaikan informasi kepada saya bahwa mereka bertiga diberhentikan sebagai satgas kebersihan dari wilayah kelurahan (...)

404. KETUA: ASWANTO

Baik, sebentar, Pak. Pemohon ada buktinya itu?

405. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ada, Yang Mulia.

406. KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup, Pak ya?

407. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ada lagi, Yang Mulia.

408. KETUA: ASWANTO

Cukup, Pak, cukup. Nanti lagi, Bapak masih ditanya lagi nanti.

409. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Oh, masih banyak Yang Mulia, mohon maaf. Kalau boleh disampaikan masih banyak sekali, Yang Mulia.

410. KETUA: ASWANTO

Sebentar, nanti saja Pak lagi. Kalau Bapak sampaikan satu bulan juga enggak selesai.

411. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Enggak, Yang Mulia. Paling 10 menit, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

412. KETUA: ASWANTO

10 menit (...)

413. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya, Yang Mulia. Mohon diizinkan.

414. KETUA: ASWANTO

Cukup untuk Bapak, ya, sebentar. Kita langsung alami dulu, dari Pemohon ada yang mau dialami? Tapi mohon tidak perlu diulang dan ditegaskan karena semua sudah terekam.

415. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak Ketua. Tadi ... saya hanya ingin menanya yang apa ... karena komunikasinya jelek, mengkonfirmasi saja.

Tadi ... mulai dari Gusti, ya. Saya mau cek saja, di dalam HP itu kan ada nama-nama ASN, nama petahana 02, dan nama pengawas pemilu, dan penyelenggara pemilu. Saya sebut saja, apakah betul nama-

nama itu ada di dalam HP itu, ya. Ibnu Sina sendiri masuk di dalam group?

416. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Betul, betul.

417. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Masuk dalam group, ya. Group itu namanya apa? Tadi Baiman 2, ya, betul ya?

418. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Group Banjarmasin Baiman 2, Pak. Beliau sebagai admin group, Pak.

419. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, apakah wakil bupati Arifin Noor juga masuk di dalam group itu?

420. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, masuk, Pak.

421. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Masuk, oke, cukup. Ahmad Bayhaki yang ternyata kepala sekolah SDN Pemurus Luar 1 juga masuk di situ? Ahmad Bayhaki.

422. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

(audio tidak terdengar jelas).

423. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Agak dijauhkan ininya biar enggak terlalu dekat, miknya, micing, miknya harus dijauhkan. Apakah ada yang namanya salah satu kabag kesra? Kepala bagian kesra dari kabupaten ... dari Kota Banjarmasin, yaitu Bapak Isa Anshari? Kabag Kesra di Kota Banjarmasin itu masuk juga di dalam group?

424. KETUA: ASWANTO

Pak Gusti dengan suara dari Kuasa Hukum Pemohon?

425. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

(audio tidak terdengar jelas).

426. KETUA: ASWANTO

Ini ada gangguan.

427. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Pak, bisa itu Pak ya, pakai HP gitu biar. Pak Gusti?

428. KETUA: ASWANTO

Pak Gusti?

429. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, mendengar, Pak.

430. KETUA: ASWANTO

Mendengar? Dijawab pertanyaan dari Pengacara, dari Kuasa Hukum.

431. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Masuk, Pak, masuk Pak.

432. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Jadi Pak Isa Anshari Kabag Kesra masuk juga, ya. Apakah isteri Beliau Ibu Evianti ... tunggu dulu jangan "ya" dulu, saya belum tanya, belum selesai. Ibu Evianti itu isteri dari Pak Isa Anshari juga masuk di situ karena dia bendahara tim kampanye, betul?

433. KETUA: ASWANTO

Ini ada gangguan. Pak Gusti?

434. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Kurang tahu itu, Pak.

435. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ibu Evianti, Ibu Evianti, apakah masuk juga di dalam group?

436. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

(audio tidak terdengar jelas).

437. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Jawabannya ya atau tidak saja biar ini. Ibu Evianti masuk, ya atau tidak?

438. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Masuk, Pak.

439. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Masuk, ya. Ajudannya pak walikota Alhafi itu masuk tidak dalam group itu?

440. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

441. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Masuk. Saipuddin Zuhri kepala sekolah SMPN 18, masuk tidak dalam group itu?

442. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, masuk, Pak.

443. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Saya sebut beberapa lagi saja, ya, tidak mungkin disebut semuanya. Pak Zulkifli panwas pemilu, masuk tidak di dalam group itu?

444. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk, Pak.

445. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Pak Mawardi? Salah satu penyelenggara pemilu. Anda tahu Pak Mawardi itu dia ... di mana dia? KPPS, atau PPS, atau PPK itu masuk enggak? Itu penyelenggara pemilu.

446. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, beliau masuk, Pak. Beliau mengirimkan sebuah ID card bahwa beliau adalah panwas (audio tidak terdengar jelas).

447. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ada ID card-nya, oke. Itu satu selesai, ya. Jadi di dalam ... ya, cukup. Jadi di dalam group Anda itu masuk seperti itu. Sekarang pertanyaan kedua yang tadi belum ditanyakan, apakah group seperti ini dibuat banyak sekali di seluruh Kota Banjarmasin selain group yang Saudara Gusti ikut? Group seperti ini ... ini kan baru di kelompoknya Gusti saja, kelompok Gusti tadi di Banjarmasin mana ini?

448. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Yang saya tahu, Pak, ada yang masuk, Pak, tapi enggak tahu namanya siapa. KPPS, Pak.

449. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke. Itu yang namanya Mawardi, ya. Grup Gusti ini, Anda sebagai koordinator ada di Banjarmasin mana, Gusti? Apakah itu grup se-Banjarmasin? Atau grup dari salah satu kecamatan di Banjarmasin?

450. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Banyak, Pak, dari seluruh kecamatan, Pak.

451. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke, jadi grup itu ada di seluruh Kecamatan Banjarmasin. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi, ya.

452. KETUA: ASWANTO

Ingat waktunya, Pak.

453. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Saya sebagai Koordinator Banjarmasin Utara, Pak.

454. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke, sekarang saya lanjutkan, ya. Uang yang dijanjikan (...)

455. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Grup itu banyak lagi, Pak, saya bergabung cuma tiga grup, grup tersebut banyak.

456. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke, cukup ya, soal uangnya, soal grup ya. Sekarang saya tanya, uang yang dijanjikan tadi, apakah hanya dijanjikan atau sudah diberikan sebagian, Pak? Ada yang sudah diberikan, ada yang dijanjikan? Tadi ada kata-kata itu, Rp4 miliar. Itu siapa yang bicara soal Rp4 miliar, uang itu ada Rp4 miliar, itu siapa yang bicara itu?

Oh, oke, kalau begitu tadi, Ahmad Bayhaki memberikan uang. Oke, sekarang saya masuk di isu yang lainnya, ya. Di dalam percakapan tadi, juga ada informasi, ada informasi mengenai Lurah Kuin Cerucuk. Halo?

457. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak, tersambung, Pak, tersambung, Pak.

458. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, ada soal Lurah Kuin Cerucuk.

459. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

460. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Apa sesungguhnya yang dilakukan oleh lurah ini?

461. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Dari lurah, Pak, menyuruh kepada seperti saya koordinator Banjarmasin Baiman 2 di wilayah Alalak, Pak. Di mana lurah tersebut menyuruh kepada koordinator mengumpulkan KTP sebanyak-banyaknya, Pak, dan dijadikannya sebuah Kartu Baiman 2, Pak dan digantikan uang Rp100.000,00 per warga dan koordinator Rp10.000,00 per KTP, Pak.

462. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Jadi, ada uang Rp100.000,00 untuk pemilihnya, yang setiap koordinator dapat 10. Sepengetahuan Saudara, untuk Saudara sendiri itu dapat berapa ratus KTP?

463. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Dari saya Pak, kurang lebih 275 KTP, Pak. Yang mana saya mencari KTP tersebut di seluruh Banjarmasin Utara, yang pertama berkeliling, Pak. Di seluruh kecamatan, Pak. Berkeliling-keliling saya, Pak.

464. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, tadi dijelaskan ada yang disebut dengan Kartu Baiman, betul ya? Ada Kartu Baiman, dan tadi disebutkan bahwa Kartu Baiman itu diberikan kepada seluruh orang yang KTP-nya diberikan. Nah, tadi disebutkan ada jumlah yang cukup banyak dari Kartu Baiman itu dan sudah ada di dalam Handphone Saudara, ada cukup banyak itu, ada belasan ribu, ya. Itu apakah Anda bisa sebutkan, informasi seperti itu bagaimana penjelasannya?

465. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Untuk Kartu Baiman 2 ini, Pak, target dari Pak Ahmad Bayhaki selaku Tim Pemenangan Paslon 02, Pak bahwa beliau menargetkan setiap kecamatan itu tercetak 5.000 Kartu Baiman 2 dari 5 kecamatan. Yaitu 25.000 Kartu Baiman 2 dan rencananya, Pak, itu kartu akan ditambah menjadi 20.000, yaitu totalnya 45.000 kartu, Pak.

466. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke, supaya tidak insinuatif dan mengada-ada, itu informasi itu Anda dapat dari mana?

467. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Saya informasi dapat dari Ahmad Bayhaki, Pak. Selaku penggerak Paslon 02.

468. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Dia menceritakan kepada Saudara dengan cara lisan atau ada chatting-nya?

469. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Chatting ada, Pak, secara lisan juga ada, Pak.

470. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Chatting ada, lisan juga ada.

471. KETUA: ASWANTO

Chattingnya ada di Hp itu?

472. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Mestinya di semua cek, Hp-nya kami kasih Pak Ketua dan seluruh transkripnya juga kami berikan kepada Majelis.

473. KETUA: ASWANTO

Oh, jadi langsung ke bukti itu saja, ya?

474. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, ya, jadi saya tidak mengkonfirmasi lebih lanjut hanya poin-poin pentingnya saja. Oke, ada dua pertanyaan terakhir saya, ya untuk Pak Gusti ya.

475. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

476. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Pak Gusti tadi selain tadi ada Baiman, itu di Kartu Baiman ... Kartu Baiman itu sebenarnya disebutkan, kan semua calon juga bikin kartu kan?

477. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

478. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Semua calon juga bikin kartu. Terus ada Kartu Baiman ini, ini Kartu Baiman ini adalah untuk kartu sosialisasi atau kartu untuk menjanjikan? Yang di situ apa sih isinya itu? Kan pertama ada yang tanda tangan di situ kan Kartu Baiman itu? Yang tanda tangan siapa di situ?

479. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Yang tanda tangan di sini, Pak, sebagai Ketua Yayasan adalah Ahmad Bayhaki, Pak dan Pembina Yayasan Amanah Baiman, yaitu Paslon 02 yaitu bernama Pak Ibnu Sina, Pak.

480. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke, apakah Pak Ibnu Sina pernah berkata-kata juga soal kartu ini?

481. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ada, Pak. Waktu ketemu (...)

482. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Apa yang dia kemukakan?

483. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Waktu ketemuan di pertemuan kab ... rumah makan resto, Pak. Itu dikumpulkannya berjumlah kurang lebih 100 koordinator, Pak Banjarmasin Baiman 2, Pak di seluruh Kecamatan Banjarmasin, Pak. Sekaligus panwas tim banyak tim lagi, Pak.

484. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke.

485. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ada satu lagi, Pak. Bahwa dalam pertemuan di resto Banjarmasin di situ melibatkan seorang TNI, Pak. Menjaga-jaga tempat, Pak.

486. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Maksudnya apa ada aparat TNI?

487. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ada parat ... ada aparat TNI, Pak. Saya ada fotonya, Pak.

488. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke. Mak ... maksudnya TNI itu dia ada di dalam ruangan atau dia menjaga resto di mana ada pertemuan itu? Dia ada ... aparat ini ada di dalam atau dia menjaga (...)

489. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Dia menjaga, Pak.

490. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Bagaimana, Gusti?

491. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Menjaga saja, Pak. di Luar, Pak ... luar ruangan.

492. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Menjaga-jaga di luar. Oke. Pertanyaan terakhir soal kartu, ya soal kartu. Di situ dituliskan apa saja di kartu itu?

493. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Dalam kartu, Pak. Berisikan bagian dari anggota Banjarmasin Baiman 2 yang bernaung di bawah Yayasan Amanah Baiman Kota Banjarmasin, sehingga berhak mendapatkan pengobatan gratis di dokter

pribadi pada tempat praktik yang telah ditentukan, serta mendapatkan bantuan dan santunan lainnya sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Tertulis ada nomor HP, Pak.

494. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Nomor HP siapa itu?

495. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Dari tim ... dari Pak Ahmad Bayhaki, Pak. Bahwa nomor ini ... ada, Pak nomor, Pak di kartu, Pak.

496. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke. Dari saya cukup, ya.

497. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Satu pertanyaan untuk Pak Gusti. Apakah benar di dalam grup Baiman 2, Ahmad Bayhaki pernah melaporkan kepada grup, dalamnya juga ada Pak Ibnu Sina, itu mengenai 61.000 kartu Baiman 2 dan satgas relawan yang sudah dipengaruhi? Ada tabel (...)

498. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Tapi, Pak kalau ... ada, Pak. Itu waktu pada tanggal 1 Desember, Pak. Jam (...)

499. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Oke, ya.

500. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya sudah ditanggap itu 1 Desember ada.

501. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Oke. Baik, Yang Mulia kebet ... kebetulan tabelnya kami insert di dalam gugatan kami, Yang Mulia.

502. KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup, ya dari Pemohon, ya. Masih ada lagi?

503. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Untuk Saksi, Yang Mulia. Saya mau lanjutkan ke ... ini bisa, Yang Mulia ke Rosa ... ke ros ... Rosa, ya namanya? Nor Ronasari.

504. KETUA: ASWANTO

Baik. Maksimal 5 menit satu Saksi, ya.

505. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, ya, baik. Saya lanjutkan ke Sari, ya. Sari, tugasmu salah satunya adalah mengklarifikasi pengaduan-pengaduan. Ada informasi yang tadi disebutkan ada DPT yang berbeda dengan apa namanya ... orang yang hadir dengan pemilih yang muncul apa namanya ... menyoblos gitu, ya ... itu di dalam catatanmu itu ada berapa banyak yang seperti itu ... kejadian seperti itu? Atau contoh seperti itu. Dan apakah Saudara melakukan klarifikasi kepada orang-orang itu? Pertanyaannya paham?

506. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Maaf, Pak bisa diulang suaranya kurang jelas.

507. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya. Ada DPT, ada surat undangan ... C. Undangan, ada daftar hadir, dan ada surat suara, ya yang dicoblos itu.

508. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya.

509. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Tadi, kan ada contoh, kan disebutkan salah satunya kakek Anda. Kakek Anda ternyata surat suaranya sudah dipakai orang lain. Terus lagi tadi yang kedua tadi ada contoh, orang yang bukan berasal dari wilayah pemilihan baik itu di ... bukan ... karena bukan penduduk Kota Banjarmasin, tapi juga bisa me ... bisa mencoblos, tadi Anda sebutkan itu. Bis ... bisa memilih walikota, ya itu tadi disebutkan. Nah, sekarang informasi atau fakta seperti itu yang Anda klarifikasi itu ada di berapa banyak kelurahan, kecamatan, atau TPS? Silakan.

510. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ada sekitar 3 ke ... 3 kecamatan, Pak.

511. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTOSAKSI DARI

Kecamatan mana saja?

512. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Di antaranya Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat, dan juga Banjarmasin Selatan.

513. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Apa ini nya ... apa ... masalahnya apa di situ?

514. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Dari masalah tersebut itu banyak banget pelanggaran prosedur pencoblosan yang terjadi di setiap TPS-nya, Pak.

515. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Apa itu pelanggarannya yang setelah Anda klarifikasi?

516. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Untuk Kecamatan di Banjarmasin Selatan sendiri ada warga yang tidak memiliki hak mencoblos tetapi bisa mencoblos di kecamatan tersebut, Pak.

517. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Bisa kasih ke saya 2 contoh TPS-nya dari sekian banyak itu. Punya enggak catatannya?

518. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

TPS ... untuk Kecamatan Banjarmasin Barat sendiri ada TPS ... ada sejumlah 24 TPS, Pak.

519. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke. Kenapa dengan 24 TPS itu? Ada apa dengan 24 TPS itu?

520. PEMOHON: NOR RONASARI

Banyak sekali daftar hadir yang tidak sesuai dengan surat suara yang digunakan, Pak.

521. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke. Saya punya catatan tolong di ... di Pekapuran Laut, tidak ada daftar hadir C-1 yang digunakan 281. Jawab ya dan tidak saja, ya. Di ... saya punya catatan ini.

522. PEMOHON: NOR RONASARI

Ya.

523. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Di Pekapuran Laut, ya, di TPS 12 tidak ada daftar hadir, ada C-1 yang digunakan= 81, ada catatannya di situ?

524. PEMOHON: NOR RONASARI

Ada yang ... ada, Pak.

525. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, oke. Ya dan tidak saja.
Di Gadang, TPS 05 dan TPS 11 tidak ada daftar hadir? Di kedua TPS itu, jumlahnya itu yang TPS 05=181 dan di TPS 11=116? Ini lho catatan saya, cocok enggak dengan catatan kamu? Ada di situ juga?

526. PEMOHON: NOR RONASARI

Cocok, Pak.

527. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Di Kelurahan Melayu, ini Banjarmasin Tengah, ya. TPS 06 tidak ada daftar hadir, tapi ada C-1 yang digunakan 139?

528. PEMOHON: NOR RONASARI

Ya.

529. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Betul? Di Kertak Baru Iilir? Di Kelurahan Kertak Baru Iilir di Banjarmasin Tengah ada 199 C-1 yang digunakan, tapi tidak ada daftar hadir, betul?

530. PEMOHON: NOR RONASARI

Betul.

531. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Dan dalam catatan saya itu ada sekitar 200-an ... 250-an lebih, itu ternyata tidak ada daftar hadirnya, sehingga kemudian kita pernah meminta, ya, ini nanti pertanyaan ke Pak David, kita pernah meminta supaya daftar hadir itu dicocokkan antara DPT dengan ... C-1 dan DPT, itu seperti itu Sari? Betul?

532. PEMOHON: NOR RONASARI

Ya.

533. KETUA: ASWANTO

Itu di P ... P berapa itu, Pak?

534. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Yang Mulia, kami sudah sebutkan, P-16.1. P-16, Yang Mulia.

535. KETUA: ASWANTO

Oh, yang tadi, jadi tidak perlu sampaikan semua.

536. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, makanya saya cukupkan.

537. KETUA: ASWANTO

Contoh-contohnya saja.

538. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Baik.

539. KETUA: ASWANTO

Silakan.

540. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Rekan saya yang me ... khusus untuk Pak David lagi, Pak Ketua.

541. KETUA: ASWANTO

Pak David, silakan.

542. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Pak Heri? Untuk Pak David.

543. KETUA: ASWANTO

Bapak punya waktu maksimal 5 menit, ya.

544. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Halo, Pak David? Kepada Saudara Saksi?

545. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

546. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Apakah Pak David mengetahui pelaporan di Bawaslu Kota Banjarmasin?

547. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Mengetahui.

548. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Mengetahui? Oke. Berapa laporan Pak David waktu itu yang Pak David ketahui?

549. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

2 laporan, yaitu Nomor 004 dan Nomor 005.

550. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Baik.

551. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Nomornya ... nomor.

552. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Pertanyaan saya, apakah di kajian Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 005, Bawaslu Kota Banjarmasin menyatakan terbukti seluruh unsur, namun kesimpulannya tidak terpenuhi syarat formil, benar atau tidak, Pak David?

553. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Benar.

554. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Itu Pak David sudah langsung kajiannya, ya?

555. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya baca sendiri kajiannya dan ada di halaman 33 dikatakan bahwa Paslon Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3). Tetapi di ha (...)

556. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Pak. Laporan nomor berapa itu?

557. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Izin, Yang Mulia, di Laporan Nomor 005 di bukti kami P-59.

558. KETUA: ASWANTO

Laporan Nomor 005.

559. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Laporan Nomor 005, bukti kami P-59 dan Laporan Nomor 004 di P-58.

560. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan dilanjutkan.

561. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Jadi di situ terbukti, ya, Pak ... Saudara Saksi?

562. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Terbukti.

563. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Terbukti? Oke. Pada saat ... yang terbukti itu atas laporan ... pelanggaran apa saja Pak David ... Saudara Saksi, seingat Saudara Saksi?

564. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Soal PDAM, kemudian pembuatan Masker Banjarmasin Baiman, dan Banjarmasin Pasti Bisa.

565. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Selain itu?

566. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Dan soal janji satgas ... janji honor kepada satgas dan RT ... menaikkan honor satgas dan RT.

567. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Ada lagi, Pak David?

568. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Itu yang saya ingat. Itu ada di halaman 33 kajian dari Bawaslu kota.

569. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Oke.

570. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar, Pak. Ini langsung kita konfirmasi saja ke Bawaslu.

Bawaslu yang Laporan Nomor 005, itu apa betul terbukti? Ya? Hasilnya apa, Pak, Laporan Nomor 005 itu?

571. BAWASLU: MASTAWAN

Laporan Nomor 005 itu dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, Yang Mulia, dan juga dugaan pelanggaran pidana pemilu, Yang Mulia.

572. KETUA: ASWANTO

Jadi tidak terbukti?

573. BAWASLU: MASTAWAN

Ya, Yang Mulia?

574. KETUA: ASWANTO

Tadi disampaikan oleh Kuasa Pemohon, Laporan Nomor 005 itu secara materiil terbukti, tetapi formilnya tidak terbukti?

575. BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

576. KETUA: ASWANTO

Betul?

577. BAWASLU: MASTAWAN

Kalau untuk pidana pemilu, Yang Mulia (...)

578. KETUA: ASWANTO

Ndak, ndak. Yang saya tanya saja dijawab, Pak. Secara materiil terbukti, tetapi syarat formilnya tidak terbukti, sehingga tidak dilanjutkan?

579. BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

580. KETUA: ASWANTO

Ya, cukup.

581. BAWASLU: MASTAWAN

Secara formil tidak terbukti.

582. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ada pertanyaan begini, Pak Ketua, kalau secara formil tidak terbukti harusnya itu dijadikan temuan (...)

583. KETUA: ASWANTO

Nanti, Pak, nanti ... nanti kami yang menanyakan ke Bawaslu nanti. Cukup, Pak, ya?

584. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Izin, Yang Mulia? Pertanyaan lagi ke Saudara David?

585. KETUA: ASWANTO

He eh.

586. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Terhadap Laporan Nomor 004 yang Pak David lihat/ketahui karena Pak David baca langsung karena Pak David ini bagian tim yang melaporkan pada saat itu. Apakah benar pengawas TPS yang dihadirkan oleh Bawaslu kota untuk diberikan klarifikasi keterangan merupakan pengawas TPS yang bermasalah, artinya pengawas TPS ini juga tidak ... sebenarnya tidak memenuhi syarat, memenuhi di TPS bersangkutan seharusnya di TPS asalnya.

587. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya. Di ... dijadikan saksi pada saat itu.

588. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Baik, Yang Mulia.

589. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya?

590. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Cukup, Yang Mulia.

591. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Sekarang giliran Termohon.

592. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Terima Kasih, Yang Mulia.

593. KETUA: ASWANTO

Yang sudah di ... ini ... yang sudah klir tadi. Ya, tidak perlu Saudara tegaskan karena semua sudah terekam.

594. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Terima Kasih, Yang Mulia. Saya ingin ke Gusti Juli, ya. Gusti Juli (...)

595. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya.

596. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Sejak kapan Gusti Juli keluar dari grup Banjarmasin Baiman?

597. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Pertama, Pak. Saya ini ada bergabung 3 grup, Pak. Grup ban (...)

598. KETUA: ASWANTO

Enggak, Pak Gusti, dijawab singkat saja.

599. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Yang singkat saja, Pak Gusti.

600. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Pak Gusti.

601. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Koordinator Baiman 2, grup (...)

602. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Pak ... Pak Gusti, dijawab singkat.

603. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Saya dikeluarkan dari grup, Pak.

604. KETUA: ASWANTO

Kapan Bapak keluar dari grup WA Baiman 2?

605. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Saya dikeluarkan dari grup bulan Januari, Pak ... awal-awal bulan Januari atau ... ya, Pak, awal bulan Januari, Pak.

606. KETUA: ASWANTO

Januari setelah selesai pemilihan berarti?

607. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

608. KETUA: ASWANTO

Setelah selesai pemungutan suara, ya. Sudah ada penetapan?

609. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Sudah, Pak.

610. KETUA: ASWANTO

Januari tanggal berapa Bapak dikeluarkan?

611. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Awal Januari, Pak, sekitar tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Januari, Pak.

612. KETUA: ASWANTO

Baik.

613. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Awal Januari, Pak.

614. KETUA: ASWANTO

Kenapa Bapak dikeluarkan?

615. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Awalnya dari grup Banjarmasin Baiman 2, Pak. Pak Ahmad Bayhaki mengeluarkan seluruh anggotanya, Pak.

616. KETUA: ASWANTO

Ya, apa sebabnya anggota itu dikeluarkan? Bapak tahu?

617. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Saya tahu, Pak. Bahwa untuk menghilangkan bukti chat, Pak. Padahal apabila saya ... apabila dikeluarkan dari grup, chat saya masih ada, Pak.

618. KETUA: ASWANTO

Oke. Cukup. Silakan, Pak!

619. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Baik. Sekarang saya yang ke Nor Ronasari.

620. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya.

621. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Saudari Saksi, ya, Saudari sebagai tim di dalam Paslon 04 itu sebagai tim apa?

622. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Saya bertugas sebagai tim teknis pengaduan dan mengklarifikasikannya.

623. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Tim pengaduan dan klarifikasinya. Banyak sekali, ya, yang mengadu. Yang Saudari ... yang Saudari rekapitulasi pengaduan itu, ya, dari kapan sampai kapan?

624. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, dari setelah selesai pemilu ... pemilu dilaksanakan itu dari tanggal 11, tanggal 12 Desember sampai bergulirnya kasus ini, Pak.

625. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Sampai bergulirnya kasus ini, ya. Apakah Saksi juga pernah melaporkan hal-hal yang terjadi seperti Saksi alami?

626. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Pernah, Pak.

627. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Kepada siapa?

628. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Kepada ... ke PPS, Pak.

629. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Kepada?

630. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

PPS.

631. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Kepada PPS itu setelah pelaksanaan pemilu, ya?

632. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya.

633. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Setelah pelaksanaan pemilu.

Baik, saya bergeser lagi ke David, ya. David (...)

634. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Siap.

635. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Saksi David, saya menarik juga keterangan Saudara, nanti juga Saksi kami juga akan menjelaskan nanti yang sebenarnya.

636. KETUA: ASWANTO

Pak, maaf (...)

637. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Ya ... ya, Pak?

638. KETUA: ASWANTO

Bapak menyimpulkan (...)

639. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Ya.

640. KETUA: ASWANTO

Kalau Bapak menyatakan Saksi kami menerangkan ini yang sebenarnya, Bapak menyimpulkan ini salah gitu, ya.

641. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Ya.

642. KETUA: ASWANTO

Enggak boleh, Pak.

643. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Terima Kasih, Yang Mulia, atas diingatkan. Terkait ini, ya, apakah pada saat rekapitulasi pleno KPU Kota Banjarmasin, Saksi melihat selesai pleno itu para ... para saksi pasangan calon yang lain ikut menandatangani hasil perhitungan

644. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Yang pasti pas saksi dari Paslon 04 tidak menandatangani dan ada satu dari pasangan yang lain, Pak, tapi saya lupa itu paslon yang mana. Sama-sama menulis keberatan.

645. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Maksud saya begini. Itu, kan, selesai perhitungan.

646. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Enggak dengar.

647. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Setelah selesai perhitungan (...)

648. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

649. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Kemudian, para saksi pasangan calon itu disodorkan untuk menandatangani hasil perhitungan. Apakah Saksi melihat itu?

650. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya tidak melihatnya, Pak. Tapi yang saya ... halo ... halo?

651. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Ya.

652. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Halo?

653. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Ya.

654. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya tidak melihat, Pak. Saya tidak melihat proses penandatanganan itu.

655. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Tidak melihat, ya.

656. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

657. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Saksi, kan, berada di tempat?

658. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Betul, tapi pada saat proses penandatanganan itu kan dalam kondisi sudah selesai semua (...)

659. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

660. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Dan prosesnya itu lama, saksi dari 04 menulis surat keberatan.

661. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya. Dan pada saat itu saya bergerombol dan bertemu dengan beberapa wartawan, sehingga kami ngobrol ... ngobrol di luar pintu, Pak.

662. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Oke, itu, ya?

663. KETUA: ASWANTO

Silakan, Prinsipal juga mau mengajukan pertanyaan? Silakan.

664. TERMOHON: HERIWIJAYA

Izin, Majelis. Mohon dibuka maskernya, Pak David.

665. KETUA: ASWANTO

Pak David?

666. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

667. KETUA: ASWANTO

Coba di ... difokus Mba, Mas.

668. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tes.

669. KETUA: ASWANTO

Kita bisa difokus, Pak David.

670. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Oke. Ya, sudah.

671. KETUA: ASWANTO

Pakai lagi, Pak, maskernya, Pak. Pak David, pakai lagi maskernya, Pak. Ini Bapak dicurigai jangan-jangan bukan David ini.

672. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

KTP saya sudah dilampirkan, Pak. Alamatnya jelas disitu, Pak.

673. KETUA: ASWANTO

Silakan, mas.

674. TERMOHON: HERIWIJAYA

Oke. Pertanyaan saya, Pak David, ya. Pak David pada saat rekapitulasi di Kota Banjarmasin tanggal 15 itu, Pak David tanda tangan di daftar hadir?

675. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya daftar hadir bertandatangan bersama dengan Amat Sarkawi, dan itu pada saat itu saya membawa surat mandatnya tetapi karena pada saat di dalam itu ada sesuatu yang membuat saya berpikir lebih baik saya keluar, saya meminta kepada ... siapa namanya ... paslon, Ibu Ananda agar saya digantikan saja, kemudian dikirim lah seseorang bernama Ahmadi, menggantikan saya di situ, tapi Ahmadi datang ke sana ... datang di tempat itu, saya berikan pengarahannya bahwa kasusnya adalah seperti ini, ada surat suara ... ada daftar hadir pemilih yang kita temui dan suaranya berbeda, dan pada saat ini tadi sudah dibicarakan oleh Saksi Muhajir dan Saksi Sarkawi ternyata Pihak KPU dan Bawaslu tidak mau menerimanya dengan alasan perbedaan itu sudah diselesaikan pada saat yang lalu, tetapi tidak ada penjelasan lebih jauh (...)

676. KETUA: ASWANTO

Baik.

677. TERMOHON: HERIWIJAYA

Bahkan kami mengatakan adanya selisih daftar hadir.

678. KETUA: ASWANTO

Cukup, Pak. Pak David ... Pak David tunggu dahulu, dengar pertanyaannya lagi. Termohon?

679. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya, siap.

680. TERMOHON: HERIWIJAYA

Tanggal ... pleno tanggal 15 di Kota Banjarmasin, Pak David tanda tangan sekitar pukul berapa kalau di daftar hadir? Pukulnya.

681. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Sekitar antara Pukul 14.00 WITA hingga Pukul 15.00 WITA, Pak.

682. KETUA: ASWANTO

Tidak diingat pasti tetapi antara Pukul 14.00 WITA – 15.00 WITA?

683. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya enggak ingat pasti, Pak. Karena saya pada saat itu baru landing dari pesawat Pukul 12.00 WITA lebih di Banjarbaru kemudian bertemu dahulu dengan Bu Ananda.

684. KETUA: ASWANTO

Baik. Sudah ... sudah dicatat, Pak. Pak David, sudah dicatat, Pak.

685. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya, Pak.

686. KETUA: ASWANTO

Silakan, masih ada lagi?

687. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Siap.

688. TERMOHON: HERIWIJAYA

Oke, Pak David, ya? Nanti ini ada berhubungan dengan (...)

689. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

690. TERMOHON: HERIWIJAYA

T-10, ya? Pak Majelis (...)

691. KETUA: ASWANTO

Apa itu?

692. TERMOHON: HERIWIJAYA

Ada pembuktiannya di (...)

693. KETUA: ASWANTO

T ... T-berapa Bapak punya bukti itu?

694. TERMOHON: HERIWIJAYA

T-10.

695. KETUA: ASWANTO

T-10 itu tanda tangan Saksi?

696. TERMOHON: HERIWIJAYA

Rekap ... rekap semua di ... apa ... Kota Banjarmasin termasuk ada daftar hadir.

697. KETUA: ASWANTO

Itu?

698. TERMOHON: HERIWIJAYA

Ya.

699. KETUA: ASWANTO

Baik.

700. TERMOHON: HERIWIJAYA

Oke, terus tadi mengatakan ada di kejadian khusus ... kejadian khusus di ... apa ... di ... di kejadian khusus Kota Banjarmasin itu. Apakah Pak David pada saat itu yang mengonsepanya?

701. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Kejadian khusus apa, Pak?

702. KETUA: ASWANTO

Laporan Bapak, mengisi ndak laporan keberatan kejadian khusus?

703. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Bukan saya, Pak. Itu Saksi Ananda dari Saksi (...)

704. KETUA: ASWANTO

Baik.

705. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saksi yang ada di dalam situ, Pak Muhajir dan Sarkawi.

706. KETUA: ASWANTO

Baik, cukup.

707. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Yang menandatangani (...)

708. KETUA: ASWANTO

Bukan Bapak yang mengisi form keberatan?

709. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Bukan.

710. TERMOHON: HERIWIJAYA

Kalau isi (...)

711. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Bukan.

712. TERMOHON: HERIWIJAYA

Form keberatan, tahu isinya?

713. KETUA: ASWANTO

Bukan dia Pak yang isi, bukan dia yang tanda tangan.

714. TERMOHON: HERIWIJAYA

Ah, ya. Siap-siap.

715. KETUA: ASWANTO

Yang tanda tangan itu Ananda. Silakan, masih ada?

716. TERMOHON: HERIWIJAYA

Sebentar, Majelis, kita lihat di 10, ya. Baik.

Baik. Terus Pak David itu ada berapa TPS yang ditulis di ... sepengetahuan Pak David ... Pak David, apakah di dalam sur ... di dalam sus itu ada berapa ... berapa TPS disebutkan?

717. KETUA: ASWANTO

Maksud Saudara (...)

718. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tolong diulangi, Pak. Putus-putus.

719. KETUA: ASWANTO

Saudara ... maksud Saudara, di form keberatan itu keberatan terhadap berapa jumlah TPS?

720. TERMOHON: HERIWIJAYA

Ada. Ada ... ada jumlah TPS dan ada (...)

721. KETUA: ASWANTO

Ndak-ndak. Pertanyaan Saudara itu mau menanyakan (...)

722. TERMOHON: HERIWIJAYA

He eh.

723. KETUA: ASWANTO

Berapa jumlah TPS yang (...)

724. TERMOHON: HERIWIJAYA

Ya ... ya.

725. KETUA: ASWANTO

Keberatan itu?

726. TERMOHON: HERIWIJAYA

Ya.

727. KETUA: ASWANTO

Pak David?

728. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya, Yang Mulia.

729. KETUA: ASWANTO

Pak David tahu timnya Bapak itu Ananda menandatangani keberatan, TPS mana saja yang dia keberatan? Bapak tahu?

730. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya. Kurang jelas, Yang Mulia. Saya kurang tahu karena bukan saya yang menulis, Yang Mulia.

731. KETUA: ASWANTO

Baik, tidak tahu dia.

732. TERMOHON: HERIWIJAYA

Cukup, Majelis. Eh nanti lanjut kalau ada waktu.

733. KETUA: ASWANTO

Baik, baik Pihak Terkait silakan!

734. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Inggih. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Langsung saja pertanyaan saya kepada Saksi pertama, ya, yang dari Pemohon, Gusti Juli.

Saudara Saksi tadi kan cerita banyak terkait dengan grup-grup Baiman dan koordinator tim pemenangan.

735. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, ya.

736. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Apakah Saudara Saksi pernah melihat struktur tim pemenangan Paslon 02, Ibnu Sina-Arifin?

737. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Kurang jelas, Pak.

738. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ya. Saya ulangi, ya. Apakah Saudara Saksi pernah melihat struktur tim pemenangan Paslon Ibnu Sina-Arifin yang didaftarkan di dalam KPU?

739. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ada pernah melihat, Pak.

740. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siapa ketuanya?

741. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ada pernah melihat, Pak.

742. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siapa, Saudara Saksi?

743. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Yang ... yang saya tahu, Pak. Satu nama yang kuasa hukumnya Imam Fajar Rafi itu saja, Pak. Untuk Pak Ahmad Bayhaki tidak ada.

744. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Kurang jelas ... kurang jelas, Saudara Saksi. Mungkin bisa diulang jawabannya.

745. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Saya pernah melihat, Pak, salah satu ... satu nama yaitu kuasa hukum atas nama Imam Fajar Rafi, yang lain kurang tahu, Pak.

746. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Bukan itu pertanyaan ... bukan itu.

747. KETUA: ASWANTO

Saya ... saya bantu.

748. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap.

749. KETUA: ASWANTO

Pak Gusti.

750. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Yang Mulia.

751. KETUA: ASWANTO

Saudara tahu nama-nama tim pemenangannya 02?

752. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Eenggak tahu, Pak.

753. KETUA: ASWANTO

Eenggak tahu. Ya namanya saja tidak tahu, apalagi SK-nya.

754. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap. Saya lanjut, ya.

755. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya.

756. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Saudara Saksi juga tadi menjawab pertanyaan yang diajukan Pemohon kan kenal dengan si Saudara Ibnu Sina ... siapa ... siapa tadi? Ada banyak tadi yang ditanyakan oleh Kuasa Hukum Pemohon. Apakah Saudara Saksi kenal dengan yang dikonfirmasi bahwa ada anggota grup-grup itu? Sebagai anggota grup tadi.

757. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Banyak. Banyak sekali saya kenal, Pak.

758. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ya.

759. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Maka saya pernah ikut pertemuan datang ke rumah Pak Ahmad Bayhaki pernah, Pak. Banyak, banyaklah saya pernah pernah bertemu.

760. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Pernah bertemu? Pernah bertemu apa kenal?

761. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Kenal dan bertemu, Pak.

762. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oh ya, siap. Saudara Saksi kan tadi sebagai koordinator ... apa? Saudara Saksi.

763. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Koordinator Banjarmasin wilayah utara, Pak. Bukan saya saja koordinatornya.

764. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Sebagai koordinator Banjarmasin Utara kan harusnya menguasai, ya. Wila ... di wilayahnya. Saudara Saksi tahu jumlah pemilih di Banjarmasin Utara?

765. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Saya disuruh oleh Pak Ahmad Bayhaki bahwa masing-masing koordinator itu melaporkan TPS yang pernah diadakan kegiatan rumpun warga, itu saja.

766. KETUA: ASWANTO

Pak Gusti ... Pak Gusti, pertanyaannya begini. Tahu tidak jumlah pemilih di Banjarmasin Utara?

767. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Tidak tahu, pak.

768. KETUA: ASWANTO

Tidak tahu.

769. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Tidak tahu. Jumlah kelurahan di Banjarmasin Utara ... berapa jumlah kelurahan di Banjarmasin Utara?

770. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Maaf, saya tidak tahu, Pak.

771. KETUA: ASWANTO

Tidak tahu juga.

772. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Berapa jumlah TPS di Banjarmasin Utara?

773. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Maaf, Pak. Saya cuma mengumpulkan KTP.

774. KETUA: ASWANTO

Tidak tahu.

775. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Bukan mengetahui itu, Pak.

776. KETUA: ASWANTO

Tidak tahu jumlah pemilih, tidak tahu jumlah ... apa namanya ... TPS, dia hanya disuruh mengumpulkan KTP.

777. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Saudara Saksi kan koordinator ... katanya tadi koordinator Banjarmasin Utara, ya? Apakah ada dibuatkan SK ... SK dalam bentuk tertulis?

778. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Saya tidak dibuatkan dalam bentuk SK tertulis.

779. KETUA: ASWANTO

Ndak ... ndak dibuatkan, ndak ada SK tertulis.

780. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap. Mungkin dilanjutkan rekan saya, Majelis.

781. KETUA: ASWANTO

Silakan! Waktunya (...)

782. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Pokok-pokok pertanyaan (...)

783. KETUA: ASWANTO

Masih ada? Atau cukup?

784. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Online.

785. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oh, Gusti Juli cukup.

786. KETUA: ASWANTO

Cukup.

787. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Mungkin ke Saksi II, Majelis.

788. KETUA: ASWANTO

Silakan Ibu ... Ibu Nor Ronasari.

789. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Dengan Saksi, ya? Ibu Nor Ronasari. Oh, silakan! Rekan saya yang me (...)

790. KETUA: ASWANTO

Silakan!

791. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Izin, Yang Mulia.

792. KETUA: ASWANTO

Ya, jangan ... apa namanya ... jangan panjang-panjang.

793. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Ya. Ibu Nor Ronasari tadi (...)

794. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, Pak?

795. KETUA: ASWANTO

Agak dekat mik-nya, Pak. Biar kedengaran.

796. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Oh, ya.

797. KETUA: ASWANTO

Ya. Mik-nya agak didekatin.

798. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Ibu Nor Ronasari.

799. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, Pak?

800. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Tadi Anda ... Anda menyebutkan ada ... ada bertugas itu maksudnya tugasnya sebagai apa tadi?

801. KETUA: ASWANTO

Tadi sudah disampaikan, dia tim teknis.

802. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Tim teknis (...)

803. KETUA: ASWANTO

Paslon 04.

804. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Pengaduan tadi, ya, kalau tidak salah dengar.

805. KETUA: ASWANTO

Penerima laporan pengaduan.

806. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, benar.

807. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Oke. Apakah Anda menyaksikan langsung terkait dengan pengaduan-pengaduan yang datang memverifikasi langsung?

808. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Saya mengklarifikasi langsung, Pak, setelah saya mendengar ... apa ... menerima pengaduan dari masyarakat, saya langsung mengklarifikasinya.

809. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Mengklarifikasinya kepada siapa?

810. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Kepada orang yang mengadu, Pak.

811. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Oke. Apakah Anda melihat langsung peristiwa-peristiwa tersebut?

812. KETUA: ASWANTO

Pak, dia tidak melihat langsung. Jadi dia ini tinggal di posko, kalau orang datang melaporkan ada kejadian begini, kemudian dia langsung klarifikasi kepada yang melapor apa kejadiannya. Jadi dia tidak di lapangan.

813. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Hanya ingin mempertegas itu, Yang Mulia. Terus tambahan yang kedua, Yang Mulia, tadi dikatakan ada pengalaman pribadi, betul, ya? Nah, tadi dikatakan ada (...)

814. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ulang, Pak. Kurang jelas.

815. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Ya.

816. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, Pak?

817. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Tadi kan dikatakan ada pengalaman pribadi Saudari, ya. Saudari Saksi.

818. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya.

819. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Di TPS yang Anda sebutkan tadi. Itu di mana Anda tahu ada muncul nama ... nama keluarga Ibu tadi? Saudara saksi tadi.

820. KETUA: ASWANTO

Tadi saya sudah tanya itu, Pak. Di mana tahu ada nama nenek kakeknya? Menurut dia ada di daftar pemilih tetap.

821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Oke, baik.

822. KETUA: ASWANTO

Tapi pada waktu mau menggunakan hak suaranya, petugas mengatakan untuk nama ini sudah digunakan.

823. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Izin melanjutkan, Majelis.

824. KETUA: ASWANTO

Ya.

825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Saudara Nor Ronasari, ya. Mungkin penegasan saja.

826. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, Pak.

827. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Saudara Saksi tadi menggunakan hak suara pada saat pemilu 9 Desember itu di mana, Saudara Saksi?

828. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Di TPS 012 Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

829. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap. Saudara Saksi tadi yang pengalaman pribadi yang nenek dan kakenya tadi di TPS mana kejadiannya?

830. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Di TPS 012 Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

831. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Yang di (...)

832. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Di TPS yang sama, Pak.

833. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oh, ya.

834. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Di TPS sama dengan saya.

835. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap. Saudara Saksi di TPS 02 tadi di Murung Raya tadi, Saudara Saksi apakah sebagai saksi mandat atau cuma sebagai pemilih?

836. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Saya cuma sebagai pemilih, Pak, di TPS 012 itu.

837. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oke, Saudara Saksi bisa melihat daftar hadir?

838. KETUA: ASWANTO

Dia tidak lihat daftar hadir, Pak. Saya sudah tanya, dia tidak lihat daftar hadir.

839. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Saudara Saksi kan tadi juga ada menerangkan terkait dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran prosedur pada saat pemilihan, ya. Saudara Saksi, ya?

840. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya.

841. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Nah, terkait itu. Apakah Saudara Saksi pernah mengikuti bimtek-bimtek yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu terkait dengan teknis pemungutan suara, Saudara Saksi?

842. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Tidak pernah, Pak.

843. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Tidak pernah. Saudara Saksi, apakah mengetahui terkait dengan buku saku atau pandua ... buku panduan yang dimiliki oleh KPPS terkait dengan penyelenggaraan pemilu pilkada 9 Desember?

844. KETUA: ASWANTO

Ibu tahu enggak ada buku saku untuk petugas (...)

845. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Tidak tahu, Yang Mulia.

846. KETUA: ASWANTO

Tidak tahu dia.

847. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oke. Saudara Saksi juga tadi adalah tim pengaduan, ya Saudara Saksi?

848. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, Pak.

849. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Yang di pengaduan, apakah Saudara ... berarti kan ada di pos kemenangan paslon, ya. Saudara Saksi, apakah Saudara Saksi mengetahui Paslon 04 menghadirkan saksi di TPS-TPS pada saat pemungutan suara?

850. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Mohon maaf, Pak. Ulang, suaranya tidak terdengar jelas.

851. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Apakah tim 04, tim 04 menghadirkan saksi di TPS-TPS pada saat pemungutan suara?

852. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Saya tidak tahu, Pak. Karena itu bukan ... bukan wewenang saya, Pak. Saya hanya menjadi timses saja, Pak.

853. KETUA: ASWANTO

Tidak tahu, baik sudah. Dijawab singkat saja enggak tahu.

854. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Inggih.

855. KETUA: ASWANTO

Silakan.

856. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, Yang Mulia.

857. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Apakah Saudara Saksi pernah melihat C1?

858. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Pernah.

859. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Pernah. Apakah C1 itu dikumpulkan di posko pemenangan 04 apa di tempat lain atau bagaimana?

860. KETUA: ASWANTO

Ibu, di mana sepengetahuan Ibu C1 itu dikumpul di mana?
Apakah ada C1 dikumpul di posko tim pemenangan?

861. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Saya melihat C-1 itu di TPS, Pak.

862. KETUA: ASWANTO

Cuma di TPS dilihat?

863. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya.

864. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Saudara Saksi kan tadi mengatakan bertugas dari tanggal, ini ... dari tanggal ... di posko kemenangan dari ... daripada saat pemungutan suara sampai dengan ini, ya.

865. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya.

866. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Pertanyaan saya, kan standby di posko setiap hari atau ada ... ada sif-sifan, Saudara Saksi?

867. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Saya bekerja itu dari jam 09.00 sampai jam 18.00, Pak.

868. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap. Apakah ada aktifitas pengumpulan berkas-berkas yang dari saksi-saksi TPS di posko?

869. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Saya tidak melihat, Pak.

870. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Tidak melihat. Saudara Saksi, kapan mengetahui ... kapan Saudara ... Saudari Saksi mengetahui Paslon 04 bukanlah ... bukanlah hasil perhitungan, kapan Saudara Saksi mengetahui hasil perhitungan tingkat Kota Banjarmasin pada saat pilkada ini?

871. SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Tidak tahu, Pak.

872. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Tidak tahu, ya? Cukup, Majelis.

873. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya?

874. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Terkait dengan Saksi yang ini.

875. KETUA: ASWANTO

Masih ada lagi?

876. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ke Saksi berikutnya, Majelis.

877. KETUA: ASWANTO

Waktu Saudara tinggal sedikit.

878. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oh, ya siap. Pak David (...)

879. KETUA: ASWANTO

Satu Saksi maksimal 5 menit. Tadi Saudara menggunakan panjang, ya.

880. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap. Pada saat Saudara rapat pleno, ya. Rapat pleno Saudara Saksi hadir di ... di tempat acara.

881. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

882. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ... kan Saudara saksi inikan awalnya saksi mandat, tapi diganti, ya? Saya penegasan saja.

883. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya, betul.

884. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Apakah ... ya, apakah saat menerima mandat Saudara Saksi menerima mandat, apakah Saudara Saksi datang ke tempat rekapitulasi membawa data sanding?

885. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Data sanding itu apa?

886. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Data sanding. Misalnya kan mungkin (...)

887. KETUA: ASWANTO

Pak David.

888. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

889. KETUA: ASWANTO

Ini kan Bapak diberi mandat untuk menjadi saksi di tingkat rekapitulasi kabupaten ... eh, kota?

890. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

891. KETUA: ASWANTO

Apakah Bapak membawa data-data perolehan suara dari rekap kecamatan?

892. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Oh, tidak, Pak. Saat itu saya hanya membaca di ... di rumah Ibu Ananda (...)

893. KETUA: ASWANTO

Baik. Berarti tidak bawa data sanding.

894. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap, Yang Mulia.

895. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tidak bawa, tidak bawa.

896. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Saudara Saksi, ya.

897. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Siap.

898. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Penghitung ... kan kita ketahui kan perhitungan ini kan ada berjenjang, ya. Tingkat PPS, PPK, dan kabupaten/kota. Apakah Saudara Saksi mengetahui Paslon 04 menghadirkan saksi atau tidak disaat perhitungan di tingkat kecamatan?

899. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Itu saya tidak tahu, Pak.

900. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Tidak tahu. Apakah Saudara Saksi pernah melihat D Hasil kecamatan di seluruh Kota Banjarmasin?

901. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tidak.

902. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Yang lima TPS (...)

903. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tidak juga (...)

904. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Tidak pernah?

905. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tidak juga.

906. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Terkait dengan ini, Saudara Saksi tadi kan mengatakan ada ... ada ini, ya, sebelum ... sebelum ada pergantian saksi mandat, Saudara Saksi kan mengatakan tadi ada daftar hadir yang berbeda, ya. Mem ... sebelum mem ... sebelum me ... sebelum digantikan kan Saudara Saksi kan memberikan briefing, ya, kepada yang menggantikan kan gitu, tadi Saudara Saksi menerangkan. Nah, apa ... kan terkait dengan perbedaan daftar hadir dengan jumlah pemilih yang datang. Apakah ... dari mana Saudara Saksi mengetahui daftar hadir itu berbeda? Karena kan biasanya daftar hadir itu ada di dalam kotak TPS.

907. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Pada saat saya di rapat di ... di pleno itu, Pak, yang maksud ditanyakan di situ, Pak? Saya kurang jelas pertanyaannya, Pak.

908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Nah, jadi bisanya Pak David kan daftar hadir sebagaimana kita ketahui bersama kan letaknya di dalam kotak, kotak yang tersegel gitu, ya, biasanya. Nah, tadi kan Pak David kan me ... mengatakan detail terkait dengan jumlah daftar hadir di TPS dan jumlah pemilih yang datang. Nah, dari mana Pak David mengetahui daftar hadir di ... di TPS tersebut itu adalah sebagaimana detail yang disampaikan?

909. KETUA: ASWANTO

Silakan, Pak David!

910. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Daftar ... daftar hadir yang saya sampaikan tadi itu saya ... saya terima dari tim, Pak.

911. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Tim siapa, Pak?

912. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Dari tim ... ya, tim dari Paslon 04.

913. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Tim paslon ... Bapak mengetahui?

914. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Dan saya ... daftar ... saya ikut mencocokkan antara daftar hadir pemilih dengan C-1 yang 127 yang dikirimkan ke MK itu, Pak.

915. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap. Pak David, Pak David mengetahui pada saat 9 Desember, apakah Paslon 04 menghidirkan seluruh saksi di TPS?

916. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tidak tahu, Pak.

917. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Tidak tahu. Berapa jumlah TPS di Kota Banjarmasin, Pak David?

918. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Oh, saya bukan orang Banjarmasin, Pak, tidak tahu, Pak.

919. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Tidak tahu?

920. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

921. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Pertanyaan lain. Pak David pernah melihat D Hasil Kecamatan?

922. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tidak pernah.

923. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Tidak pernah. Tadi kan Pak David mengatakan ada selisih, ada selisih pada saat perhitungan di pleno KPU kabupaten/kota?

924. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

925. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Dari mana Pak David mengatakan ada selisih?

926. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya kan hadir di situ, Pak. Pada saat hadir jam 15.00 WITA itu masing-masing kan membacakan kecamatan mana, kecamatan mana untuk gubernur dan walikota. Kemudian, kan terjeda, jeda kemudian yang setelah Magrib, setelah salat Magrib itu dibacakan lagi ada 2 kecamatan, Banjarmasin Tengah dan yang satunya saya lupa yang mana, entah Timur entah Selatan.

Nah, itu ternyata di situ bahkan ketua KPU-nya sendiri, Pak itu saya lupa namanya dia mengatakan, "Coba pelan-pelan dilihat lagi." Itu saya lihat ... saya mendengar pasti karena saya hadir di situ, Pak.

927. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oke. Tadi Saksi mengatakan selain Paslon 04 yang keberatan, ada saksi paslon lain yang keberatan. Saudara Saksi mengetahui paslon mana yang keberatan selain Paslon 04?

928. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya tidak mengetahui dengan pasti, saya hanya mendengar bahwa yang menulis keberatan itu bukan hanya 04, tapi ada paslon yang lain.

929. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oh, jadi Saudara Saksi mengetahui ... mendengar saja, ya, tidak melihat langsung, ya? Tidak melihat langsung?

930. KETUA: ASWANTO

Ya, sudah dijelaskan.

931. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Karena yang saya pentingkan Paslon 04, Pak.

932. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Penegasan saja, Majelis.

933. KETUA: ASWANTO

Baik, ya, tapi enggak usah penegasan karena sudah direkam semua.

934. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oke. Saudara Saksi, tadi juga menjelaskan terkait dengan laporan 005. Apakah Saudara Saksi mengetahui laporan 005 tadi terkait apa Majelis ... Saudara Saksi?

935. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Mohon izin, Yang Mulia, ini pertanyaan berulang, tadi saya sudah tanyakan peristiwa terkait apa, begitu.

936. KETUA: ASWANTO

Silakan, silakan! Pak David, tahu enggak laporan ke Bawaslu yang diberi nomor 005 mengenai apa itu?

937. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Itu banyak sekali, Pak, laporan di situ itu selain dari soal ada mengenai PDAM, ada juga mengenai Gusti Juli, kesaksian dari Gusti Juli,

ada juga mengenai PPS, ada juga mengenai beberapa warga yang menuntut uang janji itu ada 7 warga. Kemudian ada (...)

938. KETUA: ASWANTO

Baik, cukup, cukup. Cukup, Pak David.

939. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya, ya.

940. KETUA: ASWANTO

Jadi, dia tahu.

941. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Selanjutnya, ada siapa saja yang dilaporkan dalam laporan 005 tadi, Pak David?

942. KETUA: ASWANTO

Tahu enggak siapa yang dilapor?

943. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tahu. Kan sebagian tahu, Pak Yang Mulia akan saya sebutkan pelan-pelan. Yang pertama, Ibnu Sina, kemudian Ahmad Bayhaki, kemudian ada lagi Lurah Kuin Cerucuk, saya namanya lupa itu Reza siapa itu.

944. KETUA: ASWANTO

Baik, Bapak, Bapak tahu, tapi tidak tahu ada nama tadi, tapi Bapak lupa, tidak semua Bapak ingat begitu namanya, ya? Oke.

945. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya, ya.

946. KETUA: ASWANTO

Ya, kan? Terakhir, Saudara waktu Saudara sudah (...)

947. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ya, satu lagi, Majelis, satu, satu lagi, izinkan. Terkait dengan hasil kajian, Majelis, terkait dengan hasil kajian yang Saudara tadi mengatakan Saudara baca hasil kajian Bawaslu. Saudara mendapatkan dari mana hasil kajian Bawaslu itu?

948. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya dapat dari tim hukum, Pak.

949. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Tim hukum siapa?

950. SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya kan membantu, lah itu ada (ucapan tidak terdengar jelas) Wijayanto dengan Fahri.

951. KETUA: ASWANTO

Baik, dia dapat dari tim hukum bahwa ini apa namanya ... surat dari Bawaslu. Jelas, ya?

952. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap! Cukup, Majelis.

953. KETUA: ASWANTO

Baik, cukup. Untuk Saksi, Pak Gusti Juli, Ibu Nor Ronasari, dan Pak David sudah bisa, bisa apa ... tinggalkan tempat. Oh, sori, lupa, lupa, mohon maaf sebentar. Kami dari Hakim juga mau mendalami. Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

954. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, pada Saksi Gusti Juli, ya. Tadi memberikan kesaksian awal tadi disebut bahwa Saksi Gusti Juli ini ada di 3 grup, Banjarmasin Beriman 2. Benar, ya? Bisa disebut grup-grupnya itu yang pertama grup apa, kedua grup apa, ketiga!

955. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Pertama, Grup Banjarmasin Baiman 2, yang kedua Grup Koordinator Baiman 2, yang ketiga, Grup Korlap Baiman 2.

956. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, yang pertama Grup Banjarmasin Baiman 2, kemudian yang kedua Grup Koordinator, ya, yang ketiga, ada grup apa ini yang terakhir ini?

957. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Grup Korlap Baiman 2.

958. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Korlap, Grup Korlap, ya. Itu sejak kapan grup WA itu, dimulai ada grup itu sejak kapan?

959. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Saya diundang grup pertama apakah grup Banjarmasin Baiman 2 itu diundang sekitar di Bulan Agustus 2020, Pak.

960. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Agustus, ya. Kemudian yang grup kedua?

961. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Grup kedua itu, Grup Koordinator Baiman 2 diundang sekitar Bulan September atau Oktober, Pak. 2020.

962. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

September atau Oktober. Kalau grup yang ketiga, korlap?

963. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Korlap itu menjelang pemilihan walikota, Pak. Tanggal ... itu diundang mendadak, Pak. Pada tanggal 4 Des ... sekitar tanggal 3 atau ... atau 4 Desember 2020, Pak.

964. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3 atau 4 Desember, ya. Jadi, awal Desember, ya. Sebelum pemilihan.

Oke, yang grup pertama itu Agustus. Itu grupnya sudah berakhir atau belum atau masih sampai sekarang?

965. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Sampai akhir ... dikeluarkan, Pak. Pada akhir Desember 2020, Pak.

966. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi Agustusnya ini sampai dengan Desember, ya.

967. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, akhir.

968. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sampai selesai Pilkada, ya?

969. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

970. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, kalau yang grup kedua, yang koordinator itu dari September sampai bulan apa?

971. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Grup koordinator Baiman 2 itu, Pak. Ada salah satu seperti saya, berbicara bahwa tentang uang, Pak. Warga menagih uang. Atas nama Bapak Sofyan. Bapak Sofyan menagih, saya ikut juga merespons. Lalu, saya dikeluarkan dari ... Pak Bayhaki, Pak, dari grup 2 oleh Pak Sofyan, Pak.

972. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu kapan itu dikeluarkan?

973. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Itu setelah itu, Pak. Setelah pemlihan itu kan, janjinya uang itu ada, Pak. Dikeluarkan supaya tidak ... supaya pindah ada bukti adalagi, Pak. Supaya ... supaya yang lain tidak bersuara atau apa, Pak.

974. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tapi tidak dikasih uangnya?

975. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ada ... ada yang dikasih, Pak. Ada yang tidak, Pak.

976. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Lalu, Saudara Gusti sendiri dapat uang tidak?

977. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Waktu di Bulan Juli atau Juni 2020 itu, Pak, itu saya mengadakan di Sungai Gampa, Pak. Mengumpulkan warga dengan KTP, menjadikan kartu Baiman 2 itu saya dikasih Rp 500.000,00-, Pak. Karena saya sudah mengumpulkan KTP, Pak.

978. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu Bulan Juni-Juli, ya.

979. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Bulan Juni, Juli, Agustus, Pak.

980. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, Juni, Juli, Agustus, ya.

981. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

982. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kan tadi Saudara mengatakan bahwa kalau koordinator itu mendapat 1 KTP dibayar Rp 10.000,00-, sedangkan yang punya KTP

dibayar Rp 100.000,00-. Tadi Saudara Saksi mengatakan berhasil mengumpulkan 275 KTP.

983. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

984. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kalau dikali Rp 10.000,00- berarti Saudara harusnya dapat Rp 2.750.000,00- bukan Rp 500.000,00-.

985. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Oke saya ... saya mau cerita, Pak. Untuk ini, apabila mengumpulkan KTP 50 ... KTP atau lebih, buat mengumpulkan warga itu dapatkan Rp 500.000,00-, Pak. Kalau ke rumahnya (...)

986. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, Rp 500.000,00- ini ... Rp 500.000,00- ini (...)

987. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya.

988. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Di luar dari (...)

989. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ini untuk pertemuan ... di luar dari upah, Pak. Itu untuk pertemuan bonusnya malah.

990. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, jadi Rp 500.000,00- ini bonusnya.

991. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Bonus pertama, Pak.

992. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bonus pertama. Berarti yang dapat Rp 2.750.000,00- lain lagi, ya?

993. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Itu lain lagi, Pak.

994. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, ini ada bonus, ya.

Baik, itu yang korlap itu sampai kapan itu, grup WA itu?

995. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Grup korlap itu, Pak, sampai ... sampai pemilu, Pak.

996. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, itukan dimulai 3 atau 4 Desember. Selesaiya ingat tanggalnya atau tidak? Atau setelah selesaiya?

997. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Itu saya bersamaan dikeluarkan dari grup Banjarmasin Baiman 2, Pak.

998. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, jadi (...)

999. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ditambah dikeluarkan saya ... ya, Pak.

1000. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dikeluarkan bersamaan, ya. Tadi kalau grup Boyamin ... Banjarmasin Baiman 2 itu Desember 2020, berarti ini kurang lebih (...)

1001. SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Bersamaan.

1002.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Akhir Desember, ya.

1003.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

1004.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Karena bersamaan dengan itu. Oke.

1005.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Satu lagi, Pak.

1006.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Soal apa? Kalau tidak ditanya, jangan dijawab. Apa yang mau di ... disampaikan?

1007.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Satu Pak, dari saya. Saya disuruh juga, Pak, mengumpulkan KTP sementara kepada tim pemenangan Paslon 02 bahwa apabila mengumpulkan KTP kepada Tim Paslon 02, maka KTP tersebut cepat jadi, Pak. Sekitar seminggu atau dua minggu secara gratis, Pak. KTP elektronik, Pak.

1008.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Sudah. Itu saya tidak ... tidak tanyakan itu. Gini, ini kan ada 3 grup, ya.

1009.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

3 grup, Pak.

1010.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3 grup yang Saudara Saksi Gusti ikut. Saya tidak tahu di grup yang mana. Tapi, setelah kami telusuri handphone yang diberikan ke Mahkamah, kami lihat ada sejumlah KTP di dalam salah satu ... salah satu anggota grup yang mengatakan ini KTP-nya banyak ini, silakan diambil. Apakah Saudara ingat (...)

1011.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Itu (...)

1012.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Silakan!

1013.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Itu pada tanggal sekitar tanggal 7 Desember atau 8 Desember, Pak. Itu istrinya dari Pak Ahmad Bayhaki, Pak, bernama Ibu Masriyah, Pak. Di ... pada saat itu saya disuruh atau beberapa yang lain disuruh untuk mengambil KTP yang sudah jadi, Pak. Yang itu ... yang pertama merupakan KTP sementara, selain mengambil KTP sementara saya juga mengambil atau disuruh mengambil kartu Baiman 2, Pak, yang ... yang jadi di ... di tempat saya sekitar 162 ... 162. Yang sisanya banyak lagi, Pak.

1014.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

1015.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Bukan di saya saja, Pak, di seluruh Kecamatan Banjarmasin, Pak.

1016.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, pada waktu itu Saudara Saksi ambil KTP tersebut?

1017.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

1018.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada berapa KTP yang diambil?

1019.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Yang ... maksudnya, Pak, yang saya ambil, Bapak?

1020.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, tadi kan Saudara mengatakan silakan kan di ... di kami baca di handphone itu silakan mengambil KTP, ya. Tadi Saudara Saksi mengatakan, Saudara mengambil KTP sama kartu ... apa ... Baiman, ya?

Nah, KTP itu yang ada waktu itu, Saudara ambil berapa banyak KTP atau sama sekali tidak mengambil KTP itu? Terputus, ya?

1021.KETUA: ASWANTO

Halo, Pak Gusti? Pak Gusti masih dengar kita di sini? Terputus, Yang Mulia.

1022.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, mungkin dilanjutkan Ahli dulu.

1023.KETUA: ASWANTO

Ya.

1024.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Karena masih terputus.

1025.KETUA: ASWANTO

Pak Bambang Eka Cahya?

1026.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Siap, Yang Mulia.

1027.KETUA: ASWANTO

Bisa mendengar kami dari sini?

1028.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Alhamdulillah, bisa, Yang Mulia.

1029.KETUA: ASWANTO

Baik. Kita sumpah dulu, Pak, ya. Dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu lafal sumpah.

1030.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Bambang bisa (...)

1031.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Ya, Pak, ada, Pak, hadir.

1032.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mundur sedikit bisa, Pak, mundur sedikit. Bisa Rohaniwannya nampak. Nah, oke silakan, Pak. Agak minggir sedikit.

1033.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Mohon maaf ini kabelnya pendek, Yang Mulia (...)

1034.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke, maksimalkan saja, Pak. Oke sudah kelihatan juga. Saya bantu lafalnya, Bapak yang bersumpah.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

1035.AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

1036.KETUA: ASWANTO

Silakan, Pak. Pak Bambang. Silakan, Bapak punya waktu maksimal 10 menit. Sekarang di 15.38 WIB.

1037.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Baik, Yang Mulia. Keterangan tertulis sudah saya kirimkan melalui Penasihat Hukum, selebihnya saya akan bacakan, saya upayakan sesingkat mungkin.

Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua dan Para Hakim Anggota Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya. Yang saya hormati Termohon dan Kuasa Hukumnya. Yang saya hormati Pihak

Terkait dan Kuasa Hukumnya dan hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya menjelaskan bahwa keterangan yang saya berikan adalah atas pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon dan selaku Ahli Pemilu saya akan menjelaskan keterangan ini berdasarkan keahlian, pengalaman, dan pengetahuan saya secara independen.

Pertanyaan yang diajukan kepada saya terkait dengan persoalan memilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tapi menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Wali Kota, Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin Tahun 2020. Terkait dengan pertanyaan itu saya kembali menjelaskan prinsip-prinsip universal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 56 dan Pasal 57. Yang pertama, warga negara Indonesia pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun dan sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus sudah terdaftar sebagai pemilih. Ketentuan ini secara konstitusional menjamin sepanjang sudah berusia 17 tahun dan sudah pernah kawin, terdaftar dalam DPT dan secara de facto berdomisili di lokasi TPS yang bersangkutan, maka warga negara tersebut mempunyai hak memilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Apabila warga negara tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP dan sesuai dengan alamat RT/RW TPS dimaksud, maka dapat menggunakan hak memilihnya dengan batasan harus mendaftar dulu di TPS yang bersangkutan dan terdaftar dalam DPTb dan dapat menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum TPS ditutup.

Putusan Mahkamah Konstitusi 011/PUU-I/2003, 012/PUU-I/2003 yang menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi undang-undang maupun konferensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 mengatur, "Setiap warga mendapatkan hak pilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Pemilihan umum adalah wujud kedaulatan rakyat yang melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak memilih warga negara dengan memastikan proses pendaftaran pemilih berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 mengatur bahwa hak menggunakan hak pilih di TPS ada 3 jenis pemilih. Yaitu, pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS setempat, pemilih yang terdaftar dalam DPT di tempat lain, tapi pindah memilih karena alasan tertentu, dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTb tetapi menggunakan hak pilihnya dengan KTP elektronik dan beralamat sama dengan TPS tersebut. Untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pasal 7 mengatur, "Pemilihan

terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a memberikan suara di TPS saat pemilih terdaftar dalam DPT.” Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud ayat (1), “Pemilih menyerahkan model C.Pemberitahuan-KWK menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada KPPS.” Dalam hal pemilih terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, pemilih wajib menunjukkan KTP elektronik dan surat keterangan. Pemilih yang terdaftar dalam DPT menentukan hak pilihnya dengan menunjukkan Model C.Pemberitahuan, KTP elektronik atau surat keterangan, khusus jika pemilih tidak dapat menunjukkan pemberitahuan itu, maka yang bersangkutan masih bisa memberikan hak pilihnya dengan surat KTP elektronik atau surat keterangan perekaman e-KTP.

Pasal 8 mengatur bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi menggunakan hak pilihnya di tempat yang lain, maka pemilih itu harus terdaftar dalam DPPH. Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b merupakan pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dalam memberikan surat suara ... memberikan suara di TPS lain. Keadaan tertentu itu dibatasi, yaitu.

1. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara.
2. Menjalani rawat inap rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan ada keluarga yang mendampingi.
3. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial terpantau terakreditasi.
4. Menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan lembaga pemasyarakatan.
5. Tugas belajar, pindah domisili, atau tertimpa bencana alam.

Dalam hal pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilih melapor pada TPS asal untuk mendapatkan Formulir A5-KWK yang menunjukkan bukti identitas yang sah dengan bukti yang telah terdaftar sebagai pemilih di TPS. Intinya adalah pemilih hanya bisa pindah pemilihan apabila yang bersangkutan mempunyai Formulir Model A5-KWK dan didaftarkan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Dengan beberapa pengecualian.

Di TPS tujuan, pemilih bisa menggunakan hak pilihnya apabila menyerahkan Model Formulir A5-KWK disertai dengan oleh KTP elektronik atau surat keterangan perekaman. Pemilih yang pindah memilih karena suatu sebab yang secara definitif dibatasi Pasal 8 ayat (2) didaftarkan pindah pemilihan atau DPPH. Adapun kelompok pemilih ini harus bisa menunjukkan Formulir Model A5-KWK pindah pemilihan yang dikonfirmasi dengan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik dari Dinas Dukcapil setempat.

Persoalan pemilih pindah memilih di TPS lain ini sedikit agak rumit dalam kasus pemilihan serentak bersamaan antara pemilihan gubernur,

wakil gubernur dengan pemilihan wali kota, wakil wali kota. Tidak semua pemilih yang pindah memilih dengan menggunakan Formulir Model A5-KWK memiliki hak pilih yang sama. Jika seseorang pindah memilih dalam kabupaten/kota, maka bersangkutan bisa memiliki dua surat suara, yaitu surat suara Pilbup dan surat suara Pilwali. Jika pemilih pindah dari kabupaten/kota yang lain ke Kota Banjarmasin meskipun sama-sama menyelenggarakan pemilihan bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota, pemilih tersebut hanya berhak atas 1 surat suara, yakni surat suara pemilihan gubernur, wakil gubernur sementara surat suara wali kota tidak berhak. Ini bisa menimbulkan kerumitan (...)

1038.KETUA: ASWANTO

Waktu Bapak tersisa 2 menit.

1039.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Yang menentukan hak pilih seseorang.

1040.KETUA: ASWANTO

Pak Bambang, waktu Bapak tersisa 2 menit.

1041.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Ya, Yang Mulia.

1042.KETUA: ASWANTO

2 menit lagi, Yang Mulia.

1043.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Yang ketiga adalah pemilih terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c yang harus pemilih menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga atau rukun warga yang tertera dalam KTP tersebut. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 8 jam selesai pemungutan suara.

Yang kedua, pertanyaan yang diajukan kepada saya adalah berkaitan dengan persoalan penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, merugikan pasangan calon yang lain. Secara regulasi diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Larangan yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 poin h, yaitu larangan menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, dan pemerintah daerah. Larangan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran publik dan keuntungan ... untuk keuntungan petahana. Larangan melibatkan pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil, dan kepolisian negara juga diupayakan untuk menciptakan kompetisi yang efektif diantara kompetitor yang ada. Konstruksi Pasal 71 ayat (1) yang melarang keterlibatan pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil, TNI, Polri, dan kepala desa atau lurah yang dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon. Larangan ini tentunya punya maksud yang sangat penting, yaitu untuk menjaga agar pemilu yang bebas, jujur, dan adil bisa terselenggara dengan seksama.

Persoalannya adalah penegakkan aturan terhadap larangan tersebut, seringkali tidak efektif karena kewenangan Bawaslu yang diberikan oleh undang-undang yang relatif terbatas, sehingga menyulitkan penegakkan hukumnya. Keterbasan ini memerlukan terobosan meningkatkan efektivitas penegakkan hukumnya, dan Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator bisa memainkan peran penting untuk mendorong regulasi yang lebih efektif untuk penegakkan hukum dan mendorong regulasi yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih atas perhatiannya, Wassalamualaikum wr. wb.

1044.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ada 3 klaster besar, Pak Ketua, saya akan mulai (...)

1045.KETUA: ASWANTO

Silakan, Pemohon.

1046.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ahli, persoalan hak pilih, tadi ada kerumitan tertentu katanya ketika ada pilkadanya atau ada gubernur, dan walikota di satu tempat yang sama. Kalau terjadi, kalau terjadi, seseorang yang tidak mempunyai hak karena di luar daerah pemilihan tapi kemudian dia bisa mudah sekali untuk ikut dan mendapatkan hak suara, padahal dia bukan orang yang berasal dari Kota Banjarmasin. Bagaimana penilaian Saksi terhadap kasus seperti itu?

1047.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Terima kasih, pertanyaannya, Penasihat Hukum. Yang pertama, saya katakan kerumitan karena ada 2 pemilu yang dilaksanakan serentak

yang sebetulnya hak pilihnya berbeda. Yang 1 pemilihan gubernur, hak pilihnya untuk seluruh warga Kalimantan Selatan, sementara yang satunya adalah pemilihan walikota yang hak pilihnya hanya untuk warga yang secara de facto dan de jure adalah warga Kota Banjarmasin. Apabila ada orang dari luar yang pindah memilih, terutama yang dalam DPPH, apabila tidak hati-hati petugas di lapangan, itu sering mendapat 2 surat suara. Padahal, seharusnya mungkin hanya perlu 1 surat suara yaitu surat suara gubernur. Sehingga, surat suara walikota mestinya tidak diberikan, dan ini saya kira menjadi masalah besar. Kalau yang bersangkutan memberikan suara, memilih untuk pemilihan walikota, maka bisa dikatakan bahwa pemilih yang tidak berhak menggunakan hak suara memilih di dalam TPS yang bersangkutan, sehingga kalau lebih dari 1 orang menggunakan hak pilih tersebut, menurut ketentuan Pasal 112, pemilihan atau pemungutan suara di TPS tersebut harus diulang.

1048.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Yang kedua, ada kasus juga, ada contoh seseorang yang mempunyai hak pilih dapat C panggilan ada di dalam DPT tapi namanya sudah digunakan oleh orang lain. Bagaimana penilaian Saksi mengenai ini?

1049.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Ya, sangat mungkin terjadi, Saudara Penasihat Hukum, persoalan-persoalan yang paling sering adalah melakukan verifikasi terhadap orang yang datang dengan memeriksa KTP atau surat keterangan rekam KTP elektronik. Kalau ini tidak dilakukan, bisa saja orang mengaku sebagai orang lain, dan ini yang kemudian membuat hak suara orang lain digunakan. Dan ini berarti ada orang yang tidak berhak menggunakan hak suaranya, memberikan suara di TPS tersebut, dan itu berarti sama seperti yang tadi, harus dilakukan pemungutan suara ulang apabila lebih dari 1 orang menggunakan hak suara di TPS yang dia tidak berhak memberikan suara di situ.

1050.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ada kasus seperti ini, Ahli, jika kemudian orang yang mendapatkan C Undangan, tetapi tidak diperiksa oleh KPPS. Apakah undagannya ada, tidak disuruh menandatangani daftar hadir, tidak juga dicek e-KTP-nya, sehingga kemudian terjadi potensi orang yang tidak jelas, yang bukan memiliki hak di tempat TPS itu juga punya akses untuk melakukan pemilihan. Apakah itu kemudian ujungnya, seperti tadi dikemukakan, harus juga dilakukan pemungutan suara ulang? Karena sudah cukup banyak nih TPS seperti ini, silakan.

1051.KETUA: ASWANTO

Silakan, Ahli.

1052.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Terima kasih, prinsipnya sama. Jadi, tujuan pemeriksaan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik yang diperintahkan oleh peraturan KPU untuk me ... melakukan verifikasi pada orang yang hadir, termasuk mengisi daftar hadir itu adalah alat kontrol untuk mencegah orang yang tidak berhak masuk ke TPS dan memberikan suara.

1053.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke.

1054.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Kalau 3 hal itu tidak dilakukan, pemeriksaan C Pemberitahuan disesuaikan, dicocokkan dengan DPT, dicocokkan dengan KTP elektronik maka kemungkinan orang lain yang tidak berhak itu bisa masuk ke dalam TPS.

1055.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke.

1056.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Persoalan yang paling serius adalah apabila undangan Model C pemberitahuan itu disalahgunakan dalam pengertian, diperjualbelikan, terutama mereka yang tidak ada ditempat sehingga tidak bisa disampaikan tetapi kemudian diberikan kepada orang lain yang tidak berhak. Sehingga orang lain yang tidak berhak menggunakan undangan C Pemberitahuan tersebut.

Tidak adanya pemberiksaan KTP elektronik dan penyesu ... pengecekan kesesuaian para undangan dengan KTP atau dengan surat keterangan, itu menyebabkan lolosnya orang-orang yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih di dalam TPS.

1057.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke. Saya lanjutkan dengan pertanyaan yang lain, bergeser. Sepengetahuan saya, Saudara Ahli juga Mantan Ketua Bawaslu RI. Ada

kasus seperti ini, di satu tempat ada BUMD, yaitu yang namanya PDAM tiba-tiba menurunkan harga padahal sebelum pemilihan, itu tingkat harganya atau iurannya itu dinaikan. Terus tiba-tiba diturunkan, nah, di dalam pemeriksaan, ada dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu hanya menyatakan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan ... apa namanya ... iuran ini adalah ket ... direksi PDAM. Tapi kemudian kami telah memeriksa, ya, hal-hal yang berkaitan dengan ini. Ini sebagai contoh saja. Di dalam perda itu diket ... Ketentuan Nomor 24/2008 disebutkan tugas dari direksi, disebutkan juga kewenangan dari direksi, Pasal 8, Pasal 10, Ketentuan Perda 24/2008 (...)

1058.KETUA: ASWANTO

Pak, mohon maaf, ini keahliannya tidak di situ. Ini keahliannya kepemiluan.

1059.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya. Ini kaitannya kepemiluan, Pak.

1060.KETUA: ASWANTO

Kalau soal itu tadi kan soal administrasi pemerintahan.

1061.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Tidak, Pak ... Pak Ketua. Ini kaitannya ke Pasal 71 ayat (3), seorang gubernur, wali kota, bupati, atau wakil bupati dilarang menggunakan kewenangan program dan (...)

1062.KETUA: ASWANTO

Baik.

1063.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Kegiatan yang menguntungkan atau merugikan (...)

1064.KETUA: ASWANTO

Baik.

1065.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Jadi saya ingin cek di situ. Nah sekarang (...)

1066.KETUA: ASWANTO

Waktu Bapak 2 menit lagi, Pak.

1067.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya. Nah sekarang pertanyaannya begini, pertanyaan begini. Kalau di dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan kewenangan untuk menurunkan iuran itu, ya. Dan memang di dalam faktanya, karena politik air itu yang punya kewenangan adalah kepala daerahnya. Apakah kemudian, pertanyaannya, kita bisa mengklasifikasi kebijakan-kebijakan ini sesuai pasal 71 ayat (3), yaitu seorang petahana yang juga calon tapi kemudian menggunakan kewenangan program yang menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon yang lain. Pendapat Ahli?

1068.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Ya. Saya bukan Ahli PDAM, tapi saya mengetahui sedikit tentang persoalan ini, setahu saya, tarif PDAM itu ditentukan dengan besaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada PDAM tersebut. Karena kalau tidak disubsidi, harganya pasti akan sangat mahal. Nah, keputusan subsidi itu pasti ada di pada pemerintah daerah, bukan pada direksi karena direksi tidak berhak menentukan besaran subsidi itu.

Dengan demikian sebetulnya ada kewenangan dari pemerintah daerah yang harus diperhatikan di situ karena bisa saja kewenangan itu yang disalahgunakan. Nah ini saya kira menjadi persoalan yang serius yang mungkin terkait dengan Pasal 71 tentang ... ayat (3), ya, penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan menguntungkan salah satu pihak ini.

1069.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Yang terakhir juga, ada case, Saudara Ahli, ada 3 orang dilaporkan, ya. Yang 2 ASN, 1 lurah, 1 kepala sekolah, 1 lagi pembina ASN. Hasil analisis Bawaslu ... hasil kajian Bawaslu mengatakan kedua orang ASN ini terlibat karena dia kemudian menggu ... tidak berlaku netral, ya, tidak berlaku. Jadi 2 orang ASN ini tidak berlaku netral itu hasilnya dari Bawaslu. Nah sang pembina itu yang menjadi bagian dari seluruh proses itu, itu dinyatakan karena dia terbukti menjanjikan, tapi kemudian, ya, unsur menjanjikan itu harus bersifat materiil padahal menjanjikan itu sifatnya formil, tidak perlu harus terjadi.

Nah ada yang disebut dengan kesalahan dalam menafsirkan pasal yang kami tidak tahu apakah itu sengaja atau tidak. Menjanjikan yang bersifat formil, itu kemudian dikategori materiil. Nah kalau ini terbukti dan menggunakan asas prinsip materiil, Pasal 71 ayat (3) itu

menjanjikan, ya, menjanjikan, itu artinya ada masalah di Bawaslu untuk memahami proses pembuktian.

Sebagai orang mantan Bawaslu, pimpinan Bawaslu, kalau mendapatkan informasi seperti ini atau mendapatkan fakta seperti ini, apa peran strategis MK yang harus dilakukan, maupun peran Bawaslu RI dalam konteks seperti itu. Silakan!

1070. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Ya. Pertama, Bawaslu harus melakukan pembinaan terhadap SDM mereka dan saya kira harus melakukan pengawasan dan pemantauan juga terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh Bawaslu kabupaten/kota atau Bawaslu provinsi yang ada di bawah. Nah, tanggung jawab ini saya kira melekat sebagai satu institusi yang bersifat hierarkis, ya, dan itu saya kira sangat penting dilakukan oleh Bawaslu mengontrol keputusan-keputusan itu dalam pengertian tentunya memberikan masukan, permintaan, dan sebagainya. Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian constitution mempunyai kewajiban atau mempunyai hak juga untuk memeriksa keseluruhan dari proses penegakan hukum pemilu yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu ataupun penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU untuk memberi penilaian bahwa keputusan atau kebijakan atau langkah-langkah yang dilakukan itu sudah memenuhi standar pemilu yang free and fair election. Karena kalau penegakan hukum ini tidak efektif, maka fair election itu kemudian menjadi persoalan yang harus kita tanggung bersama. Dalam hal ini, tentu Mahkamah pada posisi yang sangat penting untuk memberikan penilaian terhadap ... apakah peraturan dan hukum yang ada di dalam pemilu sudah ditegakkan, hak-hak sudah dipenuhi, dan free and fair election itu memenuhi syarat-syarat yang minimal untuk di (...)

1071. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah ... sudah bisa ditangkap. Saya mau menyambung sedikit.

1072. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Pak, mohon maaf, Pak. Itu Pasal 187A ya, tadi bukan 1 ... bukan 71 ayat (3). Saya mau klarifikasi saja. Silakan.

1073. KETUA: ASWANTO

Baik, saya mau lanjut ke pak ... anu ... ini ... klarifikasi dulu ke Ahli. Saudara Ahli, kalau ternyata ada ASN atau lurah atau kepala desa.

1074.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Ya.

1075.KETUA: ASWANTO

Yang ternyata terbukti melakukan pelanggaran di dalam pemilu, apakah itu berkonsekuensi pada PSU?

1076.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Ya, Yang Mulia, ada problematik berkaitan dengan ASN atau lurah. Kenapa dilarang dilibatkan itu karena mereka ini kan sebetulnya mengendalikan sumber daya publik, baik itu anggaran kegiatan maupun program. Nah karena itu, saya kira menjadi serius apabila keterlibatan ASN dan lurah terutama yang punya pengaruh sangat penting dan luar biasa di dalam masyarakat, sehingga larangan itu dibuat secara spesifik kepada mereka, termasuk sebetulnya pejabat-pejabat pemerintah baik itu pusat maupun daerah BUMN dan BUMD.

Kita semua tahu struktur sosial masyarakat kita itu masih sangat mengagumi dan mengagungkan posisi-posisi politik seperti yang mereka ... sementara kompetisi dan persaingan yang sehat itu adalah harus ditegakkan dan harus ... harus diambil langkah-langkah untuk menegakkannya secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, tentu saya berpendapat apabila terbukti bahwa ada tindakan lurah maupun ASN di samping itu merupakan tindakan pidana yang bisa dipidanakan, terutama untuk lurah, yang jadi persoalan adalah bagaimana kita menciptakan suasana kompetisi yang kondusif terhadap pemilu ... pemilihan ini? Karena kalau itu dibiarkan, maka bisa menjadi dampak yang sangat buruk pada sistem politik kita, di mana pemanfaatan sumber daya publik itu menjadi salah satu yang tidak terkontrol dalam pemilu.

1077.KETUA: ASWANTO

Baik, baik, Saudara Ahli. Apa namanya ... di dalam Pasal 112 itu kan sudah jelas secara ... apa namanya ... secara limitatif disebut di situ tindakan-tindakan apa yang bisa berimplikasi kepada PSU.

1078.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Ya.

1079.KETUA: ASWANTO

Nah, ketidaknetralan ASN, lurah ... apa ... kepala desa, itu memang di dalam tindak pidana pemilu ada dan ya harus dijatuhi hukuman kalau dia terbukti. Tetapi, kalau kita cari pasal yang berimplikasi pada PSU, kita tidak temukan itu. Atau ada pasal yang mana yang kira-kira kita harus gunakan bahwa pelanggaran yang dilakukan ASN sekalipun ... apa namanya ... kalau sudah terbukti diberikan sanksi oleh komisi ASN, kepala desa sudah diproses di pengadilan, dan ternyata terbukti, kita coba cari pasal mana di dalam undang-undang pemilu yang mengatakan bahwa konsekuensi pelanggaran itu adalah PSU?

1080.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Ya. Yang Mulia, yang diatur di Pasal 112 itu adalah pelanggaran secara administratif yang kemungkinan bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Tetapi pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa itu lebih pada pelanggaran asas pemilihan umum, yaitu pemilihan umum yang bebas dan adil.

Nah, di sini tidak teruraikan secara (suara tidak terdengar jelas) di dalam undang-undang kita. Makanya saya katakan ada persoalan serius di sana dan undang-undang kita itu ada banyak larangan tapi konsekuensi dari larangan itu juga tidak terlalu signifikan dan itu saya kira yang harus kita terus perbaiki dalam konteks ...

1081.KETUA: ASWANTO

Baik, cukup, Pak, cukup. Cukup, ya. Dari ...

1082.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ketua, satu saja pertanyaannya.

1083.KETUA: ASWANTO

Oke, singkat, Pak.

1084.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ini berkaitan dengan asas tadi, jujur dan adil di Pasal 3 undang-undang itu. Pegawai negeri di Kota Banjarmasin dipotong 2,5%, terus dana itu dipakai untuk membuat program yang namanya Banjarmasin Bisa Baiman. Baiman ini adalah tagline kampanye, Baiman Bisa. Nah, kemudian Bawaslu mengatakan bahwa itu bukan dana yang berasal dari APBD padahal ini dikordinasikan oleh pemerintah daerah dan Baiman itu

Associate afiliasi atau tercitrakan itu adalah program dari petahana yang menjadi programnya calon. Nah, ini kan lagi-lagi Pasal 1 ... 178, Pasal 71 ayat (3) itu terjadi ada pelanggaran prinsip-prinsip di situ.

1085.KETUA: ASWANTO

Baik, silakan! Sudah ditangkap, ya? Silakan di jawab!

1086.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Gimana pendapat Ahli?

1087.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Ya. Saya kira itu termasuk penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh bupati, wali kota atau gubernur, ya dalam hal ini terhadap ASN. Ya, ini saya kira menjadi persoalan yang serius karena mungkin penafsiran terhadap kewenangan program dan kegiatan itu yang menurut saya di undang Pasal 71 ayat (3) itu yang sangat multitafsir. Nah, sebagai pebanding misalnya mestinya tagline itu juga tidak boleh sama persis dengan tagline kota atau provinsi atau apapun yang dikaitkan dengan ... bisa dikaitkan dengan individu tertentu. Tapi kita tidak punya larangan spesifik tentang itu sehingga kemudian wilayah ini menjadi wilayah abu-abu yang bisa disalahgunakan, bisa dimanfaatkan tetapi prinsipnya adalah ada kewenangan yang disalahgunakan di situ. Itu yang menurut saya harus ... harus ada ... harus ada kontrol dan ada tindakan mestinya.

1088.KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup Pak, ya? Sekarang giliran Termohon! Silakan, ada yang mau didalami?

1089.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Terima kasih, Yang Mulia. Hanya satu, Ahli ya. Ketika dalam satu TPS kemudian seseorang yang tidak berwenang untuk mendapatkan hak suaranya, kemudian dapat melakukan pencoblosan terkait dengan pemungutan suara ulang. Apakah kalau hanya sebagian kecil persentasi yang demikian itu bisa dilaksanakan PSU?

1090.KETUA: ASWANTO

Silakan dijawab singkat, Pak!

1091.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Ya, harus dilaksanakan PSU sesuai dengan TPS yang terjadi orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS itu.

1092.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Di TPS tersebut, ya?

1093.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Ya.

1094.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Cukup, Yang Mulia.

1095.KETUA: ASWANTO

Kalau misalnya, Pak Ahli. Kalau misalnya ternyata setelah kita hitung suaranya, katakanlah maksimal 1 TPS itu 400. Kalau kita memerintahkan untuk mengulang di TPS itu sekalipun perkiraan kita 100% beralih, tetapi tidak signifikan mengubah, apakah harus tetap dilakukan PSU?

1096.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Ya, sebetulnya kalau kita memegang peraturan perundang-undangan terutama untuk menjaga suara yang murni/genuine. Ya harus dilaksanakan, Yang Mulia. Cuma persoalannya kan kita harus juga melihat realitas, seharusnya PSU itu kan dilakukan ketika diketahui peristiwa itu seawal mungkin sehingga hasil sebelum ditetapkan.

1097.KETUA: ASWANTO

Baik.

1098.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Tetapi kan kadang-kadang ini tidak ... tidak demikian dalam praktiknya di lapangan, Yang Mulia.

1099.KETUA: ASWANTO

Baik.

1100.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Ketahuannya kan kadang-kadang kan baru di level-level yang lebih atas.

1101.KETUA: ASWANTO

Baik, cukup Pak ... cukup Pak!

1102.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Karena mungkin saksi-saksi yang ada juga tidak terlalu paham di lapangan.

1103.KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup, Pak. Masih ada dari Termohon?

1104.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Cukup.

1105.KETUA: ASWANTO

Cukup. Dari Pihak Terkait?

1106.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Terima kasih, Majelis. Mungkin pertanyaan akan disampaikan oleh rekan kami yang lewat daring, Majelis.

1107.KETUA: ASWANTO

Baik, silakan!

1108.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Silakan rekan-rekan yang lewat daring, Pihak Kuasa Hukum Terkait.

1109.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktu yang diberikan. Kami hanya ingin mempertegas dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam persyarat materil, dalam perselisihan pemilihan bersandar pada frasa yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Nah, saya hanya ingin Saudara Ahli menjelaskan tentang frasa ini, yaitu *yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih* itu seperti apa. Dan pelanggaran yang signifikan mempengaruhi penetapan calon terpilih itu bagaimana? Terima kasih, mohon jawabannya Saudara Ahli!

1110.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Frasa *signifikan* tentu berkaitan dengan hasil, ya. Bagaimana hasil ... selisih hasil itu terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak pada waktu pemungutan suara. Dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak diselesaikan, saya kira itu juga menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan karena pelanggaran-pelanggaran itu bisa mengakibatkan perolehan suara juga dihasilkan dengan cara yang tidak benar.

Saya kira penentuan signifikansi di situ tidak hanya pada angka, tetapi juga pada proses. Yang harus dilihat adalah apakah proses memperoleh hasil tersebut memenuhi standar pemilu yang free, yang bebas dan pemilu yang fair, yang adil. Saya kira itu yang harus diperhatikan.

1111.KETUA: ASWANTO

Silakan Pihak Terkait masih ada?

1112.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Oke. Berarti Saudara Ahli ... saya izin melanjutkan, Yang Mulia.

1113.KETUA: ASWANTO

Silakan.

1114.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Berarti Pasal yang terkait dengan frasa ini meskipun tidak mempengaruhi hasil, tetap harus diulang.

1115.KETUA: ASWANTO

Tadi sudah saya tanyakan itu Pak. Sudah dijawab.

1116.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Hanya ingin mempertegas saja, Yang Mulia.

1117.KETUA: ASWANTO

Enggak, enggak tugas dipertegas itu sudah direkam semua Pak. Saya sudah tanya tadi dan jawabannya mestinya diulang begitu. Yang lain saja, Pak.

1118.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Jawabannya tidak tegas juga Pak, mestinya ini kan artinya saya harus tahu jawabannya iya atau tidak itu dari Saudara Ahli.

1119.KETUA: ASWANTO

Silakan Ahli.

1120.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Harus ya, harus diulang.

1121.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Enggak. Apakah ini signifikan ini mestinya atau wajib atau tidak ini?

1122.KETUA: ASWANTO

Ini baru saja dia jawab, harus diulang. Saudara ... anu ... di, diapa ... diperhatikan jawabannya itu harus diulang.

1123.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZALDI NAZARUDIN

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

1124.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD KURNIAWAN PUTRA

Izin menambahkan, Majelis.

1125.KETUA: ASWANTO

Silakan, yang dari daring sudah selesai, ya. Silakan yang luring (...)

1126.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD KURNIAWAN PUTRA

Saudara, Saudara Ahli ya. Terkait dengan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Bawaslu artinya kan kewenangan kan memiliki terkait-terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi. Apakah menurut Ahli kewenangan, terkait dugaan-dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan, diperiksa, dikaji, dianalisis, dan diputuskan oleh Bawaslu itu masih bisa atau masih ada lembaga lain yang memeriksanya untuk memeriksa ulang hasil putusan dari Bawaslu tersebut. Mohon jawabannya untuk Ahli.

1127.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Ya. Ya, betul bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan yang absolut dalam memutuskan atau memeriksa perkara tapi juga harus diingat bahwa seluruh proses pemilu itu juga harus dinilai secara konstitusional karena pemilu adalah peristiwa konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, pertanyaannya adalah apakah keputusan-keputusan yang dibuat sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, harus dinilai juga saya kira Mahkamah punya kewenangan untuk menilai. Apakah keputusan Bawaslu itu sudah memenuhi unsur keadilan pemilu terutama dalam pemenuhan hak menegakkan keadilan maupun juga dalam menegakkan hak-hak kepemiluan yang diperdebatkan dalam Majelis ini. Karena apa? Jika tidak ada evaluasi, tidak ada kritik, tidak ada masukan, maka tentu apa yang sudah dilakukan dianggap benar. Padahal belum tentu juga. Dan ini saya kira harus diperhatikan oleh kita semua dan saya kira dari sisi aspek penegakkan hukum pemilu, kewenangan Bawaslu itu masih limitatif dan saya kira menjadi persoalan yang sangat besar ketika berhadapan dengan dimensi pelanggaran pemilu yang dalam tanda petik persoalan asas pemilihan. Ini saya kira yang perlu kita perhatikan.

1128.KETUA: ASWANTO

Baik. Sudah ditangkap. Masih ada? (...)

1129.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD KURNIAWAN PUTRA

Ya, dilanjutkan Majelis (...)

1130.KETUA: ASWANTO

Cukup? Cukup, ya?

1131.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD KURNIAWAN PUTRA

2 lagi Majelis.

1132.KETUA: ASWANTO

2 lagi?

1133.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD KURNIAWAN PUTRA

2 lagi.

1134.KETUA: ASWANTO

Ya, silakan. Singkat Pak.

1135.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD KURNIAWAN PUTRA

Yang pertama, Saudara Ahli mungkin saya gabung, ya, pertanyaannya supaya cepat ya. Apakah ada perbedaan peraturan mengenai proses pemeriksaan di Bawaslu saat Ahli, Ahli kan mantan Ketua KP ... Ketua Bawaslu ya? Saat Ahli bertugas sebagai komisioner dan Ketua Bawaslu saat Ahli bertugas dengan kondisi pilkada serentak tahun 2020. Itu yang pertama.

Yang kedua, bagaimana terkait dengan hasil rekapitulasi, baik itu tingkat TPS dan PPK. Terkait dengan C hasil dan D hasil TPS dan kecamatan itu yang sudah ditandatangani oleh semua Paslon dan di dalamnya tidak ada catatan kejadian khusus dan keberatan ... dan

keberatan dari para pihak. Dalam hal ini Saksi dan menyetujui dengan membuktikan tanda-tanggannya (...)

1136.KETUA: ASWANTO

Baik, sudah. Sudah ditanggap, sudah ditanggap (...)

1137.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD KURNIAWAN PUTRA

Bagaimana nilai pembuktiannya menurut Ahli?

1138.KETUA: ASWANTO

Baik, sudah ditanggap. Silakan dijawab Pak.

1139.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Ya, ada perbedaan signifikan antara kewenangan Bawaslu dimasa saya dengan kewenangan Bawaslu pada saat ini, terutama pada dimensi penyelesaian sengketa pemilu yang pada waktu kami menjabat itu tidak ada dan kami yang memperjuangkan itu kepada DPR dan kemudian muncul menjadi sebuah regulasi dalam undang-undang kita. Ini saya kira perubahan yang cukup penting walaupun belum signifikan sebagai electoral dispute resolution bodies. Jadi Bawaslu itu adalah sebuah institusi yang berkembang, baik dari sisi kewenangan, tanggung jawab, maupun kelembagaan. Karena itu, proses-proses ini saya kira juga harus diperhatikan dengan cermat.

Yang kedua, saya mengatakan tadi bahwa proses rekapitulasi baik di PPS, PPK, maupun di tingkat KPU, seringkali bgini, kualitas SDM yang ada di PPS dan PPK belum tentu memahami dengan sungguh-sungguh persoalan-persoalan yang terjadi dalam kerumitan administrasi pemilu, ya. Bisa jadi mereka tidak fokus pada persoalan-persoalan teknis administrasi pemilu sehingga mereka lebih fokus pada suara dan itu yang menjadi persoalan. Nah, di level yang lebih tinggi biasanya kesadaran akan persoalan-persoalan administrasi pemilu itu jauh lebih ... lebih baik. Saya kira begitu juga persoalan yang dihadapi oleh penyelenggara di semua tingkat, makin ke bawah untuk kapasitasnya makin dan makin ke atas kapasitasnya makin baik dan di situlah kemudian persoalan bisa diidentifikasi biasanya oleh pihak-pihak yang lebih atas dalam persoalan ini. Sangat berbeda tentunya kalau kita bisa membuat tenaga-tenaga di lapangan itu terlatih dengan baik dan kemudian memahami prosedur dan segala macam. Nah, itu saya kira akan sangat berbeda, tapi kita semua tahu pada umumnya di level bawah mereka bekerja sebagai volunteer yang belum tentu memiliki pelatihan yang memadai, belum tentu juga

memiliki pengetahuan yang memadai, dan belum tentu juga mempunyai informasi yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Itu saya kira harus diperhatikan.

1140.KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup, ya. Dari Terkait, cukup?

1141.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap. Cukup, Majelis.

1142.KETUA: ASWANTO

Baik. Kita kembali tadi, masih ada dilanjutkan saksi tadi?

1143.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sebelum ke ahli, saya ke saksi dulu, tadi terputus. Saksi Gusti, dengar suara saya, Saksi Gusti?

1144.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Dengar, Pak.

1145.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, Saksi Gusti. Itu yang tadi pertanyaannya agak terputus terkait dengan screenshot yang berisikan fotokopi KTP. Nah, pada waktu itu, apakah Saudara Gusti mengambil KTP-KTP itu yang ditawarkan di dalam grup?

1146.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak. Itu sekitar tanggal 7 atau 8 Desember 2020 (...)

1147.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, sudah. Pertanyaan saya, apakah Saudara ambil fotokopi KTP tersebut?

1148.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak. Ada (...)

1149.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada berapa (...)

1150.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

1151.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berapa banyak KTP yang Anda ambil?

1152.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Bisa diulang, Pak?

1153.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berapa banyak KTP yang diambil tanggal 7 atau 8 Desember itu?

1154.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Sekitar 1 atau 2 KTP, Pak.

1155.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan, bukan, apakah Saudara mengambil KTP yang dalam screenshot itu kan ada beberapa KTP yang jumlahnya cukup banyak, ya. Pada waktu itu, apakah Saudara ambil KTP tersebut yang ditawarkan di grup?

1156.KETUA: ASWANTO

Saudara jawab saja, ya apa (...)

1157.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ambil atau tidak? Itu saja jawab, ya atau tidak.

1158.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ambil.

1159.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ambil?

1160.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, ya.

1161.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berapa jumlahnya yang diambil?

1162.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Yang diambil yang saya mengumpulkan KTP sementara, Pak.

1163.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan. Yang di dalam HP, bukti di HP itu, itu kan ada sejumlah daftar KTP ya yang katanya ditawarkan di grup itu. ini ada KTP-nya, silakan siapa yang mau mengambil. Apakah pada waktu itu, Saudara Gusti mengambil?

1164.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Tidak, Pak. Tapi saya ke sana, Pak, mengambil kartu Baiman 2.

1165.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berarti tidak ambil, ya?

1166.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ya, Pak.

1167.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Apakah Saudara Gusti tahu (...)

1168.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Selesai, Pak.

1169.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bagaimana, bagaimana?

1170.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Karena pada tanggal 7 atau 8 Desember itu saya mengambil kartu Baiman 2 saja, Pak, untuk yang KTP warga, saya mengumpulkan KTP sementara dan saya sudah selesai (suara tidak terdengar jelas), Pak.

1171.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Jadi yang diambil hanya kartu Baiman ya, Baiman 2 ya? Tidak KTP, ya?

1172.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Tidak, Pak.

1173.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Apakah Saudara Saksi tahu, ada orang yang lain yang mengambil KTP?

1174.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ada semua ... 2 Pak, saya dengan 1 orang saja, Pak.

1175.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan, bukan yang kartu Baiman-nya, tapi yang KTP-nya.

1176.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Ada, Pak. 1, Pak, 1.

1177.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Siapa yang mengambil?

1178.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Saya enggak tahu namanya, Pak. Tapi beliau tinggal di wilayah Mantuil, Pak.

1179.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, ada 1 orang yang mengambil, ya.

1180.SAKSI DARI PEMOHON: GUSTI JULI

Itu jam 11.00, Pak.

1181.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, walaupun banyak KTP, tapi hanya seorang yang mengambil yang Saudara Saksi ketahui, ya. Baik. Terima kasih.

Yang kedua, Saksi Nor Ronasari. Tadi Saudara memberi kesaksian bahwa di TPS 12 itu kakek dan nenek Saudara itu tidak bisa menggunakan hak pilih karena ternyata sudah digunakan oleh orang lain?

1182.SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, Pak.

1183.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Benar, ya?

1184.SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Benar.

1185.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, pada waktu itu apakah pada waktu itu apakah dilakukan protes atau keberatan terhadap petugas di TPS?

1186.SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, Pak, saya melakukan protes keberatan terus sama petugas KPPS-nya itu bilang, oke, boleh memilih dengan syarat menggunakan nama orang lain pada saat itu.

1187.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Artinya, kakek dan nenek Anda ikut memilih?

1188.SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, memilih tapi menggunakan nama orang lain.

1189.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tapi menggunakan nama orang lain?

1190.SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya.

1191.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, berarti kakek dan nenek Saudara itu tidak kehilangan "hak pilih", ya karena dia memilih.

1192.SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya, tapi saya bertanya sama petugas KPPS bahwa bagaimana kalau orang yang namanya dipakai sama nenek kakek saya itu hadir ke TPS untuk memberikan hak suaranya? Terus mereka menjawab, "Nanti kami yang urus." katanya.

1193.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Nah, pertanyaan berikut adalah pada waktu itu setelah kakek dan nenek Saudari menggunakan hak pilih apakah ada mengisi form keberatan atau tidak sama sekali di TPS tersebut?

1194.SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Enggak, Pak. Tidak.

1195.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak. Jadi, tidak ada keberatan, ya pada saat itu karena kakek dan nenek Saudari juga bisa menggunakan hak dengan menggunakan nama orang lain?

1196.SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya. Karena dari petugas KPPS-nya tidak memberikan form keberatan itu seandainya mereka me ... me (...)

1197.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, tapi maksudnya waktu itu Saudara minta form keberatan, enggak?

1198.SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Tidak, mereka tidak menawarkan.

1199.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak, ya, oke, sudah cukup.

1200.SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Seandainya saya mengetahui, saya bakal meminta, Pak.

1201.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, artinya sudah, ternyata tidak minta pada waktu itu, ya?

1202.SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya.

1203.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Karena ternyata juga bisa menggunakan hak pilih kakek dan nenek Saudara ini, ya?

1204.SAKSI DARI PEMOHON: NOR RONASARI

Ya.

1205.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Kemudian, yang terakhir, kepada Saksi David. Tadi ada pernyataan bahwa Saudara David bukan orang di Kota Banjarmasin. Apa maksudnya ini? Apakah KTP Saudara David ini bukan di Banjarmasin atau baru pindah ke Banjarmasin?

1206.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Bukan, Yang Mulia, saya memang penduduk Kota Pekalongan, Yang Mulia.

1207.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, Pekalongan. Oke, terus? Pada waktu itu Saudara ikut menggunakan hak pada tanggal 9 Desember?

1208.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tidak.

1209.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, tidak. Lalu Saudara menjadi tim sukses dari paslon nomor atau tidak sama sekali?

1210.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya hanya ikut membantu dari Paslon 04, Yang Mulia.

1211.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ikut membantu, itu ada dalam SK tidak, ya?

1212.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Tidak.

1213.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak. Tapi waktu itu Saudara dikasih mandat pada waktu rekapitulasi di tingkat kota?

1214.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya. Karena pada saat untuk rekapitulasi itu kan boleh, Yang Mulia, asalkan membawa mandat.

1215.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Boleh, asal membawa mandat?

1216.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Betul.

1217.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tapi pada waktu itu Saudara katakan bahwa waktu itu baru tiba dari bandara kemudian menggantikan orang lain, ya?

1218.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Maaf, Yang Mulia, saya berada di Kota Banjarmasin sejak tanggal 7 November, Yang Mulia.

1219.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

7 November?

1220.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya, betul. Kemudian, tanggal 12 saya pulang ke Kota Pekalongan.

1221.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, pada waktu (...)

1222.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

15 pagi-pagi saya tiba di Kota Banjarmasin karena oleh Paslon saya dimintai bantu.

1223.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, sejak kapan bergabung dengan Paslon Nomor 4 ini?

1224.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Sejak tanggal 7 November.

1225.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, sejak tanggal 7 November?

1226.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya. Saya ada di Kota Banjarmasin secara efektif, full.

1227.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, ke Banjarmasin itu dalam rangka apa Pak David?

1228.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya ada kerja, Yang Mulia, ada pekerjaan, Yang Mulia.

1229.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada pekerjaan.

1230.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Izin menjelaskan, Yang Mulia, ya.

1231.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Silakan.

1232.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Karena pertemuan saya dengan calon pada tanggal 25 Oktober di Kota Pekalongan dan calon meminta, "Jika butuh bantuan, apakah Pak David siap membantu?" Saya katakan, "Siap." Kemudian, tanggal 7 November itu saya diminta bantu dan berangkat tiba di Kota Banjarmasin, mulai tanggal 7 November.

1233.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Apakah Pak David bisa dianggap sebagai konsultan dari Pasangan Calon Nomor 4?

1234.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Saya memberikan masukan-masukan saja, Yang Mulia. Karena begini, Yang Mulia. Pada tanggal 25 Oktober itu, Paslon, Ibu Ananda datang ke Pekalongan untuk berkunjung dan silaturahmi kepada seorang ulama di Kota Pekalongan, Yang Mulia, memohon doa restu ceritanya begitu, Yang Mulia. Nah, bertemu dengan ulama tersebut, saya mempertemukan beliau dengan ulama itu. Setelah selesai bersilaturahmi dan mendapatkan doa restu paslon pulang ke Banjarmasin. Nah, pada saat akan pulang itulah, paslon mengatakan kepada saya, "Tolong nanti kalau saya butuh dibantu." Jadi, saya berada di Kota Banjarmasin itu hanya memberikan masukan-masukan bahwa seperti ini, seperti ini

dalam kampanye seperti ini, termasuk pada saat ada sesuatu yang aneh dengan surat suara daftar pemilu itu, saya pada waktu itu ditelepon oleh Paslon, posisi saya ada di Kota Pekalongan tanggal 13, 14, saya katakan, "Kalau begitu coba, maju meminta gugatan kepada Bawaslu atau KPU pada saat pleno. Kalau tidak diizinkan, kita naik lagi ke MK karena kalau terbukti kecurangan berarti memang ada konsekuensinya untuk yang berlaku curang." Begitu, Yang Mulia.

1235.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, dari penjelasan itu menunjukkan bahwa Pak David ini sebenarnya lebih tepat konsultan ya, tetapi memang pada waktu itu juga diberi mandat itu rekapitulasi di tingkat Kota Banjarmasin, ya.

1236.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

1237.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, pada waktu tanggal 9 itu Pak David di mana?

1238.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Apa, Yang Mulia?

1239.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tanggal 9 Desember itu ada di TPS?

1240.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Desember?

1241.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

1242.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Pada tanggal 9 Desember itu saya berada di rumahnya Ibu Ananda, Yang Mulia.

1243.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, rumah Ibu Ananda?

1244.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya, betul.

1245.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Di rumahnya Ibu Ananda.

1246.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya karena kan Ibu Ananda akan melakukan pencoblosan.

1247.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

1248.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Karena baru keterikatan ini saya hadir di rumahnya Ibu Ananda.

1249.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, jadi sebenarnya pada hari itu Pak David itu ada di rumah Ibu Ananda ya?

1250.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Betul. Ikut mengantar yang bersangkutan ikut mencoblos di pemilu, eh di pilkada itu, Yang Mulia.

1251.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

1252.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Pemilihan suara.

1253.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, ingat Ibu Ananda di TPS berapa?

1254.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Waduh, nomor TPS-nya lupa, tapi TPS-nya berada di sebelah rumahnya.

1255.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, di sebelah rumahnya.

1256.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya.

1257.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tahu di sebelah, tapi tidak tahu TPS nomor berapa, ya.

1258.SAKSI DARI PEMOHON: DAVID SANTOSA

Ya, saya enggak perhatian ke situ.

1259.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, saya kira cukup. Terima kasih, Pak David, saya akan ke Ahli. Pak Bambang, hanya satu pertanyaan saya. Pak Bambang?

1260.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Siap, Yang Mulia.

1261.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, tadi uraian yang terkait dengan PSU Pak Bambang, tadi kalau Pak Bambang mungkin dengar keterangan dari Saksi dua ya bahwa kakek neneknya itu kan namanya sudah dipakai oleh orang lain, ketika diprotes quote and quote, lalu kemudian mereka pun bisa menggunakan, tetapi karena pada waktu itu tidak ada keberatan tertulis ya karena bisa menggunakan hak, tadi Saksi mengatakan kalau tahu dia bisa melaporkan.

Ini persoalan PSU, ini sebenarnya terkait dengan PSU, ya walaupun terlepas dari signifikan dan tidaknya, ya, tapi faktanya yang ada kalau dari kesaksian tadi itu, ada empat kesalahan, empat ya, boleh dikatakan, kakek dan nenek ini kehilangan haknya untuk memilih, tapi mereka bisa menggunakan suara orang lain, ya, ini kan membuat

kesalahan baru sebetulnya. Menurut Pak Bambang, dalam kaitan dengan itu, apakah harus PSU? Dan kalau PSU, kalau tidak ada keberatan, apakah itu dibolehkan untuk PSU? Terima kasih, itu saja pertanyaanya.

1262.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Baik, Yang Mulia. Seharusnya PSU itu apabila laporan diketahui sejak awal, mungkin bisa dilaksanakan berapa hari ya, setelah pemungutan suara karena pelanggaran itu memang termasuk dalam kategori lebih dari satu orang menggunakan hak pilih, yang tidak berhak menggunakan hak memilih di TPS dan itu berarti harus di PSU. Tapi memang seperti saya katakan tadi, mungkin tidak banyak orang yang tahu regulasi atau tidak paham atau tidak, sempat juga mempelajari, sehingga kemungkinan hal-hal tersebut ya lewat begitu saja ya karena memang kesadaran berpemilu kita masih belum baik, tetapi saya pikir peristiwa seperti itu tidak hanya satu atau dua kasus, Yang Mulia.

Karena ada tren mengabaikan. Pertama, ada tiga hal yang saya perlu diperhatikan. Tidak melakukan pemeriksaan terhadap KTP elektronik, ini menjadi sumber masalah terbesar atau surat keterangan. Yang kedua, tidak melakukan mengisi daftar hadir, hanya menandai sehingga kemudian tidak tahu siapa yang datang dan tanda tangannya tidak bisa dibuktikan siapa yang datang, atau tadi yang saya katakan, kemungkinan C.Pemberitahuan itu diperjualbelikan kepada pihak lain, kalau mekanismenya yang benar kalau tidak tersampaikan kepada orang yang berhak, bahkan C.Pemberitahuan harus dikembalikan kepada PPS, kemudian dibuatkan Berita Acara dan PPS mengembalikan ke KPU, dalam bentuk dengan format Berita Acara juga, sehingga berapa yang tidak tersampaikan mestinya diketahui.

Nah, tiga hal ini, Yang Mulia. Menurut saya pembelajaran penting, kedarasan kita berpemilu yang mungkin harus ditegaskan supaya orang tahu persis bahwa hal-hal seperti itu sangat penting dilakukan, kebanyakan KPPS kita menganggap itu sepele karena biasanya mereka mengatakan, "Oh, saya kenal kok pemilih yang datang." Padahal kan kepentingan kita bukan kenal, tapi memverifikasi, hak pilih seseorang itu dan itu saya kira menjadi persoalan serius dalam pemilu kita di hari-hari belakang ini, dan saya kira dari kasus-kasus yang kita diskusikan, saya di Panel 2 ini sudah 3 kali kalau saya tidak salah. Hampir semua persoalan itu muncul di ... dari lapangan dan saya sudah mengulang yang ketiga kalinya pernyataan saya bahwa itu adalah masalah yang tidak bisa diabaikan. Saya tidak tau di mana akar persoalannya, sehingga kemudian KPPS tidak melaksanakan proses verifikasi terhadap pemilih yang datang. Itu saya kira, Yang Mulia.

1263.KETUA: ASWANTO

Baik, cukup.

1264.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih.

1265.KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, ya Pak Bambang. Terima kasih atas keterangan ahlinya.

1266.AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA

Sama-sama, Yang Mulia.

1267.KETUA: ASWANTO

Para Saksi juga sudah bisa meninggalkan tempat, sekali lagi terima kasih.

Sekarang kita ke Saksi Termohon. Saksi Termohon M. Syafrudin Akbar, kemudian Riyan Mangara Simanjuntak. Ada 2 saksinya Termohon, ya?

1268.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Ya.

1269.KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan, Syafrudin Akbar langsung ke depan, Pak, untuk kita ambil sumpahnya dulu. M. Syafrudin Akbar mana? M. Syafrudin Akbar, mana? Baik. Riyan Mangara? Riyan Mangara Simanjuntak, betul, ya?

Dimohon dengan hormat, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu pengambilan sumpahnya.

1270.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Saya bantu lafaznya Bapak-Bapak untuk mengucapkan sumpah. Syarifudin Akbar dan Riyan Mangara Simanjuntak. Baik, agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

1271.SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

1272.KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Ahli?

1273.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ahlinya sekalian?

1274.KETUA: ASWANTO

Dr. Bayu Dwi Anggoro ... Anggono. Ahli sudah siap?

1275.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Siap, Yang Mulia.

1276.KETUA: ASWANTO

Oh, ahlinya juga di ... anu ... ya ... di basecamp-nya KPU RI, ya?

1277.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Siap, Yang Mulia.

1278.KETUA: ASWANTO

Baik, agama Islam. Mohon dengan hormat, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu.

1279.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Pak Bayu, saya bantu lafaznya.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

1280. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

1281. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih kembali ke tempat dulu, Pak. Saudara Termohon, siapa yang akan didengar dulu, saksi atau ahli?

1282. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Saksi dulu.

1283. KETUA: ASWANTO

Saksi dulu. Pak Bayu mundur dulu, kemudian maju Pak Syafrudin Akbar dan Riyan. Ada kursi 1 dulu di depan ... 1 dulu, Pak. Ya, ini bisa diatur, 1 dulu. M. Syarifudin dulu ... Syafrudin, mana, Syafrudin? Ke depan, Pak.

1284. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Mohon izin, Yang Mulia. Jika berkenan saksi si Riyan dulu, Yang Mulia.

1285. KETUA: ASWANTO

Oh, baik. Ini Syafrudin, ada usul dari kuasa hukum. Riyan Mangara dulu, Bapak mundur dulu. Riyan Mangara dulu. Riyan?

1286. SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Yang Mulia.

1287. KETUA: ASWANTO

Saudara tinggal di mana?

1288. SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Saya tinggal di Banjarmasin.

1289.KETUA: ASWANTO

Baik. Pada waktu pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjarmasin, Bapak sebagai apa?

1290.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Saya sebagai ketua KPPS ... TPS 012 Kelurahan Teluk Tiram.

1291.KETUA: ASWANTO

Ketua KPPS? Baik.

1292.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

TPS 012 Kelurahan Teluk Tiram.

1293.KETUA: ASWANTO

012, ya TPS 012. Apa yang terjadi di TPS Bapak ketika hari H itu tanggal 9?

1294.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Pagi itu ketika saya memulai untuk proses pemungutan suara bersama saksi dan anggota KPPS Panwas TPU ... panwas TPS membuka kotak suara sekaligus memeriksa kelengkapan di dalamnya. Pagi itu saya enggak menemukan daftar hadir model ... Model C.

1295.KETUA: ASWANTO

Ya, terus!

1296.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Terus, saya sudah berkoordinasi juga sama saksi serta panwas TPU untuk melakukan proses perhitungan suara dengan menggunakan Model A-3 KWK A DPT.

1297.KETUA: ASWANTO

Oke, berapa jumlah DPT di TPS Bapak?

1298.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ada 412 orang.

1299.KETUA: ASWANTO

412 orang. Ada DTPb?

1300.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ada 6 orang.

1301.KETUA: ASWANTO

DPTb 6 orang. Berapa yang menggunakan hak suara?

1302.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Menggunakan hak suara ada 237 orang.

1303.KETUA: ASWANTO

200?

1304.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

237 orang.

1305.KETUA: ASWANTO

237, termasuk yang DPTb?

1306.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, benar, Yang Mulia.

1307.KETUA: ASWANTO

Baik. Tadi Saudara menjelaskan bahwa ketika membuka kotak suara Anda tidak menemukan daftar hadir?

1308.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, benar, Yang Mulia.

1309.KETUA: ASWANTO

Betul. Apakah Anda membuat daftar hadir sendiri?

1310.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak, Yang Mulia.

1311.KETUA: ASWANTO

Jadi, bagaimana Saudara mengetahui bahwa pemilih yang ada di DPT itu sudah hadir atau belum?

1312.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Saya menggunakan daftar pemilih tetap Model A-3 KWK.

1313.KETUA: ASWANTO

Daftar pemilih tetap Model 3 KWK?

1314.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Yang Mulia.

1315.KETUA: ASWANTO

Model 3 KWK itu bukan surat pernyataan pendampingan pemilih?

1316.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Daftar pemilih tetap, Yang Mulia.

1317.KETUA: ASWANTO

DPT?

1318.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

DPT.

1319.KETUA: ASWANTO

Nah, untuk menandai yang sudah memilih bagaimana Anda (...)

1320.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Saya menggunakan ... saya menggunakan stabilo warna biru untuk pemilih laki-laki dan stabilo warna merah muda untuk pemilih perempuan (...)

1321.KETUA: ASWANTO

Perempuan, baik. Dan sampai pada akhir pemilihan ternyata yang hadir ada 237 orang?

1322.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, benar, Yang Mulia.

1323.KETUA: ASWANTO

Betul. Ada kejadian khusus di tempat Bapak selain tidak ada daftar hadir itu?

1324.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak ada, Yang Mulia.

1325.KETUA: ASWANTO

Tidak ada. Ada saksinya semua pasangan calon?

1326.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ada, Yang Mulia.

1327.KETUA: ASWANTO

Semua saksi menandatangani?

1328.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Semua ... ya.

1329.KETUA: ASWANTO

Baik. Apa lagi yang Bapak mau sampaikan?

1330.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Sudah cukup, Yang Mulia.

1331.KETUA: ASWANTO

Cukup, ya. Baik, terima kasih, Pak Riyan. Ini Ketua KPPS 02, ya, TPS 02.

1332.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

012.

1333.KETUA: ASWANTO

Ya, sori, 012.

1334.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

12 ... 12.

1335.KETUA: ASWANTO

012, ya?

1336.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Baik, Yang Mulia.

1337.KETUA: ASWANTO

Baik, TPS 012. Sekarang Bapak mau ... bisa gantian, Bapak mundur! M. Syafrudin Akbar, silakan ke depan! Pak Syafrudin. Bapak tinggal di Banjarmasin, Pak?

1338.SAKSI DARI TERMOHON: M SYAFRUDIN AKBAR

Di Banjarmasin.

1339.KETUA: ASWANTO

Banjarmasin. Penduduk asli atau pendatang sana, Pak?

1340.SAKSI DARI TERMOHON: M SYAFRUDIN AKBAR

Penduduk ... penduduk asli.

1341.KETUA: ASWANTO

Sudah berapa lama tinggal di Banjarmasin?

1342.SAKSI DARI TERMOHON: M SYAFRUDIN AKBAR

Dari sejak kecil.

1343.KETUA: ASWANTO

Dari lahir sampai sekarang, ya. Baik, pada waktu pemilihan di Kota Banjarmasin, Bapak sebagai apa?

1344.SAKSI DARI TERMOHON: M SYAFRUDIN AKBAR

Ya, saya sebagai anggota KPU Kota Banjarmasin Divisi Teknis Penyelenggaraan.

1345.KETUA: ASWANTO

Bisa miknya di agak jauh sedikit, Pak, biar tidak menggema, ya. Diulang, Pak sebagai apa, Pak?

1346.SAKSI DARI TERMOHON: M SYAFRUDIN AKBAR

Anggota KPU Kota Banjarmasin Divisi Teknis Penyelenggaraan.

1347.KETUA: ASWANTO

Bisa diulang lagi, Pak, enggak jelas.

1348.SAKSI DARI TERMOHON: M SYAFRUDIN AKBAR

Sebagai anggota KPU Kota Banjarmasin Divisi Teknis Penyelenggaraan.

1349.KETUA: ASWANTO

Loh, ini kan Bapak Termohon, kok Bapak jadi Saksi?

1350.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Keberatan, Pak.

1351.KETUA: ASWANTO

Bapak ini kan Termohon.

1352.SAKSI DARI TERMOHON: M SYAFRUDIN AKBAR

Pemberi keterangan.

1353.KETUA: ASWANTO

Ya, tapi kan Bapak Termohon. Gimana itu, Yang Mulia? Ada, ndak, Saksi yang bisa ganti itu? Masa Termohon jadi Saksi? KPU kan mestinya sudah tahu bahwa ... ya, memang lembaganya yang jadi Termohon, tapi kan tidak lepas dari Komisioner.

1354.SAKSI DARI TERMOHON: M SYAFRUDIN AKBAR

Ya, Yang Mulia.

1355.KETUA: ASWANTO

Bapak tidak bisa memberi keterangan, Pak. Karena Bapak Termohon. Ada yang lain? Mau diganti? Kalau tidak ada enggak apa-apa, kita ... kan ini sudah ada temannya Bapak yang mewakili, ngomong apa saja gitu.

1356.SAKSI DARI TERMOHON: M SYAFRUDIN AKBAR

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

1357.KETUA: ASWANTO

Ya, Bapak mestinya tidak ditanya. Bapak nanti bertanya kalau mau. Bapak Termohon, ya. Bapak bisa ... bisa mundur, Pak.

1358.SAKSI DARI TERMOHON: M SYAFRUDIN AKBAR

Terima kasih, Yang Mulia.

1359.KETUA: ASWANTO

Baik. Sekarang Saudara Riyan maju lagi. Saudara Riyan? Saudara Termohon, silakan, ada yang mau didalami?

1360.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Terima Kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi.

1361.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Pak.

1362.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Saksi, ya. Tadi Saksi mengatakan bahwa daftar pemilih tetap adalah 412 orang. Kemudian, jumlah suara yang hasil perhitungan adalah 237 orang, bersama di DPTb, ya. Betul, ya?

1363.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Betul, Pak.

1364.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Yang Mulia, saya ingin menyampaikan bahwa ini terkait dengan Permohonan Pemohon halaman 30 yang teregistrasi angka 4, Yang Mulia.

1365.KETUA: ASWANTO

Baik.

1366.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Kemudian, kita juga telah menyerahkan Bukti T-29.

1367.KETUA: ASWANTO

Bukti T-29 itu (...)

1368.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Bukti T-28 dan Bukti T-29, Yang Mulia.

1369.KETUA: ASWANTO

Bukti T-28, Bukti T-29 berkaitan dengan ini?

1370.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Ya, berkaitan dengan yang halaman 30 (...)

1371.KETUA: ASWANTO

Ya.

1372.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Angka 4.

1373.KETUA: ASWANTO

Berkaitan dengan kejadian di TPS 012 (...)

1374.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

TPS 012 ... dan sebagaimana juga yang dijelaskan Saksi Pemohon tadi.

1375.KETUA: ASWANTO

Baik, yang jumlah DPT-nya 412.

1376.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Yang hadir itu ada ... yang hadir lebih besar suara daripada yang hadir ... tertanda tangan.

1377.KETUA: ASWANTO

Oh, begitu.

1378.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Ya.

1379.KETUA: ASWANTO

Berapa jumlah DPT maksimal di TPS, KPU? 400 atau 500?

1380.TERMOHON: HERIWIJAYA

500, Majelis.

1381.KETUA: ASWANTO

500, ya. Baik. Ada lagi? Silakan!

1382.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Jadi ... boleh langsung saya (...)

1383.KETUA: ASWANTO

Silakan, langsung (...)

1384.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Ya. Baik. Saudara Saksi, ya. Setelah Saksi tidak menemukan form daftar hadir, kemudian Saksi yang menjelaskan tadi bahwa untuk mencatat kehadiran pengguna hak melalui daftar pemilih tetap ... stabilo ... dengan menggunakan stabilo berwarna biru untuk laki-laki (...)

1385.KETUA: ASWANTO

Jadi, tidak dicatat, Pak. Mendandai.

1386.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Menandai, ya.

1387.KETUA: ASWANTO

Menandai. Ya.

1388.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Nah, kemudian, apakah Saksi setelah tidak menemukan itu lalu ada ... Saksi berinisiatif untuk mencari lagi dokumen yang dimaksud?

1389.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Pak. Benar.

1390.KETUA: ASWANTO

Silakan!

1391.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Nah, terus apa?

1392.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Jadi, setelah beberapa jam kemudian, sekitar pukul 09.00 WITA, saya berusaha mencari lagi berkas kelengkapan di meja KPPS. Dan saya menemukan berkas daftar hadir tersebut. Setelah itu, saya meminta kepada saksi paslon dan pengawas TPU ... pengawas TPS, maaf. Bahwa daftar hadir berupa absensi saya temukan agar mungkin bisa ... agar daftar itu bisa digunakan untuk pemilih dibarengi dengan DPT waktu awal pagi saya (...)

1393.KETUA: ASWANTO

Pukul berapa Bapak menemukan itu ... daftar hadir?

1394.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Sekitar pukul 09.00 WITA, Pak.

1395.KETUA: ASWANTO

Pukul 09.00 WITA. Pencoblosan dimulai pukul berapa?

1396.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Pencoblosan saya buka pukul 07.00 WITA, setelah itu sumpah KPPS, serta pembuka kotak suara sekitar pukul 07.30 WITA dimulai (...)

1397.KETUA: ASWANTO

Pukul 07.30 WITA sudah mulai pencoblosan?

1398.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Pak.

1399.KETUA: ASWANTO

Sudah ada berapa banyak yang mencoblos sebelum ditemukan daftar hadir itu?

1400.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu.

1401.KETUA: ASWANTO

Kan, tadi Bapak tandai. Bapak stabilo yang datang ... stabilo ... stabilo. Kemudian, Bapak berusaha mencari dan ternyata dapat daftar hadir itu.

1402.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Yang Mulia.

1403.KETUA: ASWANTO

Kan, begitu ceritanya Bapak, kan?

1404.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya. Tapi yang untuk tugas menandai bukan saya, Yang Mulia. Ada petugas yang lain.

1405.KETUA: ASWANTO

Oh, lain. Bukan Bapak yang bertugas menandai, ya. Masih ada lagi yang mau ditanyakan?

1406.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Baik. Setelah Saksi menemukan itu, apakah pen ... apa ... penco ... pecontengan nama yang hadir di dalam daftar pemilih tetap itu, saat bersamaan juga dite ... bersama ... kemudian itu begitu ditemukan juga daftar hadir, apakah pencirian untuk kehadiran itu tetap diteruskan?

1407.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Pak. Diteruskan sampai selesai.

1408.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Tetap diteruskan sampai dengan selesai?

1409.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya.

1410.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Nah, kemudian, pencatatan ... mencatat kehadiran pemilih di daftar pemilih ... di Form Daftar Kehadiran, apakah itu juga dimulai pada saat ditemukan?

1411.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Petugas TPS menemukan (suara tidak terdengar jelas) untuk Model C Pemberitahuan dan Model A3-KWK tetap sama-sama dilanjutkan sampai dengan selesainya proses pemungutan suara.

1412.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Jadi, sama-sama diteruskan, ya?

1413.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Pak.

1414.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Baik. Ketika Saksi tidak menemukan salah satu dokumen. Salah satu dokumen, yaitu untuk daftar hadir, apakah Saksi pernah menyampaikan kepada para pasangan calon dan pengawas TPS?

1415.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Pernah, Pak.

1416.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Pernah. Saksi pasangan calon, apakah pernah?

1417.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Pernah, Pak.

1418.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Kemudian apakah ada tanggapan dari para saksi pasangan calon dan pengawas TPS?

1419.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Mereka mengajukan diri, Pak, karena para saksi meminta agar pemilih atau pengguna hak suara tetap menggunakan model tersebut, Pak.

1420.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Baik. Nah, sekarang setelah Saksi temukan, ya, daftar pemilih tetap ... form daftar kehadiran, apakah Saksi juga menyampaikan kepada para saksi pasangan calon dan pengawas TPS?

1421.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya Pak, saya sampaikan juga.

1422.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Kemudian setelah disampaikan oleh Saksi, apakah para saksi pasangan calon dan pengawas TPS ada keberatan?

1423.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak ada.

1424.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Tidak ada, ya? Dan yang terakhir, setelah selesai dilakukan pemungutan suara kemudian dilakukan penghitungan, apakah para saksi pasangan calon dan pengawas TPS menyetujui?

1425.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Pak. Mereka para saksi paslon dan pengawas TPU semuanya menyetujui dan menandatangani.

1426.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Nah, kemudian apakah ada catatan khusus?

1427.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak ada.

1428.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Tidak ada.

1429.KETUA: ASWANTO

Cukup. Masih ada? Silakan! Jangan diulang-ulang lagi, tadi sudah saya tanya semua yang Bapak tanyakan itu.

1430.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Saksi?

1431.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Pak?

1432.TERMOHON: HERIWIJAYA

Yang tanda tangan itu masih ingat orangnya? Dari paslon 1, 2, 3, dan 4?

1433.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Untuk nama saksi paslonnya saya punya namanya, Pak, ada.

1434.TERMOHON: HERIWIJAYA

Ya, silakan sebutkan! Paslon 1, siapa?

1435.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Untuk paslon 1, dari Paslon Bapak H. Abdul Haris Makie itu saksinya Saudara Ashari. Paslon Nomor 2 dari Paslon Ibnu Sina, Saudari Arlindanis Pospos, Paslon Nomor 3 Khairul Saleh saksinya Rahadi, dan Paslon dari Nomor Urut 4 H. Ananda, Saudara Supriano.

1436.TERMOHON: HERIWIJAYA

Baik. Saya lanjut, Majelis, ya?

1437.KETUA: ASWANTO

Silakan!

1438.TERMOHON: HERIWIJAYA

Apakah pada saat setelah selesai di TPS 12 ini, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat, apakah ada keberatan untuk TPS 12 Kelurahan Teluk Tiram?

1439.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak (...)

1440.TERMOHON: HERIWIJAYA

Sepengetahuan Saksi?

1441.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak ada, Pak.

1442.TERMOHON: HERIWIJAYA

Cukup, Majelis.

1443.KETUA: ASWANTO

Cukup, ya?

Ini ke KPU, dokumen-dokumen yang digunakan dalam pemilihan itu di TPS, itu ditempatkan di dalam kotak semua kan?

1444.TERMOHON: HERIWIJAYA

Dalam kotak itu, Majelis, kalau selesai (...)

1445.KETUA: ASWANTO

Ndak, ndak. Sebelum.

1446.TERMOHON: HERIWIJAYA

Sebelum ditempatkan di dalam kotak semua.

1447.KETUA: ASWANTO

Sebelum dimulai, ini kertas suara apa semua (...)

1448.TERMOHON: HERIWIJAYA

Dalam kotak.

1449.KETUA: ASWANTO

Dokumen-dokumen (...)

1450.TERMOHON: HERIWIJAYA

Ya.

1451.KETUA: ASWANTO

Dalam kotak semua?

1452.TERMOHON: HERIWIJAYA

Ya.

1453.KETUA: ASWANTO

Nah, pada waktu dimulai itu kan ditunjukkan kepada yang hadir, "Nih, kotak ini, ini isinya".

1454.TERMOHON: HERIWIJAYA

Benar.

1455.KETUA: ASWANTO

Ditumpahin semua, kan?

1456.TERMOHON: HERIWIJAYA

Ya.

1457.KETUA: ASWANTO

Oke. Saudara Saksi?

1458.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Majelis?

1459.KETUA: ASWANTO

Pada waktu Saudara mengeluarkan semua isi dalam kotak itu, apa Saudara tidak menemukan amplop yang cokelat? Atau ada berapa amplop cokelat yang Anda keluarkan dari kotak suara itu?

1460.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Saya menemukan amplop cokelat yang isinya kosong, untuk judulnya saya lupa, Yang Mulia.

1461.KETUA: ASWANTO

Tadi di mana Saudara temukan itu daftar hadir atau C-7 KWK?

1462.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Jadi setelah ... itu saya temukan di meja KPPS, di tempat tumpukan berkas-berkas dokumen kelengkapan untuk (...)

1463.KETUA: ASWANTO

Meja KPPS? Ada di mejanya KPPS?

1464.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Meja saya, Pak.

1465.KETUA: ASWANTO

Di meja Bapak sendiri?

1466.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Setelah saya rapikan, Pak. Acara proses perhitungan suara, setelah penghitungan kertas suara, dimulailah penghitungan suara, setelah agak sepi para pemilih, saya coba cari-cari lagi, Pak, berkas tersebut, akhirnya saya temukan di antara tumpukan sam ... sampul dan berkas-berkas yang lainnya, Pak.

1467.KETUA: ASWANTO

Apakah di sampul cokelat itu tertulis nama dokumen yang ada di dalam?

1468.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak ada, Pak Majelis.

1469.KETUA: ASWANTO

Misalnya ini C-7 KWK, tidak ada nama itu?

1470.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ada namanya, Pak, di atas sampul ... sampul itu, Pak.

1471.KETUA: ASWANTO

Ya di ... di ujung sampul itu kan ada. Misalnya ini C-1 Perhitungan, gitu, ini C-1 atau C-7 KWK, ada yang seperti itu kan?

1472.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ada, Pak.

1473.KETUA: ASWANTO

Ada? Baik, silakan!

1474.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Bisa (suara tidak terdengar jelas).

1475.KETUA: ASWANTO

Apa lagi Saudara mau sampaikan?

1476.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Sudah, Pak.

1477.KETUA: ASWANTO

Cukup?

1478.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Yang Mulia.

1479.KETUA: ASWANTO

Baik, Saudara Kuasa Pihak Terkait, ada yang mau didalami? Waktunya, ya.

1480.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Ya. Siap, Majelis.

1481.KETUA: ASWANTO

Ini sudah hampir pukul 17.00 WIB.

1482.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Oke. Saudara Saksi, ya. Saudara Saksi adalah Ketua KPPS TPS 12 ya tadi ya, Kelurahan Teluk Tiram.

1483.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Pak.

1484.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap. Saudara Saksi, saya mau tanya terkait dengan pemahaman Saksi sebagai ketua PPS ... ketua KPPS, ya. Kan sebagai ... sebelumnya, sebelum bertugas pada taat ... pada saat tanggal 9 Desember ini tadi kan ada diberikan bimtek ... bimtek terkait dengan pelaksanaannya ... pada pelaksanaan hari H.

1485.KETUA: ASWANTO

Yang mau Saudara tanyakan apa?

1486.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Apakah ada bimtek itu?

1487.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ada, Yang Mulia.

1488.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Nah, terkait dengan Saudara Saksi kan menjelaskan tadi tidak adanya catatan kejadian khusus, ya.

1489.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ya.

1490.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Atau form keberatan. Nah, sedangkan di sini ... di awal tadi kan ada dokumen yang terselip, ya. Saya mendengarkannya terselip tidak ditemukan pada saat pembukaan kotak pada saat pelaksanaan awal, tapi ditemukan pada saat sudah berjalan, sudah ada pemilih yang datang, sudah ada pemilih yang menggunakan hak suara. Betul gitu, ya? Nah, pemahaman Saksi, isian form keberatan atau kejadian khusus itu akan diisi bagai ... seperti kejadian apa? Isian form keberatan itu diisi setelah adanya keberatan dari saksi paslonkah atau cuma dari kejadian-kejadian yang seperti di TPS Saudara alami harus dicatatkan di dalam kejadian khususkah atau bagaimana?

1491.KETUA: ASWANTO

Silakan, Saksi!

1492.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Kami lanjuti, Pak. Jadi (Suara tidak terdengar jelas) pendapat saya kejadian tersebut diisi (...)

1493.KETUA: ASWANTO

Jangan berpendapat, Anda kan Saksi. Apa yang Saudara lakukan? Jadi saya perlu perjas dulu ke Kuasa Hukum.

1494.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ya.

1495.KETUA: ASWANTO

Form keberatan itu formulirnya ada (...)

1496.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Ya.

1497.KETUA: ASWANTO

Kalau ada yang keberatan diserahkan kepada mereka.

**1498.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN
PUTRA**

Siap.

1499.KETUA: ASWANTO

Mereka yang isi, gitu.

**1500.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN
PUTRA**

Siap.

1501.KETUA: ASWANTO

Tanda tangan, lalu disampaikan ke KPU (...)

**1502.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN
PUTRA**

Ya. Saya tadi kan menanyakan, makanya tadi saya menanyakan, apakah Saudara Saksi ... tadi kan mengikuti bimtek yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan, gitu.

1503.KETUA: ASWANTO

Ya.

1504.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Nah, gitu. Artinya saya menanyakan pemahaman Saksi terkait dengan bimtek-bimtek tadi, kan ada dijelaskan kalau form ini dijadiin form (...)

1505.KETUA: ASWANTO

Ya, tapi jangan pemahamannya. Apa yang dia kerjakan, apakah yang dikerjakan itu sesuai dengan bimtek atau tidak, gitu.

1506.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Saudara Saksi, ya?

1507.KETUA: ASWANTO

Silakan, Saudara Saksi!

1508.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Pak.

1509.KETUA: ASWANTO

Apakah pada waktu ada kejadian, misalnya tadi tidak ditemukannya C7-KWK, ada keberatan dari saksi-saksi?

1510.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak ada, Yang Mulia.

1511.KETUA: ASWANTO

Berarti tidak ada yang minta surat keberatan ... form keberatan?

1512.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak ada, Yang Mulia.

1513.KETUA: ASWANTO

Tidak ada. Sudah klir. Apa lagi?

1514.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Cukup mungkin, Majelis.

1515.KETUA: ASWANTO

Cukup, ya?

1516.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ya.

1517.KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Sekarang ke Pemohon, mohon waktunya juga sama supaya kita ... apa namanya ... sama memperlakukan mereka juga tidak terlalu lama, kita batasi.

1518.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Baik. Kepada Saudara KPPS, Saudara Saksi, setiap proses pemungutan suara dicatatkan di dalam Berita Acara apa tidak?

1519.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Mohon diulang.

1520.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Apakah setiap proses atau Tindakan yang dilakukan oleh KPPS dicatatkan di dalam Berita Acara?

1521.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Yang diinput ke Berita Acara adalah perhitungan suara.

1522.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Oke, dalam kejadian khusus Saudara catat enggak itu?

1523.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak.

1524.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Ada dari pukul 09.00 WITA tidak ada itu?

1525.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak ada karena tidak ada yang keberatan.

1526.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Ya, Anda kan di situ ada kejadian khusus, kejadian khusus itu tidak perlu ada keberatan. Saudara Saksi bisa paham itu?

1527.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Saya sudah memberitahu kepada para saksi paslon dan pengawas TPS dan mereka tidak ada keberatan. Kalau memang ada keberatan (...)

1528.KETUA: ASWANTO

Ya. Sebentar ... sebentar! Saksi, yang ditanyakan itu ... yang ditanyakan itu, apakah Model C2-KWK itu Saudara isi? Model 2 ... Model C2-KWK itu adalah petugas diminta mencatat apa kejadian yang terjadi di TPS itu, kan?

1529.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Betul, Yang Mulia. Kejadian khusus.

1530.KETUA: ASWANTO

Anda mengisi, tidak?

1531.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak ada.

1532.KETUA: ASWANTO

Dia juga tidak isi C2-KWK.

1533.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Saudara Saksi mempertanggungjawabkan 55 nama pemilih yang memilih tidak bertanda tangan dalam daftar hadir?

1534.KETUA: ASWANTO

Saudara Saksi, silakan!

1535.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Untuk hal tersebut, itu kan sudah saya tandai dari awal proses mulainya pemungutan suara sampai dengan selesai, itu yang bisa saya pertanggungjawabkan. Untuk yang sudah ... tidak bertanda tangan, saya tidak bisa lagi memanggil orangnya dan tidak tahu siapa saja yang sudah tanda tangan saat itu, Pak.

1536.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Para Saksi menandatangani ... menandai itu di form apa?

1537.KETUA: ASWANTO

tadi dia sudah ngomong, dia stabilo di ... apa ... DPT.

1538.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

A3 KWK.

1539.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Mohon izin, Yang Mulia. Kami menemukan fakta ada kebohongan yang Saudara Saksi lakukan (...)

1540.KETUA: ASWANTO

Eenggak, enggak. Saudara nanti ... nanti (...)

1541.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Begini, Yang Mulia. (...)

1542.KETUA: ASWANTO

Hakim yang menilai itu.

1543.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Ya karena di dalam Form C Daftar Hadir itu memang ada stabilo, tapi hanya dua. Itu ada di bukti kami P-16.1.

1544.KETUA: ASWANTO

Bukan, itu kan Saudara. Jangan paksa mengaku dia.

1545.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Baik, Yang Mulia.
Oke. Saudara Saksi, saya lanjutkan, Anda tadi mengatakan tidak ... apa ... (...)

1546.KETUA: ASWANTO

Silakan.

1547.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Kami mempunyai data daftar hadir, dalam daftar hadir itu tidak ada catatan apapun seperti yang Saudara Saksi katakan.

1548.KETUA: ASWANTO

Itu di P berapa?

1549.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ada di dalam. Dan di dalam situ, jumlah yang mengajukan ... jumlah DPT nya itu juga berbeda dan itu sebabnya kami menuliskannya di dalam permohonan.

Saudara Saksi, kalau kemudian hal ini misalnya sudah dikonfirmasi oleh panwas, apakah Saudara juga akan berkata dengan apa yang Saudara jelaskan tadi? Karena ini juga ada (...)

1550.KETUA: ASWANTO

Saudara Saksi, Saudara Saksi kan sudah disumpah tadi, ya. Supaya semua berjalan sesuai dengan kebenaran, Saudara diminta untuk menjelaskan saja apa yang Anda lakukan, gitu.

1551.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Baik.

1552.KETUA: ASWANTO

Silakan.

1553.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Yang saya jelaskan adalah yang sesuai dengan saya kerjakan di lapangan waktu kejadian tersebut.

1554.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke. Kalau begitu saya cek saja deh, berapa jumlah seluruh halaman yang ada di dalam tangan Saudara Saksi? Jangan lihat di situ, Anda hafal berapa jumlah halaman dari seluruh DPT yang ada daftar hadir itu?

1555.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Jumlah DPT daftar hadir yang hadir?

1556.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya.

1557.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Itu ada 22 halaman.

1558.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke. Kemudian di setiap halaman kan jumlahnya tadi Saudara sebutkan itu, berapa jumlah keseluruhan yang sah suaranya? Tadi belum ada pertanyaan, ya, sah suara.

1559.KETUA: ASWANTO

DPT nya (...)

1560.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Suara yang sah itu 215.

1561.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ulangi lagi, suara sahnya berapa?

1562.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Untuk jumlah surat suara yang sah 215.

1563.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Jadi dari 412 yang ada di DPT, yang mencoblos itu hanya 237?
Betul begitu, ya?

1564.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

231 berdasarkan DPT, 6 DPTb.

1565.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, betul. 231 DPT, 6 DPTb, dan yang menusuk itu hanya ... yang sah itu hanya 215?

1566.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, benar.

1567.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Betul. Jadi suara tidak sahnya itu ada berapa?

1568.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

22.

1569.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

22. Apakah di dalam berita acara juga disebutkan kenapa suara tidak sah?

1570.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak ada.

1571.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Tidak ada. Bagaimana bisa mempertanggungjawabkan surat suara itu sebenarnya suara yang ... sebenarnya sah atau sah kalau yang tidak sahnya itu tidak disebutkan?

1572.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Untuk penghitungan suara, kertas suara dibuka, dan dibuka semuanya, dan dilihat kalau memang ada yang mencoblos dua itu menandakan tidak sah.

1573.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke, coba (...)

1574.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Semua saksi paslon ikut mengawas TPS.

1575.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Mari kita cek, ya. Mari kita cek apa yang ada dokumen di Anda dan apa yang ada di kami. Coba Anda buka dokumen Anda Nomor 349.

1576.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Mohon maaf, dokumen apa ya, Pak? Maksudnya, Yang Mulia, izin Yang Mulia?

1577.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Dokumen yang berkaitan dengan (...)

1578.KETUA: ASWANTO

DPT, DPT maksudnya?

1579.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya.

1580.KETUA: ASWANTO

Apakah Saudara membawa DPT?

1581.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Itu yang di tangan Saudara apa itu? Dokumen apa itu?

1582.KETUA: ASWANTO

Ditanya dulu, itu DPT apa bukan? Saksi, itu DPT yang Saudara pegang?

1583.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Pak.

1584.KETUA: ASWANTO

Sekarang pertanyaannya, silakan.

1585.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Di nomor 349.

1586.KETUA: ASWANTO

Coba buka DPT nomor 439.

1587.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

349.

1588.KETUA: ASWANTO

Eh, sori. 349. Sudah ketemu? 349?

1589.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Yang Mulia.

1590.KETUA: ASWANTO

Silakan, apa yang Saudara mau gali dari situ?

1591.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Apakah ... perhatikan saya Saudara Saksi, apakah nomor 349 itu dia hadir atau tidak hadir?

1592.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Untuk petugas yang menghadiri bukan saya, Pak. Yang mengerjakan adalah petugas KPPS anggota yang lain, Pak.

1593.KETUA: ASWANTO

Enggak, ditanya begini. Apakah Nomor Urut 349 itu hadir pada waktu pencoblosan di TPS? Kalau Saudara tidak tahu, bilang tidak tahu, kalau Saudara tahu juga sampaikan. Saudara tidak tahu?

1594.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak tahu, Yang Mulia.

1595.KETUA: ASWANTO

Saudara tidak tahu?

1596.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak tahu, Yang Mulia.

1597.KETUA: ASWANTO

Tidak tahu dia.

1598.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Saya tidak bisa melanjutkan, Yang Mulia, dia pegang dokumennya. Tapi ketika saya tanya apakah hadir atau tidak? Memberikan ... dia tidak bisa jawab. Jadi, dokumen apa yang dipegang itu sebenarnya?

1599.KETUA: ASWANTO

Ya, kan (...)

1600.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Bagi saya Saksi ini meragukan.

1601.KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar, Pak Bambang. Ini kan di TPS itu ada 7 orang, masing-masing ada tugasnya. Nah, mungkin saja dia tidak bertugas di tempat mengecek antara nama yang ada di DPT dengan yang hadir.

1602.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Itu problem utamanya, Pak Ketua. Kalau tidak ada alat konfirmasi, bagaimana kita bisa memastikan free and fair-nya itu terjadi?

1603.KETUA: ASWANTO

Baik.

1604.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ini contohnya paling tepat di sini, Pak Ketua.

1605.KETUA: ASWANTO

Baik. Kita sudah tangkap, Cuma kan kita tidak bisa paksa dia.

1606.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, tetapi sekarang dokumen yang sama kan kita pegang.

1607.KETUA: ASWANTO

Baik, baik.

1608.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Kok dia tidak bisa jelaskan?

1609.KETUA: ASWANTO

Cukup, ya?

1610.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Saya mohon ya, Pak Ketua, keberatan sekali dengan Saksi ini (...)

1611.KETUA: ASWANTO

Baik. Tidak perlu dilanjutkan Saksi ini oleh Pemohon. Lho, kan satu tim kan?

1612.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Masih ada pertanyaan tadi, ada stuck dia.

1613.KETUA: ASWANTO

Satu tim kan mengatakan ini meragukan saksinya, tidak perlu dilanjutkan.

1614.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Ada satu pertanyaan, Yang Mulia.

1615.KETUA: ASWANTO

Silakan!

1616.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Kepada saksinya Termohon. Apakah Saudara Saksi Termohon mengetahui adanya Putusan MK Nomor 86 dalam hal tidak ada daftar hadir atau daftar hadir bermasalah itu dilakukan pemungutan suara ulang? Tahu atau tidak?

1617.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Saya tidak tahu.

1618.KETUA: ASWANTO

Tidak tahu dia, Pak.

1619.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Oke, baik.

1620.KETUA: ASWANTO

Tidak tahu. Bimtek di TPS saja dia tidak maksimal. Sekarang giliran kami, ada pendalaman, Yang Mulia Pak Daniel?

1621.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Saksi Riyan, ya. Apakah Saudara sebagai ketua KPPS itu ikut sampai selesainya pemungutan suara pada hari itu?

1622.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Pak, saya sampai selesai.

1623.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, sampai selesai, ya. Itu tadi dinyatakan bahwa di buka itu mulai pukul 07.00 WITA, kemudian pencoblosannya diperkirakan pukul 07.30 WITA, ya?

1624.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Pak.

1625.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya. Nah, kemudian pada waktu pukul 07.00 WITA itu sudah banyak yang hadir atau belum?

1626.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Sudah banyak yang hadir, Pak.

1627.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah banyak, ya. Itu sampai jam berapa Saudara Saksi lihat yang hadir di TPS itu dalam jumlah yang banyak itu sampai jam berapa?

1628.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Kurang lebih sampai pukul 09.00 WITA.

1629.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kurang lebih sampai pukul 09.00 WITA. Jadi, setelah pukul 9.00 WITA sudah ... sudah sepi?

1630.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Agak mulai sepi, Pak.

1631.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Agak mulai sepi. Setelah sepi itu baru Saudara menemukan daftar hadir?

1632.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Saya mencari berkas (...)

1633.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, kan. Tadi Saudara mengatakan menemukan daftar hadir di meja ketua KPPS ya setelah agak sepi itu. Nah, pada waktu mendapatkan daftar hadir itu, apakah kemudian daftar hari itu dipakai untuk mereka yang datang menggunakan hak pilihnya itu, setelah ditemukan itu apakah mereka mengisi daftar hadir?

1634.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Pak.

1635.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Isi, ya? Nah, ada yang Saudara pegang sekarang itu apakah kelihatan tidak ada berapa yang isi daftar hadir dan berapa yang tidak? Atau jumlahnya banyak, sehingga harus dihitung dulu.

1636.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak saya pegang berupa (suara tidak terdengar jelas).

1637.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bagaimana?

1638.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Untuk daftar hadir yang berupa tanda tangan, itu kan Pak masuk ke dalam kotak suara.

1639.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, itu masuk ke dalam kotak suara. Jadi, yang ada di tangan Saudara ini yang mana?

1640.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Yang di tangan saya ini berupa hasil ... hasil fotonya sih, Pak. Yang tanda tangan ini saya sempat mendokumentasikan pakai handphone. Saya foto, Pak.

1641.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kemudian, ini di-print, ya? Dari handphone itu difoto, kemudian di-print?

1642.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Pak.

1643.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu datanya sama dengan yang dimiliki Pemohon, tidak?

1644.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ini kemarin saya ada kurang cetak, Pak, ada tiga lembar. Pas buka fotonya kemarin, Pak.

1645.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada ... jadi, berapa banyak yang Bapak print di situ yang bisa ter-print, yang ada sekarang jumlahnya (...)

1646.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Yang saya print cuma sampai halaman 19, Pak.

1647.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, 19. Tadi kan waktu Kuasa Pemohon tanya, katanya ada sejumlah 25 halaman, ya.

1648.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

25 halaman, Pak.

1649.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tapi yang Saudara punya hanya 19?

1650.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Pak.

1651.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

19. Nah, yang tadi ditanya soal halaman yang ga ... 3, 4, 9 itu di halaman berapa itu?

1652.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Saya buka di halaman DPT, Pak, Model A-3 KWK.

1653.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, kalau di situ nomor ... di situ seperti apa, Pak, gambarannya yang 3, 4, 9 ini?

1654.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Kalau ini saya baca atas nama Alfian Noor.

1655.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Atas nama siapa?

1656.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Alfian Noor.

1657.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Alfian Noor. Itu kalau di daftar Bapak itu ditandatangani atau tidak?

1658.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ditaruh di data saya yang DPT pakai stabilo, tidak ada tanda tangan, Bapak.

1659.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, di data yang Saksi miliki tidak ada tanda tangan, ya?

1660.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, tidak ada tanda stabilo.

1661.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Itu selesai pencoblosan di TPS 12 itu jam berapa, Pak?

1662.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Sekitar jam ... selesai ketika dimulainya (suara tidak terdengar jelas), Pak. Setelah itu pukul 12.00 sampai pukul 13.00.

1663.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Untuk DPTb?

1664.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Pak.

1665.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang datang hanya 6 orang, ya?

1666.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Benar, Pak.

1667.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, 6 orang. Jadi, waktu itu semua saksi tanda tangan tidak ada yang mengajukan keberatan, ya?

1668.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Benar.

1669.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tapi Saudara Saksi sendiri tidak menandatangani Model C-2 KWK yang mencatat tentang kejadian khusus?

1670.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak tanda tangan.

1671.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak ada, ya. Oke, saya cukup sekian. Terima kasih.

1672.KETUA: ASWANTO

Cukup. Saudara Saksi, sebelum ke Yang Mulia Pak Suhartoyo. Saudara Saksi (...)

1673.PEMBICARA:

Izin, Majelis.

1674.KETUA: ASWANTO

Apa itu?

1675.PEMBICARA:

Boleh izin menjelaskan sedikit.

1676.KETUA: ASWANTO

Sudah nanti saja.

1677.PEMBICARA:

Siap, Yang Mulia.

1678.KETUA: ASWANTO

Giliran Saudara tadi sudah selesai kan. Saudara Saksi, pada waktu dokumen-dokumen yang ada di dalam kotak suara dikeluarkan itu dikeluarkan dengan cara menumpahkan atau diambil satu per satu?

1679.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Saya tidak ingat, Yang Mulia.

1680.KETUA: ASWANTO

Ditumpahkan?

1681.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Saya tidak ingat, Yang Mulia.

1682.KETUA: ASWANTO

Lho, kan Saudara mengatakan tadi saya buka kotak suara diperlihatkan semua ke para saksi kemudian dikeluarkan isinya. Yang saya tanya bagaimana cara mengeluarkan isinya itu?

1683.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Seingat saya dikeluarkan satu per satu.

1684.KETUA: ASWANTO

Dikeluarkan satu per satu tidak ditumpah?

1685.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak.

1686.KETUA: ASWANTO

Tetapi yang daftar hadir terbang, jalan begitu kan?

1687.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Yang Mulia. Keselip mungkin di antara berkas-berkas yang lain.

1688.KETUA: ASWANTO

Ini kan dikeluarkan, daftar ini, tapi ada yang jalan? Begitu Pak, ya?

1689.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Mungkin terselip di antara berkas yang lain.

1690.KETUA: ASWANTO

Baik. Yang Mulia.

1691.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saudara Saksi, ya. Ketika daftar hadir itu tidak ada kemudian apakah pemilih yang hadir membubuhkan tanda tangan tidak di kertas pengganti maupun di ceklis yang Saudara jadikan rujukan, petugas yang dijadikan rujukan?

1692.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Yang saya ceklis di ... saya tandai (...)

1693.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ditandai sudah dijelaskan tadi. Ada tidak dia tanda tangan?

1694.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak ada.

1695.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada. Menunjukkan kehadiran bukti kehadirannya?

1696.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

(Suara tidak terdengar jelas).

1697.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ketika sudah ketemu pun juga tidak tanda tangan di daftar hadir?

1698.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Telah ditemukan pemilih berikutnya saya gunakan untuk tanda tangan.

1699.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang sudah ketemu daftar hadir yang sebenarnya tanda tangan di situ?

1700.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Yang Mulia.

1701.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang sebelumnya tidak sempat tanda tangan?

1702.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Ya, Yang Mulia.

1703.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saudara bisa menghitung berapa yang hadir ketika sudah ditemukan daftar hadir dengan yang belum?

1704.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Mohon diulang, Yang Mulia.

1705.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jumlah yang sudah terlanjur hadir ketika daftar hadir belum ditemukan itu sudah sekitar berapa? Orang yang hadir ketika belum ada daftar hadir atau belum ditemukan.

1706.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Tidak tahu, Yang Mulia.

1707.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak tahu?

1708.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Kalau saya hitung berdasarkan formulir yang di ... setelah saya hitung sekitar 40 ... mohon maaf. Kalau yang saya hitung itu berdasarkan dari 231 DPT itu saya kurangkan dengan 182 itu mendapatkan hasil 49 orang.

1709.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

49 yang hadir dari hitungan Saudara ini yang sebelum daftar hadir ditemukan?

1710.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Benar.

1711.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, Pak Ketua.

1712.KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Pak Riyan. Pak Riyan sudah bisa mundur.

1713.SAKSI DARI TERMOHON: RIYAN MANGARA SIMANJUNTAK

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

1714.KETUA: ASWANTO

Sekarang kita periksa Ahli Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Kepada Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu.

1715.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Naskahnya sudah diserahkan, Pak Bayu? Naskah keterangannya sudah?

1716.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Sudah, Yang Mulia.

1717.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, baik. Silakan waktunya maksimal 10 menit, Bapak. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ditambahkan. Silakan, Pak!

1718.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi, yang terhormat Pemohon, Termohon, Pihak Terkait yang memberi keterangan. Perkenankan, saya memberikan keterangan terkait penyelesaian perkara hasil pilkada (PHPkada) di Mahkamah Konstitusi. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, mengamanatkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Bagian yang diadakan berdasarkan undang-undang itu mengatakan ... dinyatakan cukup jelas sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penjelasan (suara tidak terdengar jelas) berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk program undang-undangan atas norma tertentu dalam rapat khusus. Dengan demikian, undang-undang pilkada belum (suara tidak terdengar jelas) mengenai makna tafsir frasa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.

Yang kedua, (suara tidak terdengar jelas). Tetapi ini masih perlu diatur lebih lanjut mengenai (suara tidak terdengar jelas). Oleh karenanya, dalam berbagai undang-undang, terbuka peluang (suara tidak terdengar jelas) mengatur mengenai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

1719.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Bayu.

1720.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Ketiga, (suara tidak terdengar jelas) penemuan Pasal 156, 157, dan 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

1721.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Bayu. Bisa dicecilin?

1722.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Tentang tata cara dalam beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Bahwa (audio tidak terdengar jelas) 2020 yang mana mentafsir frasa *perkara perselisihan penetapan perolehan suara akhir hasil pemilihan*. Dalam Pasal 157 Undang-Undang 10 tahun 2016, tidak dijelaskan lebih lanjut. Pasal 8 ayat (3) PMK Nomor 6 tahun 2020 hanya mengatur permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan.

(audio tidak terdengar jelas) mengenai makna atau tafsir frasa *perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan*. Dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat diisi dengan cara interpretasi teks undang-undang. Interpretasi teks undang-undang dilakukan oleh Hakim dan (audio tidak terdengar jelas) yang berhubungan dengan kasus hukum atau peraturan-peraturan hukum seperti jaksa, advokat, maupun praktisi hukum. Akan tetapi, hanya interpretasi Hakim yang kemudian dituangkan dalam putusan dan memiliki kekuatan hukum meningkat.

Ketidakjelasan teks undang-undang yang kemudian harus diinterpretasi dapat menyertai teks tersebut berujung undang-undang terbuka. Sebelum PLPK tahun 2020, perkara PLPK (audio tidak terdengar jelas) di MK pada tahun 2018. Yaitu MK telah memutus PLPK dan sebanyak 72 perkara. (audio tidak terdengar jelas) tapi PLPK tersebut sebagai 2 perkara yang dikabulkan, 6 perkara ditolak, 1 ditarik kembali dari 61 ... 61 perkara tidak dapat diterima dan 2 perkara dinyatakan gugur. Dari ... dari 72 perkara yang PHPkada 2016 yang ditangani oleh MK, terdapat 2 perkara PHPkada yang dikabulkan oleh MK. Yaitu PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten (audio tidak terdengar jelas) Nomor Perkara 35/PHP.BUP-XVI/2018. Dan PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dengan Nomor Perkara 56/PHP.GUB-XVI/2018. Dalam putusan PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Binjai, MK telah memberikan tafsir.

Pertama, Kewenangan MK mengadili PHPkada mengenai putusan Nomor 8/PHPU-XIV/2016 tertanggal 21 Januari 2016, dan dua, syarat pengajuan permohonan yang (audio tidak terdengar jelas) dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 vide Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang muncul dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017. Terhadap tafsir pertama,

dengan kewenangan dalam mengadilinya PHPkada Mahkamah Konstitusi telah menegaskan penggunaannya. Yaitu berdasarkan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 bahwa pemilihan gubernur, bupati, wali kota bukan merupakan rezim pemilihan umum.

Oleh karena itu, maka Kewenangan MK dalam mengadili PHPkada serentak bukanlah kewenangan yang diberikan dari Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar. Melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara semata-mata dimaksudkan untuk (audio tidak terdengar jelas) kekosongan hukum. Dalam timbangan putusan tersebut, dari pertimbangan Putusan MK Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 disebutkan tatkala pemberian kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum (audio tidak terdengar jelas) Kewenangan MK dalam memutuskan PHPkada (audio tidak terdengar jelas) sebagai kewenangan personal Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, sebagai pemenangan ... sebagai pemenangan tambahan, MK tulus (audio tidak terdengar jelas) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dari dasar PHPkada. Dalam hal ini, MK merupakan (audio tidak terdengar jelas) negara yang berkewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Lebih lanjut, kedudukan MK dalam penggunaan keseluruhan proses penyelesaian PHPkada adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya (audio tidak terdengar jelas) masing-masing, yaitu, untuk pelanggaran hasil pemilu, pelanggaran yang meliputi tata cara prosedur dan mekanisme berkaitan dengan hasil pelaksanaan pemilihan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar (audio tidak terdengar jelas) kode etik penyelenggaraan pemilihan diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada ting ... pada tingkatannya masing-masing atas rekomendasi Bawaslu pada tingkatannya masing-masing. Vide Pasal 10, Pasal 135 ayat (1) huruf e, Pasal 139 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Untuk sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antarpeserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dari dikeluarkannya putusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, pemenangan penyelesaian yang ditangani Bawaslu sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Untuk penyelesaian sengketa tata usaha negara yang merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara diselesaikan merupakan milik resmi pengadilan dalam hubungan tata usaha negara seluruh legislatif di Bawaslu provinsi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota telah dilaksanakan.

Untuk tindak kriminal pemilihan yang merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan yang diatur dalam undang-undang. Kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu provinsi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian dalam lingkungan peradilan umum.

Lima. Untuk perselisihan hasil pemilihan, kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu. Yang untuk sementara sebelum terbentuk, kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Keenam. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan, kewenangan dimaksud dalam Pasal 26 diselesaikan oleh DKPP.

Pembentuk undang-undang telah me-assess sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di wilayah perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya hukum dan politik atas sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara. Hasil penghitungan suara diselesaikan yang di bawah dulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang tersedia.

Melalui Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, MK juga telah menyatakan tidak terdapat dasar hukum bagi MK untuk memperluas kewenangannya sendiri, sehingga ke ... kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (...)

1723.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktunya, Pak Bayu (...)

1724.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 MK juga telah menjelaskan bahwa hubungannya dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, MK tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 sebab mengesa ... mengesampingkan Pasal 158 sama halnya dengan menentang putusan dan penilaiannya sendiri sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 58/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juni 2015. Benar sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan Putusan MK Nomor 16/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 MK dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan MK dalam putusan-putusan tersebut.

Bahwa kondisi-kondisi yang dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menurut pertimbangan MK berdasarkan empat pertimbangan putusan MK di atas,

secara garis besar adalah pertama, permasalahan dalam proses pemungutan suara. Kemudian, rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu rekomendasi pengawas pemilihan untuk dilakukan PSU tidak dilaksanakan setelah sebelumnya melalui pembuktian di MK bahwa rekomendasi tersebut beralasan menurut hukum.

Kedua (...)

1725.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktunya sudah habis, Pak!

1726.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Fungsi perolehan suara dimaksud di Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa apa yang diketahui setelah mempertimbangkan laporan hasil PSU berdasarkan putusan sela MK, maka menurut MK, PSU perlu dilakukan dengan alasan kuat, yakni rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan tanpa menyertakan dan menyampaikan hasil penghitungan suara di beberapa wilayah.

Tiga, telah terjadi kejadian atau kejadian luar biasa, force majeure pada saat rekapitulasi yang disebabkan tertundanya penerbitan surat keputusan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, termasuk keadaan hasil keputusan penetapan pasangan calon terpilih, namun keputusan tersebut bukan mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara yang lengkap karena masih ada TPS di beberapa wilayah belum selesai direkapitulasi.

Keempat atau terakhir. Objek permohonan telah menjadi cacat hukum, karena keputusan KPU di daerah tentang pembatalan sebagai calon bupati dan wakil bupati yang menjadi dasar dari keputusan KPU di daerah tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati telah dibatasi dengan putusan KPU yang dipenuhi.

Oleh karena itu, sesungguhnya objek pelanggaran adalah cacat hukum yang nantinya sesungguhnya terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon kepada daerah maupun wakil kepala daerah. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara belum ada. Sehubungan dengan ditetapkannya oleh MK (...)

1727.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah, Pak. Sudah habis, Pak Bayu!

1728.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Keberlakuan ketentuan Pasal 158 dalam empat putusan di atas, maka di luar kondisi-kondisi yang disebutkan dalam empat putusan tersebut sesungguhnya MK tidak dapat melakukan penundaan, pemberlakuan Pasal 158. Artinya MK tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Demikian, apa yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb. Selamat sore.

1729.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb. Sudah lewat waktunya. Baik, dari KPU atau Termohon, ada yang mau ditanyakan ke Ahli Saudara?

1730.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, ya apakah pas makna dari Pasal 157 ayat (3) tentang Penyelesaian Penetapan Hasil Suara.

1731.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hanya satu itu atau ada beberapa sekaligus saja.

1732.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Oke, baik. Kemudian yang berikutnya, apakah Mahkamah dapat mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada?

1733.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1734.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Izin menjawab, Yang Mulia.

1735.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, singkat-singkat saja, Pak Bayu.

1736.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Ya. Mengenai pemaknaan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam periode perundang-undangan seharusnya memang dijelaskan di bagian penjelasan apa yang dimaksud dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Namun kalau kita lihat di Undang-Undang Pilkada bagian penjelasan hanya menyatakan cukup jelas. Sebenarnya ketika melihat peraturan yang menjalankan undang-undang tersebut di PMK Nomor 6 Tahun 2020 ternyata juga tidak dijabarkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan makna penetapan ... perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan tersebut. Dengan demikian, dalam konteks teori perundang-undangan, maka dimungkinkan dilakukan tafsir undang-undang atau interpretasi undang-undang oleh hakim. Karena ketidakjelasan teks undang-undang tidak dapat menghalangi pelaksanaan tugas yang diberikan oleh undang-undang. Dengan melihat kepada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir kita pakai putusan 2018, yaitu Putusan PHPkada Kabupaten Deyai, maka Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir atau interpretasi teks undang-undang khususnya Pasal 57 ayat (3) dimana tafsir dari pasal tersebut artinya MK menyadari bahwa undang-undang telah memberikan mekanisme untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran pemilihan yang ada di dalam praktik dengan berdasarkan pada Undang-Undang Pilkada. Dimana ada pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan dari KPU berdasarkan rekomendasi Bawaslu sengketa peserta pemilihan merupakan kewenangan Bawaslu, penyelesaian sengketa tata usaha negara adalah pengadilan tata usaha negara. Kemudian tindak pidana pemilihan adalah Sentra Gakkumdu dan pengadilan umum. Kemudian yang kelima pelanggaran (audio tidak terdengar jelas) itu menjadi kewenangan DPKK.

Dengan demikian, MK membatasi (audio tidak terdengar jelas) perselisihan hasil pemilihan (...)

1737.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, cukup Pak Bayu.

1738.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157.

1739.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, Pak.

1740.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Dengan demikian, itu adalah tafsir dari Pasal 157 ayat (...)

1741.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Yang 158? Silakan.

1742.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Kemudian yang 158 sebenarnya MK tidak pernah mengesampingkan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada karena frasa yang digunakan MK adalah menunda keberlakuan. Antara mengesampingkan dan menunda keberlakuan adalah 2 frasa hukum yang berbeda. Menunda ... karena menurut MK mereka tidak dapat kemudian mengetahui secara pasti selisih tersebut apabila kemudian MK langsung menerapkan Pasal 158, sehingga ada kondisi-kondisi dari 4 pertimbangan putusan-putusan tadi yang memungkinkan MK untuk menunda, sehingga MK baru bisa menilai keterpenuhan Pasal 158. Jadi, MK jelas tidak bisa mengesampingkan Pasal 158, tapi MK dapat melakukan penundaan keberlakuannya (...)

1743.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1744.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Itu pun dibatasi hanya kondisi-kondisi yang tadi saya sudah sebutkan tidak untuk setiap kondisi yang sesungguhnya sudah diselesaikan oleh mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilihan yang sudah saya sebutkan dalam kaitannya dengan Pasal 157 ayat (3). Demikian, Yang Mulia.

1745.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Cukup. Pihak Terkait ada pertanyaan? Cukup? Kalau lempar-lempar begitu kan enggak siap, Saudara.

1746.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ya, Majelis. Saudara Ahli, ya, pendalaman saya terkait dengan hukum acara MK, Majelis. Hukum acara MK. Apakah terkait dengan hukum acara MK, apakah hukum acara MK itu menurut Ahli bersifat

imperatif wajib ditaati atau hanya sifatnya unfulinrech[sic!]? Ini pelengkap saja. Silakan, Saudara Ahli.

1747.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Bayu, oke. Pak Bayu, coba dijawab itu.

1748.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Baik. Dulu MK sebagai badan peradilan (audio tidak terdengar jelas) kekuasaan kehakiman dalam menjalankan kewenangannya berbasiskan pada hukum acara. Hukum acara yang dalam konteks perselisihan hasil pilkada ini rujukannya adalah Undang-Undang Pilkada karena merupakan kewenangan tambahan MK yang kemudian dijabarkan dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020. PMK Nomor 6 Tahun 2020 ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tentu MK berkewajiban meningkatkan baik yang di Undang-Undang Pilkada maupun di dalam PMK itu sendiri. Demikian, Yang Mulia.

1749.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Cukup, ya?

1750.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Cukup, Majelis.

1751.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari Pemohon 2 pertanyaan juga, ya? Supaya sama dengan yang lain.

1752.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Baik, Yang Mulia. Kepada Saudara Ahli Termohon. Saya sebelum masuk pertanyaan, ya, pertama terkait dengan kajian Bawaslu Kota Banjarmasin. Di halaman 43 kajian Kota Banjarmasin dikatakan 187A ayat (1) undang-undang a quo terpenuhi keterkaitan dengan politik uang 187A. Kemudian, di halaman ... di halaman selanjutnya ada juga terpenuhi juga halaman 45, Ahmad Bayhaki. Terpenuhi unsur, ini kata Bawaslu. Di halaman 41 ini saya sebutkan, saya bacakan. Bahwa berdasarkan kesesuaian fakta-fakta keterangan saksi, ditemukan adanya ajakan untuk memilih, menjanjikan, fakta yang terungkap pemberian dan atau pembagian uang tersebut diawali dengan pengumpulan KTP warga

dengan menjanjikan Rp75.000,00 sampai Rp100.000,00 untuk memilih pasangan Ibnu-Arifin sehingga unsur dengan sengaja dalam Pasal 147A terpenuhi (...)

1753.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, unsur terpenuhi (...)

1754.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Nah (...)

1755.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertanyaan Saudara apa?

1756.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Menurut Ahli, bagaimana restorastice justice ... restorative justice (keadilan yang merestorasi) secara administrasi, walaupun kita tahu ada DKPP, begitu ya, terhadap ranah etik, bagaimana restorative justice menurut pandangan Ahli dalam hal ada persoalan dalam penegakan hukum di Kota Banjarmasin? Itu satu.

Yang kedua, ada Putusan MK 86 ya, ini sebetulnya Saudari Ahli adalah saya tahu sekali ini adalah Ahli peraturan perundang-undangan, Dosen UP, ya, Universitas Pancasila, Doktornya di UI, oke. Yang pertama, MK sudah menyatakan bahwa C-7 itu adalah dokumen yang sangat penting, C-7 itu daftar hadir, dokumen yang sangat penting. Dokumen tersebut menurut MK adalah untuk mengawal kemurnian suara pemilih dan untuk menghindari pemilih memilih lebih dari satu kali.

Yang ke-2, karena C-7 pulalah orang bisa kehilangan hak konstitusionalnya, dimana dia kalau tidak terdaftar dalam C-7 di atas pukul 13.00 menurut MK, dia akan kehilangan hak konstitusionalnya.

Yang ketiga adalah daftar hadir adalah alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan kebenaran pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS setempat di mana konklusinya? Yang ke-5 adalah MK menyatakan di sini adalah sebelum dilakukan, namanya penghitungan suara, dilakukan pencocokan jumlah surat suara dengan daftar hadir yang ada.

1757.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya (...)

1758.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Konklusi MK di sini adalah karena tidak ada daftar hadir pada saat itu dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sigi, pemilu legislatif. Menurut Saudara Ahli, dengan fakta yang ada, jadi kami menemukan ada se ... random sampel, 127 TPS, itu sampel dari 1.119 ... 1.199 TPS, 127 TPS yang sampel kami itu kami hadirkan bukti Mahkamah Konstitusi bahwa (...)

1759.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, pertanyaannya apa? (...)

1760.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Tidak ada daftar hadir. Menurut Ahli, bagaimana mengkonteskan pilkada Kota Banjarmasin yang tidak ada daftar hadir tersebut dengan Putusan MK 86 ini? Begitu, terima kasih.

1761.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, baik. Pak Bayu, dua ya, pertanyaan, restorative justice dan mengkonteskan daftar hadir dengan ... apa ... semacam legalitas daripada penyelenggaraan pemilu di Kota Banjarmasin. Silakan, Pak Bayu!

1762.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin menyapa. Dalam konteks politik hukum yang ada di Undang-Undang Pilkada, tentu saat Undang-Undang dimaksudkan jelas dalam rangka mendata atau menegakkan konsep negara hukum demokratis karena kewenangan pembentukan undang-undang di Pasal 20 Undang-Undang Dasar, itu adalah turunan dari Pasal 1 ayat (3). Maka, sesungguhnya semua norma yang diatur di dalam undang-undang, sepanjang dia juga belum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atau kemudian tidak dilakukan perubahan oleh pembentuknya, maka dia dianggap berlaku. Maka, konsep sebenarnya keadilan itu tidak selalu di luar undang-undang. Pengaturan norma di dalam undang-undang pun itu adalah juga konsep keadilan yang hakiki karena keadilan itu gunanya ketika penegakan hukum, tapi ketika membentuk peraturan perundang-undangan, nilai-nilai keadilan sudah harus masuk. Sehingga pengaturan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa penyelenggaraan yang ada di dalam Undang-Undang Pilkada sesungguhnya juga sudah mengatur ... mengatur konsep keadilan itu sendiri.

Berikutnya, pemberian ... ke-2, terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang disebutkan tadi mengenai formulir, mengenai banyak hal ketika saat proses pemilihan, sebenarnya dalam konteks ini telah diatur penyelesaiannya di dalam Undang-Undang Pilkada dimana memang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum pada Pilkadanya berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Tentu ini semua harus dilalui terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kemudian bisa mengatakan apakah penyelenggara pemilu telah mengabaikan kewajibannya atau tidak. Bagaimana kemudian jika dianggap oleh pihak-pihak tertentu ada yang kemudian ini melanggar dan lain sebagainya. Merupakan hak bagi setiap orang, apalagi oleh yang merasa dirugikan untuk menempuh berbagai mekanisme, selain ke DKPP, kita tentu mekanisme elitis semacam ini bisa jadi kemudian menjadi sarana menyampaikan hal tersebut. Namun, sekali lagi MK dalam berbagai putusannya menjelaskan harus memang bisa dibuktikan bahwa kita ada mekanisme penyelesaian atau tidak ada jalan keluar atas berbagai permasalahan tersebut sebagaimana 4 contoh kejadian dimana MK bisa menunda keberlakuan Pasal 158. Jadi, sekali lagi, saya tergantung bagaimana pembuktian di Mahkamah Konstitusi, apakah hal tersebut meyakinkan atau tidak. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

1763.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, baik, terima kasih. Dari Hakim, ada yang dialami? Cukup? Baik, Pak Bayu, terima kasih keterangannya.

1764.AHLI DARI TERMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Baik, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia.

1765.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, termasuk saksi-saksi juga sudah cukup supaya kita berubah, berpindah ke saksi Pihak Terkait dah Ahli Pihak Terkait. Silakan maju saksinya untuk Pihak Terkait (...)

1766.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Mohon izin, Majelis. Terkait ... Pihak Terkait.

1767.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1768.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Pihak Terkait mohon untuk Ahli untuk di dengar

1769.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Duluan?

1770.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Terlebih dulu.

1771.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ahlinya (...)

1772.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Baru saksi fakta, Yang Mulia.

1773.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Maru, ya?

1774.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ya.

1775.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Kita sepakati, ya, Pak Para Kuasa Hukum nih? Kalau bisa pukul 18.30 WIB kita sudah cukup, ya. Maghrib, lewat Maghrib sedikit. Oke. Jadi nanti saya drive soal waktu tanpa mengurangi esensi, ya.

Pak Maru, selamat sore, Pak. Bapak Maru, Maruarar? Kalau Pak Maru belum siap, Saksinya dulu kita sumpah saja dulu.

1776.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap.

1777.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saksinya Jasman, ya? Mana Jasman? Angkat tangan. Kemudian Mokhammad Noor Fanany. Oke. Agamanya apa ini? Islam semua? Islam semua? Agamanya Islam? Oh, coba dites suaranya, kenapa? Ada mik enggak di situ, mik, pegang, Pak, miknya, Pak. Miknya dipegang. Tetap berdiri, Pak. Berdiri di tempat tadi. Benar berdirinya tempat tadi, Pak. Cuma miknya dipegang ada enggak mik? Enggak ada mik, ya? Oh. Du ... duduk ... anu ... berdirinya sejajar. Coba ... mungkin masih mute, ya. Masih di ... sudah dibuka belum suaranya? Oke. Tirukan saya, ya. Agamanya Islam semua, Pak?

1778.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT:

Ya, Islam.

1779.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Alqurannya diangkat, Pak, di atas kepala salah satu. Baik.
"Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

1780.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT:

Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

1781.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Bapak-Bapak duduk dulu, kita call Pak Maru lagi. Bapak Maruarar sudah siap? Ah, itu, Beliau. Mundurkan dikit, Mas. Mundurkan dikit supaya gambarnya utuh. Stop. Pak Daniel, bisa bantu untuk Beliau?

1782.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih. Pak Maru, ikuti lafal saya, ya.
"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya ... sesuai dengan keahlian saya (...)"

1783.AHLI DARI PIHAK TERKAIT:

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya (...)

1784.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Trouble kayaknya. Bisa dibetulkan itu suaranya? Mungkin di tempat Bapak, Pak Maru. Hang kayaknya. Ya. Jaringannya hang. Ya. Pak Maru, barangkali ada gangguan di situ? Atau bagian IT di situ? Mungkin ke Saksi dulu, ya. Nanti Pak Maru setiap saat bisa kita cut kalau memang sudah normal, ya.

Saksi, Pak Jasman, mau menjelaskan apa, Pihak Terkait, Kuasa Hukumnya?

1785.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ya. Saksi Pak Jasman ini adalah saksi fakta dan merupakan saksi mandat pada saat Pleno di tingkat PPK.

1786.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Langsung saja. Waktunya 5 menit untuk Saksi Saudara. Untuk Jasman 5 menit, untuk Mokhammad Noor nanti 5 menit juga.

1787.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap. Saudara Saksi, apakah mendengar suara saya?

1788.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Ya.

1789.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Saudara Saksi, apakah Saudara membawa surat mandat pada saat Pleno di PPK?

1790.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Membawa.

1791.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Dari Paslon mana mandatnya?

1792.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Dari tim kampanye Pasangan Calon Ibnu Sina - Arifin

1793.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oke. Saudara Saksi, ada berapa kelurahan di tempat ... di ... di kecamatan Saudara menjadi Saksi?

1794.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Saya didekasikan untuk Saksi di Banjarmasin Utara karena itu ada 10 kelurahan.

1795.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Jumlah TPS-nya, Saudara Saksi ingat?

1796.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

256 TPS.

1797.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oke. Saudara Saksi, bisa Saudara ... ini ... pleno di PPK itu bagaimana? Apakah per-TPS, apakah per kelurahan atau satu kecamatan atau bagaimana? Mungkin coba Saudara jelaskan, bisa Saudara jelaskan terkait dengan pelaksanaan?

1798.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Pada saat rekapitulasi di daerah kecamatan itu dibagi 3 ruangan.

1799.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

3 ruangan, lanjutnya? Mungkin ada lagi?

1800.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Jadi, setiap satu ruangan itu satu kelurahan karena di saat yang bersamaan.

1801.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oh, begitu. Berarti saat pleno ... berarti Saudara Saksi ini paslon tim ... tim kampanye Paslon Ibnu Sina, tidak mengirimkan? Hanya Saudara Saksi ya, sendiri untuk di PPK Banjarmasin Utara tadi?

1802.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Untuk saksi mandat itu ada 3 orang. Dari teman kita, ada 3 orang, jadi ... karena pada saat ... pada saat yang bersamaan, masing-masing masuk ruangan.

1803.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap, kalau terkait dengan paslon lain, Saudara Saksi tahu ada saksinya atau bagaimana?

1804.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Dari pasangan calon itu hampir hadir semua saksinya.

1805.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oke. Jadi, seluruh paslon dari 4 paslon ya, di pilkada Kota Banjarmasin itu menghadirkan saksi ya, untuk di PPK?

1806.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Ya, benar.

1807.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap. Apakah ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi paslon?

1808.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Pada saat berlangsungnya rekapitulasi di kecamatan itu tidak ada kejadian khusus atau catatan khusus. Berjalan dengan lancar.

1809.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap. Tanda tangan seluruhnya di dalam D.Hasil Kecamatan?

1810.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Ya, tanda tangan.

1811.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Mungkin cukup, Yang Mulia.

1812.KETUA: ASWANTO

Cukup ya? Baik. Sekarang Pemohon. Silakan!

1813.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Baik.

1814.KETUA: ASWANTO

Maksimal 5 menit untuk satu saksi.

1815.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Saudara Saksi mengetahui berapa jumlah yang hadir di TPS 7 Sungai Jinggah?

1816.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Lupa, Yang Mulia.

1817.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

TPS 3 Pangeran, tahu berapa jumlah yang hadir?

1818.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Lupa juga, Yang Mulia.

1819.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Surgi Mukti 19, berapa yang hadir? Ya, ini di Banjarmasin Utara semua.

1820.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Karena pada saat itu mungkin teman saya yang masuk di ruangan itu, Yang Mulia.

1821.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Oke. Apakah Saudara Saksi mengetahui ada 80 TPS di Banjarmasin Utara tidak sesuai antara C-1 dengan daftar hadir?

1822.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Tidak tahu, Yang Mulia.

1823.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Oke, baik. Terima kasih.

1824.KETUA: ASWANTO

Cukup? Baik. Dari Termohon?

1825.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi, ya. Apakah Saksi tahu bahwa di Kecamatan Banjarmasin Utara itu ada ... ada pelaporan tentang pilkada ini ke Bawaslu?

1826.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Tidak tahu, Yang Mulia.

1827.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Tidak tahu. Cukup, Yang Mulia.

1828.KETUA: ASWANTO

Saksi, Saksi yang atas nama ... mana namanya ini ... Mokhamad Noor Fanany. Apa yang Saudara mau jelaskan?

1829.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Saya ditugaskan oleh pasangan 02 Ibnu Sina-Arifin, dengan mandat untuk menjadi saksi Kecamatan Banjarmasin Barat.

1830.KETUA: ASWANTO

Saksi mandat di tingkat kecamatan?

1831.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Ya, PPK di tingkat kecamatan Banjarmasin Barat.

1832.KETUA: ASWANTO

Baik, baik, silakan Pihak Terkait, apa yang Anda mau dalam dari saksi Saudara?

1833.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ya, terima kasih. Saudara Saksi. Saudara Saksi kan, saksi mandat tadi, ya? Di dalam surat mandat tadi ada beberapa ... ada berapa nama?

1834.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Ada 3 nama.

1835.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ada 3 nama, ya? Ada 3 orang yang jadi saksi mandat gitu ya, maksudnya?

1836.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Ya, 3 orang.

1837.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oke. Saudara Saksi tahu alasan kenapa jadi 3 nama itu diberikan di ... ini kan ... dalam satu surat mandat?

1838.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Karena memang pasangan Ibnu Sina-Arifin didukung oleh 3 partai sehingga saksi itu mewakili masing-masing partai pendukung pasangan Ibnu Sina-Arifin.

1839.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oke. Saudara Saksi, ya, apakah ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi-saksi paslon yang lain dalam satu PPK?

1840.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Selama rekapitulasi hasil di Kecamatan Banjarmasin Barat, setahu kami tidak ada catatan khusus karena di akhir penghitungan telah menandatangani Berita Acara rapat pleno.

1841.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Apakah seluruh pas ... saksi dari seluruh paslon itu hadir?

1842.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Ya, hadir.

1843.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Tanda tangan, ya?

1844.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Ya, tanda tangan semua.

1845.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Apakah Saudara Saksi membawa data sanding ya istilahnya itu hasil TPS pada saat hadir di (...)

1846.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Ya, memang kami semua saksi mandat itu dibekali form C-1 di mana hasil C-1 itu memang untuk menyandingkan data dan perhitungan pleno di kecamatan.

1847.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oke, terkait saksi paslon lain, Saudara Saksi mengetahui apakah mereka juga membawa data sanding seperti yang Saudara Saksi dapatkan dari tim kampanye?

1848.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Saya tidak melihat, cuma memang mereka ada mencatat-mencatat, cuma saya tidak melihat ada ... ada sebagian yang membawa, ada sebagian yang tidak.

1849.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Saudara Saksi ... Saudara Saksi kan tadi kan membawa C-1 tadi, ya?

1850.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Ya.

1851.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Itu diberikan oleh tim pemenangan. Saudara Saksi ikut mengumpulkan C-1 tadi atau cuma dikasih ... dikasih dari tim kampanye untuk ini tadi?

1852.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Tidak, saya cuma menerima dari tim pemenangan di posko pemenangan Pasangan Ibnu-Sina.

1853.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oke, Saudara Saksi tahu detail isi C-1 tadi?

1854.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Sebagian ada saya baca, cuma karena banyak ada sekitar 20 ... 253 TPS, ini saya tidak ... tidak membaca keseluruhan.

1855.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Penegasan saja. Berarti di Banjarmasin Barat itu ada 253 TPS ya, 1 kecamatan?

1856.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Ya, betul. 253 TPS.

1857.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Berapa kelurahan total, Saksi?

1858.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

9 kelurahan.

1859.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Oke, cukup, Majelis.

1860.KETUA: ASWANTO

Cukup, ya. Baik, terima kasih. Dari Pemohon.

1861.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Saudara Saksi, apakah Saudara Saksi mengetahui TPS 12 Teluk Tiram yang hadir di dalam daftar hadir berjumlah 182, sedangkan C-1 berjumlah 237?

1862.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Kebetulan saya tidak masuk di Kelurahan Teluk Tiram, jadi saya tidak tahu.

1863.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Oke. Saudara Saksi, apakah Saudara Saksi mengetahui TPS 11 Belitung Selatan atas nama Nur Farida pemilih itu merupakan penduduk Hulo Sungai Tengah tetapi diberikan hak pemilih di Kota Banjarmasin ... Walikota Banjarmasin? Atas nama Nur Farida, tahu?

1864.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Tidak tahu.

1865.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Oke.

1866.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Kan bukan saya yang ke sana.

1867.KETUA: ASWANTO

Dia tidak tahu karena dia ini kan saksi di PPK saja, tidak di TPS. Silakan!

1868.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Apakah Saudara Saksi mengetahui berapa jumlah data pemilih tambahan di Belitung Selatan 11?

1869.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Tidak tahu.

1870.KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

1871.KETUA: ASWANTO

Cukup, ya?

1872.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Cukup.

1873.KETUA: ASWANTO

Sekarang Pihak Termohon, ada yang mau didalami? Silakan.

1874.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Baik. Saudara Saksi, ya. Pada saat pembacaan rekapitulasi di PPK ya. Penghitungan di PPK, masih ingat tanggal berapa itu?

1875.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Tanggal 11 sampai dengan tanggal 13.

1876.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Untuk Saudara di tempat Saudara, PPK Banjar Barat ini tanggal berapa?

1877.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Saya memang 3 hari cuma bergantian.

1878.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Oh bergantian, ya. Cukup, Yang Mulia.

1879.KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sekarang kita dari Hakim, ada yang mau didalami, Yang Mulia? Silakan.

1880.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, Saksi Jasman.

1881.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Siap, Yang Mulia.

1882.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Saksi Jasman adalah Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 2 di tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara.

1883.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Ya.

1884.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Apakah ... selain di tingkat kecamatan, Saudara Saksi juga mendapat mandat di ... atau jadi saksi di tingkat TPS?

1885.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Tidak, Yang Mulia.

1886.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak, ya. Jadi hanya di tingkat kecamatan?

1887.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Ya, betul.

1888.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Pada waktu itu, apakah tahu kalau ada yang mengajukan keberatan pada saat (...)

1889.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Tidak ada, Yang Mulia.

1890.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak ada, ya. Semua pasangan calon hadir, ya?

1891.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JASMAN

Ya.

1892.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Saksinya, maksudnya saksi pasangan calonnya hadir. Oke, terima kasih. Yang kedua, Saudara Mokhamad Noor Fanany.

1893.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Ya, Yang Mulia.

1894.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Apakah Saudara selain saksi mandat di tingkat kecamatan, apakah juga menjadi saksi, misalnya di TPS?

1895.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Tidak, Yang Mulia.

1896.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak. Jadi hanya di tingkat kecamatan, ya?

1897.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Ya.

1898.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Tadi soal jumlah saksi, Saudara tahu semua pasangan calon hadir?

1899.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Hadir.

1900.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Hadir, ya. Tadi yang dikatakan ada 3 partai pendukung sehingga menghadirkan saksi-saksinya, ada sak ... ada 3, ya? Maksudnya apa itu?

1901.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Semua partai mengirimkan saksi-saksinya ketua partai pendukung Pasangan Ibnu-Sina karena memang jumlah kelurahannya lumayan banyak (suara tidak terdengar jelas), jadi bergantian karena dianggap kalau satu orang takutnya tidak ... tidak apa ... tidak mampu yang mewakili ... jadi setiap partai pada saat mengirimkan Saksi yang dipilih di kecamatan.

1902.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi sementara itu hadir dari tanggal 11 sampai 13 atau hanya 1 hari dari 3 hari itu?

1903.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Hadir 3 hari cuma bergantian kadang saya terkena pagi ya jadi kena malam.

1904.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh jadi Saudara hadir 3 hari tetapi bergantian.

1905.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Ya.

1906.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Pada waktu itu apakah waktu ketika Saudara hadir saat rekapitulasi ditingkat kecamatan apakah ada Saudara tahu misalnya ada dari Pasangan Calon yang keberatan terhadap rekapitulasi itu?

1907.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Yang di ruangan saya itu tidak ada yang keberatan Yang Mulia.

1908.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak ada ya? Pada waktu Saudara masuk bergantian itu tidak ada ya?

1909.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOKHAMAD NOOR FANANY

Ya.

1910.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, saya cukup Terima kasih.

1911.KETUA: ASWANTO

Baik dari, dari saya juga cukup silakan cukup dilanjutkan lagi Ahli.

1912.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, para Saksi. Kita hubungi sekarang Pak Maru, Pak Maruarar, Bapak Maruarar sudah ... Pak Maruarar.

1913.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Sudah siap Pak.

1914.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Tadi (...)

1915.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Tadi low internetnya.

1916.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tadi sumpahnya macet ya. Terkendala, diulang lagi Bapak supaya lebih afdol.

1917.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Ya.

1918.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Daniel mungkin bisa membantu.

1919.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Siap.

1920.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih diulangi ya Pak Maru karena tadi putus.

1921.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Ya, siap.

1922.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

1923.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

1924.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia.

1925.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Silakan Bapak maksimal 10 menit nanti ditambah kalau ada yang perlu dijelaskan dari para pihak.

1926.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Terima kasih, Pak Ketua dan Bapak-Bapak Majelis Hakim Yang Mulia. Saya karena usia barang kali, saya akan menyampaikan singkat saja, Pak Ketua, tapi yang tertulis saya sudah ajukan melalui Kuasa daripada Pihak Terkait. Tetapi yang ide seperti halnya saya telah kemukakan bagi seorang incumbent yang tidak terlalu buruk prestasinya

selama 5 tahun, dia memiliki keunggulan betul untuk tampil di dalam satu kontestasi pilkada secara alamiah, dan tampilannya (visibility), pengalaman maupun waktu dalam 5 tahun itu cukup berada dia di depan lebih lama dan jauh lebih lama daripada pasangan-pasangan calon yang lain yang maju. Oleh karena itu, menurut saya di dalam melihat sesuatu persoalan di dalam selisih angka di dalam pilkada dalam kontestasi yang sedemikian, maka adalah sesuatu hal yang wajar menurut saya kalau tampilnya seorang incumbent, dia akan menjadi unggul juga di dalam perolehan suara apabila misalnya dia boleh menunjukkan kinerja, karya dan juga dalam soal moralitasnya, dia tidak mendapatkan suatu kritikan yang keras pertama sekali juga bahwa seorang incumbent itu tidak memiliki catatan yang buruk di dalam soal keuangan misalnya di dalam apa yang dikatakan korup begitu.

Oleh karena itu, di dalam beberapa hal dan kebanyakan di dalam permohonan yang menyangkut lawan atau Pihak Terkait incumbent selalu karena suara yang sangat boleh dikatakan signifikan perbedaannya dan bahkan kebanyakan juga telah melampaui suatu threshold yang jadi suatu landasan kewenangan. Maka biasanya juga Pemohon itu mendalilkan pelanggaran yang sifatnya TSM yang boleh dilihat secara terstruktur dan kemudian dengan sistematis dan masif. Dan beberapa kali kami kemukakan di dalam hal seperti ini bahwa TSM itu dalam jurisprudensi di Mahkamah Konstitusi meskipun sudah ada perubahan kemudian dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru Undang-Undang 10 Tahun 2016 bahwa ketika aspek daripada TSM itu harus merupakan suatu hal yang dibuktikan secara kumulatif artinya setiap (ucapan tidak terdengar jelas) itu harus bisa terbukti sehingga boleh dikatakan bahwa pelanggaran TSM itu terbukti adanya sehingga boleh ada langkah-langkah yang drastis di dalam sifat daripada pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, di dalam melihat ini apa yang tersaji sebenarnya dihadapan kita angka-angka perolehan menurut hasil penghitungan KPU, menurut saya apa yang dikatakan unsur masif seandainya itu ada unsur karena ini ada pembuktian terhadap TSM itu, maka hasil yang diperoleh diantara Pasangan Calon tidak dapat dikatakan diperoleh oleh Pihak Terkait sedemikian rupa masifnya sehingga ada suatu korelasi antara unsur M daripada masif itu terhadap pelanggaran TSM yang memang dimaksudkan untuk boleh misalnya secara mutlak angka-angka perolehan suara dari para pemilih. Oleh karena itu, menurut saya pembuktian terhadap itu terlepas daripada pembagian kewenangan yang sudah ada di dalam undang-undang pemilukada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memang bahwa meskipun Bawaslu memiliki satu kewenangan yang sudah diberikan kepada mereka untuk memeriksa dan memutus sengketa pemilukada dalam pelanggaran administrasi pemilihan itu, tetapi juga boleh dikatakan kalau ada satu unsur-unsur atau aspek pelanggaran konstitusi yang dilakukan di dalam proses

pemutusan atau pemeriksaan dan putusan Bawaslu, saya berpendapat itu tetap saja ketika sudah masuk di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bekerja dengan paradigma konstitusi senantiasa mereka atau (suara tidak terdengar jelas) boleh memeriksa dan menguji apakah ada pelanggaran konstitusi terjadi.

Oleh karena itu, menurut saya sepanjang apa yang tersaji oleh Pemohon dan juga bukti-bukti dari yang saya boleh lihat dari KPU dalam jawabannya, maka saya tidak melihat aspek terjadi mau unsur pelanggaran TSM boleh dikatakan terbukti, sehingga saya berpendapat sebenarnya wajar saja seorang incumbent yang tidak memiliki karakter yang berlawanan dengan harapan atau ekspektasi masyarakat pemilih atau boleh menduduki jabatan itu untuk kedua kali.

Oleh karena itu, seorang incumbent yang tidak buruk prilakunya sebenarnya menyebabkan pasangan-pasangan calon yang ikut kontestasi harus memikirkan secara mendalam potensi atau apa yang akan terjadi ke depan kalau seorang incumbent adalah seorang yang tidak terlalu buruk.

Demikian yang bisa saya ajukan, Yang Mulia. Terima kasih.

1927.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Dari Pihak Terkait, ada pertanyaan?

1928.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Izin, Majelis. Untuk kami memberikan kesempatan kepada tim daring untuk melakukan pendalaman kepada ahli yang (...)

1929.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa yang akan ditunjuk?

1930.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ada di tim (...)

1931.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana? Komisioner (...)

1932.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Tim daring, tim daring.

1933.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada yang mau ditanyakan dari tim penasihat hukum yang ada di ... tim kuasa hukum yang ada di online atau di ... lewar daring? Ada yang ditanyakan, Pak?

1934.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Mohon izin. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Ahli mengajukan pertanyaan satu saja.

Apakah ada teori yang dapat dikorelasikan antara kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk berpihak kepada kebutuhan masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk keuntungan kampanye secara pribadi? Itu saja, terima kasih.

1935.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa menangkap Pak Maru pertanyaannya?

1936.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira, kalau kebijakan-kebijakan itu ada dalam kerangka apa yang dikatakan kewenangan pemerintahan daerah, yaitu pemerintah dalam hal ini kepala daerah bersama dengan DPRD, tentu saja kebijakan semacam itu adalah merupakan sesuatu ketika mendapat persetujuan DPR itu adalah merupakan kehendak rakyat. Oleh karena itu, seandainya pun misalnya bahwa langkah-langkah yang diberikan oleh seorang kepala daerah yang kebetulan incumbent itu merupakan suatu hal yang menguntungkan kemudian terjadi di dalam proses penyelenggaraan pemilukada, kita tidak bisa mengatakan itu adalah sesuatu yang melaanggar aturan karena menjadi tugas daripada seorang kepala daerah, kalau kita perhatikan itu tugasnya adalah menyelenggarakan permintaan yang membawa ... kalau di dalam konstitusi dikatakan memajukan kesejahteraan lain.

Jadi, saya pikir tidak sesuatu hal, kecuali kalau DPR misalnya menolak pemuatan suatu program tertentu di dalam APBD dan yang ditentukan dengan perda, tetapi kemudian secara berdiri sendiri seorang bupati yang menjadi pasangan calon menjalankan program itu di dalam kerangka atau di dalam waktu ketika terjadinya penyelenggara pemilihan

sebelum atau sesudah ... sebelum atau pada saat akan dilakukan pemungutan suara itu baru boleh kita katakan bahwa itu merupakan pelanggaran. Itu merupakan pandangan saya. Terima kasih.

1937.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Dari Kuasa Hukum Pemohon, ada pertanyaan?

1938.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Izin, Majelis, menambahkan lagi 1 pertanyaan.

1939.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tadi kan dilimpahkan hanya itu saja. Oke, satu pertanyaan jadi nanti dua-dua, maksimal.

1940.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Saudara Ahli, ya. Terkait dengan PMK Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang diatur di dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020. Jadi, kan (...)

1941.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Bisa lebih jelas, Pak?

1942.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ya, terkait dengan hukum acara yang diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020. Jadi kan Pemohon bisa mengajukan permohonan terkait dengan PHP Kada itu kan 3 hari sejak rekapitulasi dilaksanakan paling lambat. Habis itu dilakukan perbaikan ... Pemohon bisa melakukan perbaikan 3 hari setelah AP3 diterbitkan.

1943.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertanyannya apa?

1944.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Pertanyaannya kan dalam Perkara 21/PHP.KOT-XIX/2021 ini kan ada pembacaan permohonan saat ... yang berbeda di dalam E-BPRK

pada saat permohonan dibacakan. Nah, menurut Ahli bagaimana terkait dengan legalitas tenggat waktu permohonan tersebut?

1945.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini kan ada dua hal yang berbeda. Kalau tenggang waktu, tenggang waktu tidak menyinggung substansi. Anda mencampuradukan pertanyaan Saudara itu bagaimana penilaian Ahli soal bacaan yang ada di dalam persidangan ini yang ada penambahan-penambahan di luar teks yang diserahkan, tetapi di sisi lain Saudara maunya apa? Tenggang waktunya ataukah substansi yang terlambat itu menurut Saudara?

1946.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ya, mungkin substansi karena kan bahan yang disampaikan itu di tanggal yang sama.

1947.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, substansi yang tidak sesuai dengan permohonan yang ada?

1948.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ya.

1949.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu, Pak Maru, mungkin bisa dijawab.

1950.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Saya kira kalau misalnya permohonan sudah dimasuk itu tenggat 3 hari sudah pengumuman KPU, maka kemudian setelah didaftarkan kemudian diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan perbaikan itu merupakan sesuatu hal yang berada di dalam kerangka waktu yang diberikan oleh MK, tetapi di luar itu menurut hemat saya ketika kemudian permohonan berubah itu tidak dapat ... enggak begini katakan sebagai satu kerangka yang diberikan oleh MK dan hemat saya bisa meluaskan tenggat waktu itu apakah itu permohonan lama atau permohonan baru. Oleh karena itu, menurut saya hukum acara ini tegas ketika misalnya dikatakan 3 hari perbaikan itu menjadi suatu kunci untuk menentukan yang mana di antara permohonan itu dengan perbaikan itu yang akan

diterima sebagai permohonan yang diajukan secara sah di Mahkamah Konstitusi. Di luar itu tentu itu merupakan perubahan-perubahan yang menurut saya, ya, sepertinya kalau di dalam main bola telah melewati garis dan tentu saja outdoor. Demikian juga menurut saya di dalam hukum acara dalam pemeriksaan sengketa pemilihan kepala daerah seperti ini ketika sudah ada suatu batas waktu yang diberikan kemudian dilampaui menurut saya kita harus melihatnya dari sudut permohonan yang diperbaiki ketika kesempatan itu ada di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Saya melihatnya demikian itu perbaikan yang di luar jangka waktu yang ditetapkan itu adalah substansi yang menurut saya tidak dipertimbangkan. Terima kasih, Pak.

1951.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, dari Kuasa Hukum Pemohon, dua pertanyaan sekaligus.

1952.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak. Saya akan memulai dengan preambule dulu. Ahli tadi mengatakan bahwa seorang incumbent itu punya keunggulan, tapi dia juga Saudara Ahli punya masalah besar ketika dia menggunakan otoritas-otoritas yang dimilikinya untuk mempengaruhi ASN yang ada di dalam otoritasnya. Dia juga menggunakan program-program untuk kepentingannya dia melalui Covid, bantuan sosial, dan ini ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri dan ada pernyataan dari KPK. Jadi seorang petahana juga potensial melakukan kejahatan-kejahatan melalui tadi, ya. Satu misalnya menggunakan otoritas-otoritasnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan walaupun sebenarnya tadi katanya performance-nya agak baik, tapi dia masuk dalam jebakan itu. Dan yang ketiga, dia juga punya kepentingan untuk membangun conflict of interest karena APBD-APBD nya itu kemudian bisa mempengaruhi lembaga-lembaga penyelenggara. Jadi ada 3 masalah itu, Pak Maru.

Saya akan mulai dari situ, Pak Ahli. Kalau kemudian ada fakta, ada fakta PDAM yang jumlahnya 110.000 anggotanya, 179.000 anggotanya pada bulan Agustus itu dinaikkan 2020, ya ... 2017 ketika masanya itu dinaikkan hampir dua kali lipat, tapi satu bulan sebelum atau menjelang penetapan sebagai calon itu diturunkan. Nah, PDAM itu sendiri adalah BUMD Saudara Ahli ketika dilacak kewenangan-kewenangan BUMD itu ternyata di dalam aturan itu hak, kewajiban, dan kewenangannya tidak menentukan bahwa BUMD ini punya kewenangan menentukan tarif, karena apa? Majority share holder-nya itu ada di kepala daerah. Jadi ada politik penentuan tarif yang ditentukan oleh kepala daerah. Nah, kepala daerah potensial dalam posisi itu menggunakan otoritasnya untuk kepentingan dirinya dan itu kemudian bisa masuk Pasal 71 ayat (3) karena dia menggunakan citra dirinya

untuk kepentingan dirinya, menggunakan program, dan macam-macam seperti itu.

Nah, dalam pandangan Saksi, jika ada fakta seperti itu, itu contoh pertamanya.

1953.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pandangan Ahli, Pak.

1954.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Pandangan Ahli. Dalam pandangan Ahli dalam contoh seperti itu, ini baru satu Pak Maru, contohnya. Contoh yang kedua adalah ASN dipotong 2,5% dan kemudian 2,5% nya itu dibelikan masker, maskernya itu adalah judulnya Banjarmasin Baiman. Nah, Baiman itu sendiri adalah program yang asosiasinya dengan program calon. Jadi, dia menggunakan ... diduga menggunakan citra dirinya memotong 2,5% untuk kepentingan, padahal itu pencalonan, padahal dia Petahana. Nah, itu bagaimana soalnya? Itu pertanyaan pertama.

Pertanyaan kedua adalah dalam hukum acara perdata, itu jelas sekali. Sebuah gugatan ya, itu masih bisa diubah sebelum ada jawaban dan itu berlaku umum. Ada ... ada seperti itu. Dan kedua, pada periode Ahli pada saat menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi atau Hakim Konstitusi, itu banyak sekali putusan-putusan yang bersifat ultra petita. Kenapa? Karena ingin menjawab rasa keadilan. Kenapa begitu? Karena dalam asas pemilu itu ada jujur, adil. Dan ada tambah satu lagi, Ahli, yang disebut dengan demokratis. Jadi, kerangka hukum acara itu harus diletakkan untuk meletakkan rasa keadilan yang hakiki itu.

Nah, ini juga yang menjadi problem yang menurut saya menarik dan MK terus-menerus berikhtiar dan berupaya untuk mewujudkan dan mendekatkan rasa keadilan itu, sehingga hukum acaranya dipakai sebenarnya juga untuk membangun rasa keadilan itu. Mohon jawaban dari Ahli.

1955.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak Maru. Singkat, jelas.

1956.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Ya, saya kira akan saya jawab dulu yang terakhir bahwa bagaimana ultra petita pada masa-masa awal daripada MK itu. Saya ingin tegaskan, pada saat itu satu kewenangan itu terbuka karena tidak ada pembatasan seperti yang telah ditentukan dalam tenggat waktu perbaikan itu, sehingga itu saya kira terbuka semua. Tetapi yang kedua mengenai masalah yang pertama tadi, adanya suatu masalah-masalah

penyalahgunaan kewenangan, saya kira itu memang masalah fakta, tetapi secara prosedur, undang-undang yang baru dari undang-undang pemilukada, kewenangan Bawaslu harus menjadi suatu persoalan pertama bahwa kewenangan itu menjadi kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus apa yang menjadi pelanggaran TSM yang dikatakan itu, dan seandainya pihak yang melaporkan adanya suatu pelanggaran TSM itu tidak sepakat dengan putusan Bawaslu, bisa diangkat kepada suatu tingkat di Bawaslu, di tingkat pusat. Tetapi, kita juga berpendapat, saya juga melihat itu, ketika ada suatu res judicata yang sepertinya bisa kita lihat suatu peradilan yang khusus itu Bawaslu itu, maka ketika putusnya itu di dalam sengketa ketika dibawa ke MK, ada suatu pelanggaran-pelanggaran konstitusi seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi, itu adalah menjadi wewenang MK untuk melihatnya. Tetapi, masalah pembuktian-pembuktian ini adalah suatu pembuktian kalau saya bisa mengatakan sebagai putusan dasar putusan Mahkamah Konstitusi adalah keyakinan, kalau boleh saya mengatakan (suara tidak terdengar jelas), mereka harus mendapatkan suatu informasi dan data yang cukup di dalam standar pembuktian yang bisa ... yang telah diatur di dalam Undang-Undang MK Nomor 36 dan undang-undang yang lain.

Saya kira ini pendapat saya, Pak Bambang. Terima kasih.

1957.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ada ... ada yang ... Ahli, mohon maaf, Pak. Bukan menambahkan, Pak. Ada isu begini, Pak Maru, tadi Pak Ketua, ada isu conflict of interest dan kompetensi yang ada di Bawaslu itu Pak. Ada ... ada persoalan itu juga. Jadi kalau itu diserahkan semuanya (...)

1958.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Pihak Terkait, Majelis? Pihak Terkait keberatan.

1959.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Kalau itu diserahkan seluruhnya kepada Bawaslu (...)

1960.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kita ... kita dengarkan dulu, ini bagian dari tambahan pertanyaan atau apa masih (...)

1961.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, ini jadi saya tadi mengatakan ada mekanisme (...)

1962.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1963.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Tapi mekanisme itu punya problem, ada soal inkompetensi di situ, Pak. Ada problem mengenai conflict of interest karena otoritas itu, Pak.

1964.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak.

1965.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Nah, jadi mekanisme dibuat tapi ketika ada soal seperti itu, how to settle the problem-nya?

1966.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak Maru. Dijawab, Pak Maru? Bagaimana? Masih ... silakan.

1967.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Ya, kalau sudah saat ini masuk ke MK, biarlah MK yang menilai, apakah masalah conflict of interest itu ada? Tetapi dengan alat bukti yang menurut saya, dan standar atau paradigma konstitusi. Kalau misalnya dikatakan seperti Mas Bambang bisa dibuktikan itu, tapi persoalannya putusan Bawaslu belum ada, apakah itu keharusan atau bukan? Apakah membawa ini masalah ke MK melampaui kewenangan Bawaslu sedemikian rupa itu merupakan menjadi hal yang dapat secara langsung diterima oleh MK, saya ... saya kira ini pertimbangan daripada Mahkamah Konstitusi.

1968.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, cukup Bapak. Terima kasih.

1969.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Baik, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih.

1970.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari Kuasa Termohon, ada?

1971.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Cukup.

1972.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, baik. Dari Hakim? Cukup. Baik, Bapak Prof. Maru, terima kasih, keterangannya.

1973.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Terima kasih, Pak. Saya mohon diri, Pak, ya.

1974.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, Bapak. Terima kasih.

1975.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Terima kasih.

1976.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, sudah menunggu cukup lama. Saksi-saksi juga sudah boleh. Kita lanjutkan mendengarkan terakhir untuk Bawaslu, ya. Dan ini sah ... kami tegaskan kepada semua kuasa hukum bahwa keterangan Bawaslu hanya untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi jadi nanti tidak ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan maupun pernyataan dari para pihak. Bapak-bapak tadi da ... di samping yang jawaban yang sudah diberikan ke sidang yang dulu ... ini, kan ada perkembangan yang signifikan hari ini.

Yang pertama, dari kesaksian Pemohon-pemohon tadi, kok, eh ... kok Pemohon-Pemohon ... Saksi-saksi dari Pemohon tadi yang berkaitan dengan ada money politics, kemudian keterlibatan ASN, kemudian ada berapa ratusan bahkan lebih soal pengumpulan KTP-KTP. Bagaimana sesungguhnya untuk 3 cluster yang saya tanyakan tadi selama ini ada laporan tidak selain yang kaitan dengan Pasal 71 ayat (3) yang sudah dilaporkan melalui keterangan yang lu ... dal ... lalu. Sekarang ditambahkan yang itu dulu, Pak 3 ... 3 kaitan yang saya tanyakan tadi.

1977.BAWASLU: MASTAWAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada dasarnya Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan penanganan pelanggaran yang mana dugaan pelanggaran itu dilaporkan oleh Ibu Hj. Ananda dan sebagai terlapor adalah Bapak Ibnu Sina dan Arifin Noor pada tanggal 11 Januari 2021. Ke Bawaslu (...)

1978.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tanggal berapa, Pak?

1979.BAWASLU: MASTAWAN

Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Yang Mulia.

1980.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Januari, ya itu, ya?

1981.BAWASLU: MASTAWAN

Ya. 11 Januari 2021, Yang Mulia.

1982.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa ini sika anu ... Bawaslu melakukan apa?

1983.BAWASLU: MASTAWAN

Jadi, di laporan tersebut ada 2 hal yaitu dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang dimaksud adalah pasal yang dilanggar adalah Pasal 71 ayat (3), ayat (5) undang-undang pemilihan sebagaimana dirubah di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020. Kemudian dugaan pelanggaran pidana pemilihan.

1984.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pidana pemilihan.

1985.BAWASLU: MASTAWAN

Ya. Dengan (...)

1986.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau ... sebentar ini mumung Bapak cerita soal laporan terkini yang Januari. Kalau yang ada beberapa ... ada banyak apa ... temuan-temuan yang ada di grup Whatsapp di HP kemudian ada juga gambar dan video-nya itu termasuk yang ini bukan?

1987.BAWASLU: MASTAWAN

Termasuk, Yang Mulia.

1988.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Termasuk, ya.

1989.BAWASLU: MASTAWAN

Nggih.

1990.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, lanjutkan.

1991.BAWASLU: MASTAWAN

Tadi di samping pelanggaran administrasi juga ada pelanggaran ... dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Yang ... pasal yang diduga dilanggar adalah Pasal 73 juncto Pasal 187 A undang-undang pemilihan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020. Dari fakta dan keterangan yang kami dapat, Yang Mulia untuk dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5), itu tidak dapat ditindaklanjuti dengan sanksi diskualifikasi karena tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran pada pasal tersebut, Yang Mulia. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5).

1992.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, pada saat perkara yang sudah di MK masih berproses ... sudah diproses masih juga Bawaslu menangani atau menindaklanjuti laporan, ya?

1993.BAWASLU: MASTAWAN

Ini di 11 Januari, Yang Mulia sebelum sidang di MK.

1994.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Itu, kan Bapak anu apa ... menerima laporan atau memutusnya? 11 Januari itu.

1995.BAWASLU: MASTAWAN

Itu menerima laporan, Yang Mulia. pada tanggal 11 Januari itu pak ... Ibu Hj. Ananda melapor ke Bawaslu RI (...)

1996.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. terus proses penanganannya, kan waktunya setelah itu tentunya?

1997.BAWASLU: MASTAWAN

Pena ... proses penanganannya itu setelah Bawaslu provinsi melimpahkan kepada Bawaslu Kota Banjarmasin, Yang Mulia.

1998.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu tanggal berapa bulan berapa?

1999.BAWASLU: MASTAWAN

Pada tanggal 13 Januari 2021.

2000.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, terus.

2001.BAWASLU: MASTAWAN

Setelah kami tangani penanganan pelanggaran tersebut, dari fakta dan keterangan yang kami dapatkan itu mengenai masalah pelanggaran administrasi pemilihan, itu tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran pasal (...)

2002.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah tadi, Pak.

2003.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, sudah.

2004.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus yang anu (...)

2005.BAWASLU: MASTAWAN

Kemudian untuk pelanggaran pidana pemilu (...)

2006.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pidana.

2007.BAWASLU: MASTAWAN

Ya. pelanggaran pidana pemilu berdasar ... berdasarkan pembahasan kedua dengan Sentra Gakkumdu akhirnya disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran itu tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya karena tidak terpenuhi syarat formil, Yang Mulia.

2008.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa itu syarat formil?

2009.BAWASLU: MASTAWAN

Tidak terpenuhi syarat formil itu adalah 7 hari sejak diketahuinya kejadian.

2010.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Berarti belum masuk substansi dong?

2011.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2012.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum masuk substansinya?

2013.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2014.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum dinilai, ya?

2015.BAWASLU: MASTAWAN

Jadi ... jadi pada saat pelaporan, syarat formil dan materiil pelaporan terpenuhi ini, Yang Mulia. Tapi, ketika kita menggali fakta dan keterangan ternyata ada syarat formil yang tidak terpenuhi, Yang Mulia.

2016.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, yang 7 hari tadi?

2017.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2018.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sejak diketahui?

2019.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2020.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apakah tidak terpenuhi syarat formil itu kemudian juga masuk menilai substansi?

2021.BAWASLU: MASTAWAN

Masuk, Yang Mulia.

2022.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masuk? Kenapa, Pak?

2023.BAWASLU: MASTAWAN

Jadi, kemarin dari fakta dan keterangan yang kami dapatkan bahwa kejadian ... kejadian yang ... peristiwa masalah KTP itu.

2024.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

2025.BAWASLU: MASTAWAN

Itu terjadi di Bulan Oktober, Yang Mulia.

2026.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

2027.BAWASLU: MASTAWAN

Terjadi di Bulan Oktober.

Kemudian si yang mengetahui peristiwa itu, yang mengalami peristiwa itu, melaporkan kepada tim hukum ... kepada Tim Hukum Pasangan Nomor Urut 04, itu pada Bulan Desember 2020 ... 15 Desember 2020. Kemudian Tim Paslon Pasangan Nomor Urut 04, itu menceritakan lagi kepada Hj. Ananda pada Bulan Januari, tepatnya pada Tanggal 4 Januari 2021.

Nah, setelah Tanggal 4 Januari itu Ibu Ananda mendengar cerita dari tim hukum. Pada Tanggal 11 Januari, Ibu Hj. Ananda melaporkan ke Bawaslu provinsi, Yang Mulia.

2028.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Itu yang kemudian Saudara katakan bahwa itu sudah melewati 7 hari itu?

2029.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2030.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Berarti dalam konteks syarat formil memang sudah lewat.

2031.BAWASLU: MASTAWAN

Sudah lewat, Yang Mulia.

2032.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi apakah, ini pertanyaan saya, saya ulang lagi. Kalau lewat waktu, syaratnya formilnya sudah lewat karena lebih dari 7 hari sejak diketahui karena tek-toknya ini lapor dari bagian hukum kemudian baru apa ... diceritakan lagi ke orang berikutnya, baru kemudian lapor. Padahal kejadiannya itu sudah Oktober, ya, Pak, ya?

2033.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, siap, Yang Mulia.

2034.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oktober? Kemudian baru Januari di ... apakah juga kemudian pertanyaan saya adalah substansi materinya juga diperiksa itu, lho?

2035.BAWASLU: MASTAWAN

Diperiksa, Yang Mulia.

2036.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Diperiksa, kenapa kok diperiksa, itu yang pertanyaan kami?

2037.BAWASLU: MASTAWAN

Karena memang kita untuk mengetahui fakta dan keterangan yang harus kita dapatkan, Yang Mulia.

2038.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, begitu. Oh, jadi pertama itu tidak memeriksa, "Ini laporan diajukan kapan dan kejadiannya kapan?"

2039.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2040.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kan urutannya itu kan?

2041.BAWASLU: MASTAWAN

Laporan itu ... ya. itu termasuk di syarat formil dan materiil pelaporan, Yang Mulia. Jadi, pada saat laporan itu masuk kita ada kajian awal yang menentukan apakah syarat formil dan materiil daripada pelanggaran itu terpenuhi atau tidak, Yang Mulia.

2042.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu kan bukan kumulatif Bapak, mestinya alternatif dulu misalnya syarat formil terpenuhi dulu.

2043.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2044.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu kemudian kalau tidak terpenuhi kumulatif ... syarat materiilnya kan kemudian tidak diperiksa lanjut. Saya tidak tahu sistem yang dipakai.

2045.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, jadi dalam hal penanganan pelanggaran, Yang Mulia, pada saat ada orang yang melapor. Jadi kita membuat satu kajian awal dulu, Yang Mulia.

2046.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

2047.BAWASLU: MASTAWAN

Kajian awal (...)

2048.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu tidak usah di ... di ... prinsipnya, intinya bahwa di Bawaslu Banjarmasin ketika menangani perkara ini sudah termasuk didalam syarat formil, tapi materiilnya juga. Tapi kesimpulannya apa kalau begitu?

2049.BAWASLU: MASTAWAN

Berarti itu tidak bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya, Yang Mulia.

2050.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak bisa dilanjutkan karena?

2051.BAWASLU: MASTAWAN

Karena tidak terpenuhi syarat formilnya itu tadi, Yang Mulia.

2052.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Syarat formilnya dan materiilnya?

2053.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2054.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa syarat formilnya saja?

2055.BAWASLU: MASTAWAN

Syarat formilnya saja, Yang Mulia.

2056.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, tidak ter ... tidak bisa ditindaklanjuti, tidak memenuhi syarat formil.

2057.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, oleh (...)

2058.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa anunya ... amar putusannya kalau begitu?

2059.BAWASLU: MASTAWAN

Berarti itu di ... dihentikan, Yang Mulia.

2060.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dihentikan?

2061.BAWASLU: MASTAWAN

Ya. Tidak bisa di ... ditindaklanjuti ke tahap berikutnya, ke tahap penyelidikan dan penyidikan dari kepolisian.

2062.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi sudah menilai substansi belum, Pak?

2063.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, Yang Mulia?

2064.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah menilai materilnya belum?

2065.BAWASLU: MASTAWAN

Sudah, Yang Mulia.

2066.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, gitu. Jadi, dihentikan dan tidak terbukti, begitu?

2067.BAWASLU: MASTAWAN

Peristiwa hukumnya ada, Yang Mulia.

2068.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

2069.BAWASLU: MASTAWAN

Peristiwa hukumnya ada, cuma dari segi syarat formil.

2070.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak terpenuhi.

2071.BAWASLU: MASTAWAN

Tidak terpenuhi dan sehingga tidak bisa ditingkatkan kepada tahap selanjutnya, Yang Mulia.

2072.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi materiilnya juga sudah dinilai?

2073.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, sudah dinilai.

2074.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, disimpulkan tidak terbukti juga?

2075.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2076.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, tidak memenuhi syarat formil, materiilnya tidak terbukti begitu?

2077.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, Yang Mulia.

2078.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak mesti akan ketemu konklusi yang menyulitkan kalau syarat formil di sisi ... di satu sisi sebagai pintu masuk kemudian dinyatakan sudah lewat waktu, tapi kemudian masuk pada pokok permohonan perkara ... pokok aduan. Jadi (...)

2079.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Pak Ketua?

2080.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah, nanti kami yang.

2081.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Tidak ... tidak membantah itu, Pak. Cuma memberitahu pasal yang mengetahui itu, Pak? Pasal 19 ayat (2) huruf j juncto pasal (...)

2082.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Pihak Terkait keberatan. Pihak Terkait keberatan dengan ini.

2083.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

2084.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Kalau formil tidak terpenuhi, Pak. Maka kemudian dijadikan temuan, itu ketentuannya seperti itu (...)

2085.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke ... oke.

2086.BAWASLU: MASTAWAN

Sama (...)

2087.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, kita agar tidak ... bukaan, Pak Bambang, terakhir itu yang disampaikan. Kita enggak buka dialog untuk pihak-pihak yang lain, tadi sudah saya tegaskan.

Pak, memang di persidangan ini, Bawaslu ini saya tidak dalam posisi untuk ... apa ... tidak berpotensi untuk saling ... apa ... saling menghadap-hadapkan. Tapi memang ada Bawaslu yang kalau tidak terpenuhi syarat formil, ya, substansinya tidak diperiksa.

2088.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2089.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi Bapak, kan, diperiksa, kan?

2090.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2091.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi tidak ... tidak mau mengatakan tidak terbukti, tapi adalah sudah lewat waktu.

2092.BAWASLU: MASTAWAN

Sudah lewat waktu ... siap.

2093.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Secara formil. Oke, itu soal yang KTP, ya?

2094.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2095.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Termasuk money politics?

2096.BAWASLU: MASTAWAN

Termasuk, Yang Mulia.

2097.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, kalau yang di masalah yang dipersoalkan oleh Saksi bahwa ketika dia melakukan kom ... pencoblosan, biliknya tidak ada daftar hadir, kemudian tidak ada privasinya, DPTb ... DPTb-nya juga tidak sah ... tidak ada itu, pernah ada laporan, tidak, itu?

2098.BAWASLU: MASTAWAN

Pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 9 Desember sampai pada saat tahap rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan, kita tidak menemukan adanya kejadian dan juga tidak ada laporan, Yang Mulia.

2099.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada laporan tentang itu?

2100.BAWASLU: MASTAWAN

Nggih. Tapi pada tanggal 17 Desember 2020, kita ada menerima laporan dari Bapak Dede Maulana, tim hukumnya (...)

2101.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini yang berkaitan dengan TPS 06?

2102.BAWASLU: MASTAWAN

Ya ... ya, Yang Mulia.

2103.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada?

2104.BAWASLU: MASTAWAN

Ada, Yang Mulia.

2105.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus apa ... tindak ... tindak ... tindakan Bawaslu?

2106.BAWASLU: MASTAWAN

Dari fakta dan keterangan yang kami dapatkan bahwa ... kami menyimpulkan bahwa tidak terdapat unsur-unsur pelanggaran pemilihan, Yang Mulia.

2107.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

250 tidak ada daftar hadir.

2108.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2109.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu tidak ada pelanggaran?

2110.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, itu termasuk di ... kemarin yang sudah dilaporkan oleh Dede Maulana ke Bawaslu Kota Banjarmasin, Yang Mulia.

2111.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus yang ... yang menjatuhkan sikap ... putusan itu Bawaslu kabupaten atau kota atau panwascam ini untuk yang TPS 06?

2112.BAWASLU: MASTAWAN

Bawaslu Kota Banjarmasin, Yang Mulia.

2113.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu kota, ya?

2114.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2115.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu juga tidak memenuhi?

2116.BAWASLU: MASTAWAN

Unsur-unsur pelanggaran, Yang Mulia.

2117.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Unsur-unsur pelanggaran.

2118.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Pak Ketua, mohon maaf, Pak Ketua, bukan mau menambahkan. Ini ada hasil KPU-nya di sini dibaca merekomendasikan setuju ada pelanggaran.

2119.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah, nanti Bapak ... kami pertimbangkan semua. Buktinya ... gimana (...)

2120.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Antara KPU provinsi dan ini juga beda-beda.

2121.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus yang berkaitan dengan ini, Pak, pada saat rapat pleno kap ... KPU ... itu tadi keterangan Saksi yang mengatakan bahwa daftar pemilih lebih sedikit dari suara itu bagaimana? Benar tidak itu?

2122.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, siap, Yang Mulia. Pada saat penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Banjarmasin itu memang ada ketidaksesuaian daripada D.Hasil Kecamatan yang dibacakan oleh kecamatan dengan data yang ada di Bawaslu Kota Banjarmasin, Yang Mulia.

2123.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini yang DPTb TPS 22 dan TPS 12?

2124.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, Yang Mulia. Nah, kemarin ketidaksesuaian itu terletak di ... pada ... di daftar pemilih tetap, Yang Mulia.

2125.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gitu, ya?

2126.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2127.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus apa tindak ... tindakan dari Bawaslu?

2128.BAWASLU: MASTAWAN

Jadi, kemarin kita sudah menyampaikan kepada KPU untuk segera dilakukan perbaikan dan pada saat itu juga ditindaklanjuti ... dilakukan perbaikan, Yang Mulia.

2129.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Perbaikan seperti apa itu?

2130.BAWASLU: MASTAWAN

Perbaikan perubahan terhadap ketidaksesuaian ... sesuaian yang sudah kami temukan tadi pada saat rekapitulasi itu, Yang Mulia.

2131.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, klop?

2132.BAWASLU: MASTAWAN

Klop, Yang Mulia. Sesuai.

2133.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Antara suara pemilih dengan jumlah (...)

2134.BAWASLU: MASTAWAN

Sesuai, Yang Mulia. Dan ... dan pada saat itu langsung dibuatkan berita acara penetapan dan semua saksi tanda tangan, kecuali Saksi Paslon 04, Yang Mulia.

2135.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak keterangan tambahannya enggak ada, ya, di ... cuma mengajukan bukti, ya? Itu bukti-bukti ada semua yang Bapak ceritakan itu?

2136.BAWASLU: MASTAWAN

Ada buktinya, Yang Mulia.

2137.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada?

2138.BAWASLU: MASTAWAN

Ada.

2139.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, dari saya yang terakhir soal bagaimana mengenai videotron ... videotron yang dipasang untuk kot ... di kota sana, kemudian kaitannya dengan fasilitas per ... pernah ada laporan, tidak, itu?

2140.BAWASLU: MASTAWAN

Videotron itu tidak ada laporan dari masyarakat dan juga tidak ada temuan dari pengawas pemilihan, Yang Mulia.

2141.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Temuan tidak ... Bapak, enggak jalan ke sana, sering ada gambarnya?

2142.BAWASLU: MASTAWAN

Tidak (...)

2143.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Calon-calon (...)

2144.BAWASLU: MASTAWAN

Kebetulan karena itu di mall, jaraknya jauh (...)

2145.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak?

2146.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, tidak, Yang Mulia.

2147.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Harusnya temuan kalau tidak ada laporan.

2148.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2149.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian yang terakhir mengenai tarif PDAM itu, apa ada laporan, tidak?

2150.BAWASLU: MASTAWAN

Tarif PDAM termasuk juga yang dilaporkan oleh Hj. Ananda pada tanggal 9 Januari itu, Yang Mulia.

2151.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, yang termasuk satu-kesatuan dengan yang awal?

2152.BAWASLU: MASTAWAN

Satu-kesatuan, Yang Mulia.

2153.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang betul itu ada menjelang pemilihan, ada penurunan tarif?

2154.BAWASLU: MASTAWAN

Betul, Yang Mulia.

2155.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Betul. Terus sama sekali tidak terbukti juga?

2156.BAWASLU: MASTAWAN

Dari fakta dan keterangan yang kami dapat (...)

2157.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak memenuhi syarat formil?

2158.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, tidak ter ... tidak ada unsur-unsur pelanggaran, Yang Mulia.

2159.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh.

2160.BAWASLU: MASTAWAN

Karena itu bagian daripada pelanggaran administrasi, Yang Mulia.

2161.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau pelanggaran administrasi memang Bawaslu tidak punya ...
anu ... kewenangan?

2162.BAWASLU: MASTAWAN

Kalau pelanggaran administrasi memang berarti Bawaslu yang
melakukan penanganan, Yang Mulia.

2163.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, bagaimana dengan dari kaca mata Anda sebagai Bawaslu,
tadi mengatakan bahwa apa yang dilakukan berkaitan dengan
penurunan atau tarif itu hanya pelanggaran administrasi, apa sanksi atau
sikap yang diambil Bawaslu?

2164.BAWASLU: MASTAWAN

Jadi dalam hal masalah itu, itu kan berarti pena ... pelanggaran
administrasi terkait dengan Pasal yang dilanggar adalah Pasal 71 ayat (3)
dan ayat (5), Yang Mulia.

2165.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

2166.BAWASLU: MASTAWAN

Nah, di Pasal 71 ayat (3) dan (5) itu ada 4 unsur, Yang Mulia.
Yang pertama adalah terkait dengan gubernur, wakil gubernur, wali kota

atau wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan. Nah (...)

2167.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

2168.BAWASLU: MASTAWAN

Program dan kegiatan itu juga termasuk unsur, Yang Mulia. kemudian (...)

2169.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, menurut ... menurut Bawaslu ketika itu unsur apa yang tidak terpenuhi?

2170.BAWASLU: MASTAWAN

Unsur ke ... menguntungkan dan merugikan, serta kegiatan dan program, Yang Mulia.

2171.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, itu bukan ... bukan bagian dari program?

2172.BAWASLU: MASTAWAN

Ya. Karena dari fakta keterangan yang kita dapat, Yang Mulia.

2173.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di T ... Di PK-berapa itu, Pak? Keterangan ... anu ... keputusan itu?

2174.BAWASLU: MASTAWAN

Putusan itu di 05 di kajian kita, Yang Mulia.

2175.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

05, ya?

2176.BAWASLU: MASTAWAN

Ya. Nanti akan ada bukti tambahan, Yang Mulia, dari Bawaslu Kota Banjarmasin.

2177.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kapan?

2178.BAWASLU: MASTAWAN

Sudah ... sudah tadi di (...)

2179.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah diserahkan, ya?

2180.BAWASLU: MASTAWAN

Sudah diserahkan.

2181.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PK-05, ya?

2182.BAWASLU: MASTAWAN

Ya. PK-tambahan, bukti PK-07, Yang Mulia.

2183.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

07.

2184.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2185.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Buka, Mas. Pak Ketua, ada? Silakan, Pak Daniel.

2186.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Bawaslu?

2187.BAWASLU: MASTAWAN

Siap.

2188.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berapa semua laporan yang masuk ke Bawaslu, baik yang di register maupun tidak di register?

2189.BAWASLU: MASTAWAN

Laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Banjarmasin yang sudah kita register itu ada 3 laporan, Yang Mulia.

2190.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3 laporan, ya? Itu yang register?

2191.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2192.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang tidak di register?

2193.BAWASLU: MASTAWAN

Yang tidak kita register ada 2 laporan, Yang Mulia.

2194.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu laporan tentang apa yang tidak di register, Pak?

2195.BAWASLU: MASTAWAN

Yang pertama adalah laporan mengenai masalah di ... apa ... dana CSR itu ... itu bukan laporan tapi informasi awal yang tidak bisa kita jadikan temuan, Yang Mulia.

2196.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ini yang melaporkan ini siapa? Yang soal dana CSR ini?

2197.BAWASLU: MASTAWAN

Yang melaporkan itu kemarin ada orang, tapi dia tidak mau datang untuk memenuhi syarat formil dan materilnya, Yang Mulia.

2198.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi diundang tapi tidak hadir?

2199.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2200.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ini dari pasangan calon atau bukan? Atau dari laporan biasa?

2201.BAWASLU: MASTAWAN

Bukan, Yang Mulia.

2202.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan, ya? Kemudian yang kedua?

2203.BAWASLU: MASTAWAN

Yang kedua adalah masalah WA Blast, Yang Mulia.

2204.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Masalah apa?

2205.BAWASLU: MASTAWAN

WA Blast.

2206.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

2207.BAWASLU: MASTAWAN

Dan itu juga sudah ada di bukti tambahan kita, Yang Mulia.

2208.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Di bukti tambahan berapa, nih? Ini soalnya di bukti tambahan ini, ini ada 002 sampai dengan 005.

2209.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2210.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, pertanyaan saya, 01-nya apa? 001-nya yang mana? Kok tiba-tiba ada langsung 002 di bukti tambahan ini?

2211.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, ini dari mulai 002 sampai 005, Yang Mulia, yang (...)

2212.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan, kan di ... di bukti yang awal diberikan itu kan PK-01 sampai PK-06?

2213.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, Yang Mulia.

2214.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, kemudian ada bukti tambahan ini PK langsung 002. Nah, pertanyaannya, PK-001 nya mana? Yang tambahannya.

2215.BAWASLU: MASTAWAN

Yang tambahannya?

2216.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

2217.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, yang tambahannya Bukti PK-07, Yang Mulia.

2218.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berapa?

2219.BAWASLU: MASTAWAN

Bukti PK-07.

2220.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

PK-07?

2221.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2222.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kalau yang di sini hanya ada PK-06. Oh, jadi dia PK-07 itu meliputi laporan nomor 002 sampai 005, ya?

2223.BAWASLU: MASTAWAN

Ya. Siap, Yang Mulia.

2224.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, berarti kalau laporan 001 yang mana?

2225.BAWASLU: MASTAWAN

Laporan 001 ki ... tidak kita sertakan di sini, Yang Mulia.

2226.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu yang termasuk yang tidak dilaporkan?

2227.BAWASLU: MASTAWAN

Ya. Karena tidak berkaitan dengan yang didalilkan, Yang Mulia.

2228.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu yang mana itu, yang 001?

2229.BAWASLU: MASTAWAN

Yang masalah ... mengenai masalah CSR tadi, Yang Mulia.

2230.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dana CSR, ya?

2231.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, Yang Mulia.

2232.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Kenapa tidak dinomorin? Sementara tidak di proses?

2233.BAWASLU: MASTAWAN

Maaf, Yang Mulia?

2234.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ini kan ada 2 yang tidak teregister, satu dana CSR dan satu WA Blast, ya tadi?

2235.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2236.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, maksud saya WA Blast ini kan tidak di dalam bukti tambahan ini, ini kan tidak ada nih, sementara kalau tadi saya nanya yang 001, dikatakan itu berkaitan dengan dana CSR-nya. Nah, saya ingin mendalami sedikit yang terkait dengan tambahan, ya.

2237.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2238.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukti tambahan ini, itu yang terkait dengan pelanggaran ASN, ya. Penerusan pelanggaran administrasi pemilihan, ini untuk yang 002, Pak.

Itu sampai sekarang apakah sudah ada jawabannya terkait dengan tambahan 002 ini?

2239.BAWASLU: MASTAWAN

Kalau masalah 002 kajian yang pelanggaran ... kajian pelanggaran 002 itu terkait dengan pembukaan kotak di Banjarmasin Selatan, Yang Mulia. Penanganan pelanggaran kotak ... bukan masalah pelanggaran otoritas ASN, Yang Mulia.

2240.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh bukan ASN, ya?

2241.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2242.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ini yang terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan?

2243.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, Yang Mulia.

2244.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Baik, dari saya cukup sekian, terima kasih.

2245.KETUA: ASWANTO

Bawaslu.

2246.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2247.KETUA: ASWANTO

Ini di keterangan Saudara yang pertama kan hanya 5 laporan, ya?

2248.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2249.KETUA: ASWANTO

Berapa temuan?

2250.BAWASLU: MASTAWAN

Temuan tidak ada, Yang Mulia.

2251.KETUA: ASWANTO

Tidak ada temuan?

2252.BAWASLU: MASTAWAN

Tidak ada temuan, Yang Mulia.

2253.KETUA: ASWANTO

Berarti pemilu di sana relatif aman, Pak, ya?

2254.BAWASLU: MASTAWAN

Relatif aman, Yang Mulia.

2255.KETUA: ASWANTO

He eh bagus, tidak ada. Tadi ada laporan yang Saudara katakan syarat formil tidak terpenuhi (...)

2256.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2257.KETUA: ASWANTO

Karena sudah lewat tenggat waktu. Itu tadi per-Bawaslu, ya?

2258.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2259.KETUA: ASWANTO

Sekarang pernah baca per-Bawaslu bahwa terhadap laporan yang sudah lewat waktu itu dijadikan temuan oleh Bawaslu, pernah baca itu?

2260.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2261.KETUA: ASWANTO

Nah, kasus yang Saudara proses itu yang menurut Saudara tadi tidak terpenuhi syarat formil karena tenggang waktunya lewat (...)

2262.BAWASLU: MASTAWAN

Siap.

2263.KETUA: ASWANTO

Itu kira-kira apa alasannya sehingga tidak dijadikan temuan?

2264.BAWASLU: MASTAWAN

Yang pertama, Yang Mulia. Bahwa itu sudah bentuknya laporan, Yang Mulia. Yang sudah kita register dan sudah kita lakukan penanganan, Yang Mulia. Sehingga itu tidak bisa kita jadikan temuan.

2265.KETUA: ASWANTO

Di per Bawaslu apa bunyinya per-Bawaslunya?

2266.BAWASLU: MASTAWAN

Kalau di per-Bawaslu 8 itu kalau yang dimaksud dengan temuan adalah temuan dari pengawas pemilihan pada saat dia melakukan tugas-tugas pemi ... pengawasan, Yang Mulia.

2267.KETUA: ASWANTO

Tapi di per-Bawaslu itu kan ada perintah.

2268.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2269.KETUA: ASWANTO

Terhadap laporan dari masyarakat (...)

2270.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2271.KETUA: ASWANTO

Yang sudah ... yang tidak bisa ditangani karena alasan lewat waktu (...)

2272.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2273.KETUA: ASWANTO

Itu tidak ... tidak mesti mati.

2274.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2275.KETUA: ASWANTO

Karena perbawaslu memerintahkan kepada Bawaslu untuk dijadikan temuan.

2276.BAWASLU: MASTAWAN

Siap.

2277.KETUA: ASWANTO

Apa tidak begitu normalnya, Pak?

2278.BAWASLU: MASTAWAN

Tapi yang bisa dijadikan temuan itu apabila misalnya ada laporan dari masyarakat, tapi itu tidak terpenuhi syarat formil dan materiil, Yang Mulia. Sehingga itu bisa kita jadikan informasi awal yang kemudian kita

bisa lanjutkan ke investigasi untuk akhirnya bisa apakah ini bisa kita jadikan temuan atau tidak, Yang Mulia.

2279.KETUA: ASWANTO

Jadi Ketika Saudara menerima laporan (...)

2280.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2281.KETUA: ASWANTO

Itu Saudara langsung memeriksa 2 syarat sekaligus?

2282.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2283.KETUA: ASWANTO

Formil dan materiil tadi sudah di (...)

2284.BAWASLU: MASTAWAN

Siap. Jadi ada seketika kita menerima laporan, maka kita melakukan kajian awal untuk melihat apakah syarat formil dan materiil dari pelaporan itu apa terpenuhi atau tidak, Yang Mulia.

2285.KETUA: ASWANTO

Baik. Nah, ini ada ... ada apa namanya? Ini di bukti Saudara ini, Bukti P-59. Nah, apakah betul pertimbangan Bawaslu dalam perkara yang terlapornya Ahmad Baihaqi dan Ibnu Sina Arifin ... dan Ridwan Reksayadi. Bawaslu menegaskan di dalam pertimbangannya atau di dalam kajiannya kalau 2 terlapor tersebut telah terbukti menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan politik uang tetapi Saudara tidak menggunakan pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu, apa betul itu?

2286.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2287.KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

2288.BAWASLU: MASTAWAN

Hadir[Sic!].

2289.KETUA: ASWANTO

Nah, berarti kan syarat materiilnya ini sudah terpenuhi.

2290.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2291.KETUA: ASWANTO

Kenapa tidak dijadikan temuan?

2292.BAWASLU: MASTAWAN

Karena memang itu sudah dimasuk bagian dari pelaporan yang dilaporkan, Yang Mulia. yang sudah kita register dan sudah kita (...)

2293.KETUA: ASWANTO

Bukan ini, yang lewat waktu.

2294.BAWASLU: MASTAWAN

Ya.

2295.KETUA: ASWANTO

Ini yang lewat waktu atau bukan?

2296.BAWASLU: MASTAWAN

Ya ... ya, yang lewat waktu yang masalah pidana pemilu itu, Yang Mulia.

2297.KETUA: ASWANTO

Oke. Kenapa bisa kajian ... kajian Bawaslu mengatakan sudah terbukti Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 188, serta Pasal 73, Pasal 187A, tapi kemudian hasilnya menjadi tidak terbukti. Bagaimana ceritanya itu, Pak?

2298.BAWASLU: MASTAWAN

Kalau Pasal 71, Yang Mulia, ayat (3) dan ayat (5) itu tentang masalah pelanggaran administrasi. Kita sudah memutuskan bahwa itu tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran, Yang Mulia. Kalau itu Pasal 71.

2299.KETUA: ASWANTO

Ini saya ... ini dalilnya ... dalilnya Pemohon barangkali, ya. Tapi ada di bukti Saudara P-59. Di P-59 itu ada paragraf yang mengatakan kajian Bawaslu Kota Banjarmasin yang menyatakan dua terlapor tersebut telah terbukti menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan politik uang, politik uang tetapi tidak menggunakan ... tapi Bawaslu tidak menggunakan pasal berkaitan dengan tindak pidana pemilu. Apa betul itu?

2300.BAWASLU: MASTAWAN

Itu tidak kita katakan ... pasal yang dilanggar adalah Pasal 73 juncto Pasal 187A ayat ... Yang Mulia.

2301.KETUA: ASWANTO

Ada lagi, di dalam pertimbangan Saudara. Bahwa berdasarkan kesesuaian fakta-fakta keterangan saksi, ditemukan adanya ajakan untuk memilih, menjanjikan, dan lain-lain. Fakta yang terungkap, pemberian dan/atau pembagian uang tersebut diawali dengan pengumpulan KTP warga dengan menjanjikan 75 sampai 100.000 per KTP. Itu di laporan Saudara loh.

2302.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2303.KETUA: ASWANTO

Tapi ini kemudian menjadi mentah?

2304.BAWASLU: MASTAWAN

Ya karena memang ketika kita melakukan pembahasan dengan sentra Gakkumdu, maka itu tidak bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya karena itu tadi, Yang Mulia, tidak terpenuhi syarat formil tadi, Yang Mulia.

2305.KETUA: ASWANTO

Kan mekanisme pembahasannya begini ya, Pak ya. Ada laporan, kemudian dibahas oleh Bawaslu.

2306.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2307.KETUA: ASWANTO

Lalu kalau ada bukti-bukti awal atau kuat dugaan dibawa ke Gakkumdu.

2308.BAWASLU: MASTAWAN

Ya, siap, Yang Mulia.

2309.KETUA: ASWANTO

Ini pengalaman kita dari sekian kasus selalu kandas di Gakkumdu.

2310.BAWASLU: MASTAWAN

Siap.

2311.KETUA: ASWANTO

Padahal mestinya Saudara mempertahankan dong. Anda kan sebagai Bawaslu, Anda harus mempertahankan bahwa ini kajian kami.

2312.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia. Jadi pada saat pembahasan pertama itu kan kemarin kita (...)

2313.KETUA: ASWANTO

Pembahasan pertama itu kan belum ada Gakkumdu.

2314.BAWASLU: MASTAWAN

Pembahasan pertama ... ya siap, Yang Mulia.

2315.KETUA: ASWANTO

Ya, belum ada Gakkumdu dan hampir sekian teman-teman Bawaslu yang kita periksa pada pembahasan awal itu mereka dengan yakin mengatakan unsur terbukti.

2316.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2317.KETUA: ASWANTO

Tetapi ketika pembahasan kedua sudah melibatkan Gakkumdu, kandas.

2318.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2319.KETUA: ASWANTO

Boleh saya tahu, siapa unsur Gakkumdu itu saja?

2320.BAWASLU: MASTAWAN

Unsur Gakkumdu kepolisian dan kejaksaan, Yang Mulia.

2321.KETUA: ASWANTO

Baik. Ada kepolisian dan kejaksaan.

2322.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2323.KETUA: ASWANTO

Baik. Mungkin mereka lebih paham unsur-unsur, ya, sehingga kandas di situ.

2324.BAWASLU: MASTAWAN

Siap.

2325.KETUA: ASWANTO

Atau begitu, Pak?

2326.BAWASLU: MASTAWAN

Kita sudah mempertahankan sebenarnya, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan yang kita dapatkan itu kan kita memang sudah mengungkapkan masalah itu.

2327.KETUA: ASWANTO

Baik. Jadi Anda sudah mempertahank, tetapi kemudian ... berapa anggota Gakkumdu itu?

2328.BAWASLU: MASTAWAN

Sentra Gakkumdu dari kepolisian itu berjumlah 3 orang, Yang Mulia.

2329.KETUA: ASWANTO

3 orang, Gakkumdu, pak polisi.

2330.BAWASLU: MASTAWAN

Dari kejaksaan itu 2 orang, Yang Mulia.

2331.KETUA: ASWANTO

Berarti 5. Dari Bawaslu berapa?

2332.BAWASLU: MASTAWAN

Kalau dari Bawaslu seluruh komisioner, Yang Mulia.

2333.KETUA: ASWANTO

Seluruh komisioner, berarti kalau 3 ... Banjarmasin 3, ya?

2334.BAWASLU: MASTAWAN

Banjarmasin 5 orang, Yang Mulia.

2335.KETUA: ASWANTO

5 orang. Berarti kalau potong kalau Anda mempertahankan mestinya Anda menang dong?

2336.BAWASLU: MASTAWAN

Siap, Yang Mulia.

2337.KETUA: ASWANTO

Oke. Cukup, Yang Mulia. Baik, sekarang kita sahkan bukti dulu. Ini sidang kita cukup melelahkan, mulai jam 08.00 WIB sampai jam 19.00 WIB, tadi kita break satu setengah jam.

Untuk Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 ini, Pemohon memasukkan bukti tambahan P-61 sampai dengan P-87, betul, ya? Sudah diperiksa dan ... ada catatan sedikit, ya. Ini softcopy tapi di luar alat bukti, softcopy keterangan Ahli itu belum dimasukkan, ya. Softcopy-nya? Sudah dikirim. Baik.

Kita sahkan bukti dulu P-61 sampai dengan P-87

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait, ini memasukkan bukti ... eh sori, pihak Termohon dulu. Termohon memasukkan bukti 23 ... T-23 sampai dengan T-33, Pak?

2338.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Betul, Yang Mulia.

2339.KETUA: ASWANTO

Betul, ya.

2340.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Betul.

2341.KETUA: ASWANTO

Sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

2342.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRANI

Terima kasih, Yang Mulia.

2343.KETUA: ASWANTO

Kemudian Pihak Terkait memasukkan bukti PT-29 sampai dengan PT-299?

2344.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap.

2345.KETUA: ASWANTO

Betul, ya.

2346.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap.

2347.KETUA: ASWANTO

Sudah diperiksa dan lengkap, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu memasukkan tambahan PK-7? Betul, ya.

KETUK PALU 1X

Ini untuk keterangan ... kalau di catatan kami, ya. Nanti kita cek lagi. Untuk keterangan Ahli Pemohon dan Pihak Terkait itu belum kami terima softcopy-nya, tapi kalau sudah masuk nanti akan kami temukan.

2348.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap.

2349.KETUA: ASWANTO

Saya kira, ya agak panjang sidang kita ini. Tetapi perdebatan hanya sampai di dalam ruang persidangan, di luar tidak ada perdebatan lagi. Insya Allah kami segera akan melaporkan ke Rapat Pemusyawaratan Hakim, apapun keputusan Rapat Pemusyawaratan Hakim nanti akan disampaikan kepada semua pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Terima kasih, kita sudah (...)

2350.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Izin, Majelis.

2351.KETUA: ASWANTO

Siapa itu?

2352.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Pihak Terkait.

2353.KETUA: ASWANTO

Apa itu?

2354.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Pihak Terkait.

2355.KETUA: ASWANTO

Pihak Terkait?

2356.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ya. Pihak Terkait, kemarin sudah mengirimkan soft copy kuasa tambahan, Majelis, kuasa tambahan. Pihak Terkait ada menambah Kuasa tambahan.

2357.KETUA: ASWANTO

Ya, kita sudah dapat juga hard copy-nya, tetapi anu, apa (...)

2358.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Ini aslinya.

2359.KETUA: ASWANTO

Asli?

2360.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, ini aslinya.

2361.KETUA: ASWANTO

Diserahkan aslinya, ya.

2362.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA

Siap, Majelis.

2363.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Pak Ketua, sebelum ditutup, Pak Ketua.

2364.KETUA: ASWANTO

Ya.

2365.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Kami pasti tidak ingin mau menang kemenangan sendiri, tapi salah satu pintu atau jalan keluar untuk mengatasi kemelut ini adalah hadirkan C-1 dan data. Kalau itu bisa dihadirkan (...)

2366.KETUA: ASWANTO

Nanti itu, itu ... apa ... diskusinya, nanti ... apa (...)

2367.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Enggak itu bisa jadi jalan keluar, Pak Ketua. Jadi kita enggak bisa lagi tipu sana, tipu sini.

2368.KETUA: ASWANTO

Itu diskusinya (...)

2369.KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih.

2370.KETUA: ASWANTO

Itu masuk ke area kewenangan bukan hanya panel, tapi itu menjadi area Mahkamah.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 19.05 WIB

Jakarta, 1 Maret 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

